

Volume X, No. 2, Desember 2024 ISSN: 2579-7727 (Print)
ISSN: 2442-7985 (Online)

JURNAL KEAMANAN NASIONAL

Akreditasi: SK Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset dan
Inovasi Nasional Nomor 200/M/KPT/2020, tanggal 23
Desember 2020.

- Keamanan dari Represi dan Penyelesaian Tindak Pidana Berat HAM: Studi Komparatif Argentina, Kamboja dan Yunani
- **Peramalan Kebijakan untuk Pencegahan Terorisme: Pendekatan Pemolisian Demokratis di Era Digital**
- Strategi dan Peluang Indonesia dalam Kerja Sama BRICS untuk Memperkuat Keamanan Ekonomi Nasional
- **Faktor Penentu Ketahanan Ekonomi UMKM Jakarta dalam Menembus Pasar Global**
- Pendekatan Kebudayaan dalam Membangun Ketahanan dan Keamanan Insani: Sebuah Kajian Strategis



Pusat Kajian Keamanan Nasional
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) merupakan pusat kajian di bawah naungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBJ). Puskamnas didirikan dalam rangka meningkatkan sumbangsih universitas dalam kerangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Puskamnas mengembangkan pemikiran dalam lingkup isu-isu keamanan.

Jurnal Keamanan Nasional menyajikan tulisan/artikel seputar isu keamanan nasional serta pengaruh dinamika lingkungan strategis internasional. Puskamnas mengundang Anda menuliskan gagasan-gagasan kritis dan orisinal seputar keamanan nasional (tawuran, deradikalisasi, terorisme, kepolisian, militer, konflik social, insurgency, dll). Tulisan dapat bersifat teoritik, analisis, hasil penelitian, sejarah, studi kasus, termasuk isu-isu terkini baik dalam konteks nasional, regional atau mondial.

Publisher: Bambang Karsono,
Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Editor in Chief: Hermawan Sulisty, Puskamnas UBJ

Reviewer: Hermawan Sulisty, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia.
Bilveer Singh, Universitas Nasional Singapura, Singapura.
Marcus Priyo Gunarto, Universitas Gadjah Mada, Indonesia.
Hapzi Ali, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia.
Chryshnanda Dwilaksana, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK), Indonesia
Ikrar Nusa Bhakti, Lemhannas RI, Indonesia
Jun Honna, College of International Relations, Ritsumeikan University, Jepang.
Adriana Elisabeth, Universitas Pelita Harapan, Indonesia
Al Araf, Universitas Brawijaya Malang, Indonesia
Hizkia Yasias Polimpung, Monash University Malaysia, Malaysia
Kusnanto Anggoro, Universitas Pertahanan, Indonesia
Muhamd Haripin, Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP BRIN), Indonesia

Editor: Muhamad Lukman Arifianto
Ali Asghar
Prasojo
Indah Pangestu Amaritasari

Administrasi: Sumarno
Ika Prabandini Arianingsih

Address: Puskamnas, GRHA Summarecon Lt. 3
Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara, Jawa Barat 17121;
Email: puskamnas@ubharajaya.ac.id

Website <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/index>

Jurnal Keamanan Nasional diterbitkan oleh Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Volume X, Nomor 2, Desember 2024

JURNAL KEAMANAN NASIONAL

ISSN: 2442-7985 (Print)
ISSN: 2579-7727 (Online)

Akreditasi: SK Menteri Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 200/M/KPT/2020, tanggal 23 Desember 2020.

Keamanan dari Represi dan Penyelesaian Tindak Pidana Berat HAM: Studi Komparatif Argentina, Kamboja dan Yunani Indah Pangestu Amaritasari.....	149–176
Peramalan Kebijakan untuk Pencegahan Terorisme: Pendekatan Pemolisian Demokratis di Era Digital Djuni Thamrin; Slamet Urip Widodo.....	177–204
Strategi dan Peluang Indonesia dalam Kerja Sama BRICS untuk Memperkuat Keamanan Ekonomi Nasional Muslim; Diah Ayu Permatasari	205–234
Faktor Penentu Ketahanan Ekonomi UMKM Jakarta dalam Menembus Pasar Global Elisabeth Ratu Rante Allo; Ruslan Prijadi; Chotib.....	235–262
Pendekatan Kebudayaan dalam Membangun Ketahanan dan Keamanan Insani: Sebuah Kajian Strategis Sugeng; Diana Fitriana; Widya Romasindah Aidy	263–294
Indeks	294.1–294.4

Keamanan dari Represi dan Penyelesaian Tindak Pidana Berat HAM: Studi Komparatif Argentina, Kamboja dan Yunani

Security from Repression and the Resolution of Gross Human Rights Violations: A Comparative Study of Argentina, Cambodia, and Greece

Indah Pangestu Amaritasari

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: indah.pangestu@dsn.ubarajaya.ac.id

Article Info

Received: November 11, 2024

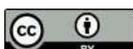
Revised: December 1, 2024

Accepted: December 6, 2024

Abstract: *Human rights are often considered obstacles to realizing security in a country, especially when there are demands to resolve past serious human rights crimes. The purpose of this study is to provide an objective empirical foundation at the practice and policy levels regarding the closure of past serious human rights crimes and their contribution to the realization of security, specifically related to repression, through a comparative study of Argentina, Cambodia, and Greece – countries representing the continents of the Americas, Asia, and Europe. Repression in a country impacts security in terms of national stability, public trust, potential radicalization, international reputation, and economic consequences. The process of addressing past gross human rights violations in these countries offers valuable lessons for Indonesia in resolving its own historical human rights issues. The findings of this study indicate that countries that effectively resolve past gross human rights violations and gain international attention and support experience a reduction in repression, positively impacting security, as seen in the cases of Greece and Argentina.*

Keywords: *Human Rights, Repression, National Stability, Resolution of Gross Human Rights Violations, National Stability*

Abstrak: *Hak asasi manusia seringkali dianggap menjadi penghalang bagi terwujudnya keamanan di suatu negara khususnya ketika terjadi tuntutan terhadap penyelesaian tindak pidana berat HAM masa lalu. Tujuan dari*



penelitian ini adalah untuk memberikan landasan empirik objektif pada tingkat praktik dan kebijakan mengenai penyelesaian tindak pidana berat hak asasi manusia yang berkontribusi kepada terwujudnya keamanan di suatu negara khususnya terkait represi melalui studi komparatif antara Argentina, Kamboja, dan Yunani yang mewakili benua Amerika, Asia, dan Eropa. Represi di suatu negara berkontribusi kepada keamanan pada konteks stabilitas nasional, kepercayaan publik, potensi radikalisasi, reputasi internasional dan dampak ekonomi. Proses penyelesaian tindak pidana berat HAM masa lalu di negara-negara ini dapat menjadi pembelajaran yang dapat diambil oleh Indonesia dalam menyelesaikan tindak pidana berat HAM masa lalu. Temuan yang dihasilkan dalam kajian ini adalah bahwa negara-negara yang menyelesaikan tindak pidana berat HAM masa lalu dengan tepat dan mendapatkan perhatian dan dukungan internasional dapat mengurangi represi di negara tersebut yang berkontribusi kepada keamanan yang dimaksud seperti di Yunani dan Argentina.

Kata kunci: *Hak Asasi Manusia, Represi, Stabilitas Nasional, Penyelesaian Tindak Pidana Berat HAM, Stabilitas Nasional*

Pendahuluan

Represi di suatu negara merujuk pada tindakan pemerintah yang membatasi kebebasan individu dan kelompok, sering kali melalui penggunaan kekuatan atau kebijakan yang menindas. Fenomena ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk penahanan sewenang-wenang, pembatasan kebebasan berbicara, dan pengawasan yang ketat terhadap masyarakat. Terjadinya represi biasanya dipicu oleh faktor-faktor seperti ketidakstabilan politik, ancaman terhadap kekuasaan pemerintah, atau upaya untuk menanggulangi protes sosial. Lebih tepatnya, ketika respons terhadap ancaman dan/atau gangguan keamanan tidak proporsional, maka seringkali represi menjadi jalan yang sering diambil oleh negara.

Sebagian besar negara-negara di dunia telah berjuang keras untuk membangun lembaga-lembaga demokrasi dan melindungi hak-hak individu sejak mereka merdeka. Buruknya demokrasi di suatu negara cenderung mengakibatkan pola pelanggaran hak asasi manusia yang terus-menerus. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa tindak pidana berat HAM tidak hanya marak terjadi di negara-negara yang tidak memiliki tradisi demokrasi, tetapi banyak pula terjadi di negara-negara yang telah maju demokrasinya.

Istilah tindak pidana berat HAM adalah tindak pidana yang pada konteks internasional, terdiri dari: (1) kejahatan genosida; (2) kejahatan

kemanusiaan; (3) kejahatan perang; dan (4) kejahatan agresi.¹ Sementara pada konteks Indonesia, yang menjadi tindak pidana berat HAM adalah kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan.²

Peristiwa kelam praktik-praktik pelanggaran HAM berat masih banyak terjadi di berbagai penjuru dunia yang meninggalkan penderitaan dan luka mendalam bagi ribuan bahkan jutaan orang di dunia. Beberapa contoh negara yang pernah mengalami sejarah kelam pelanggaran HAM berat, pada periode 1970-an seperti di negara Amerika Latin, yaitu: Argentina selama rezim militer junta periode (1976-1983), Chili pada masa pemerintahan Augusta Pinochet (1973-1990), di Guatemala selama 36 tahun perang saudaranya terutama masa pemerintahan Montt, di Asia contohnya di Kamboja dengan rezim pemerintahan Pol Pot, dan di negara Uni Eropa seperti Yunani pada periode pemerintahan Georgios Papadopoulos. Peristiwa tindak pidana berat HAM yang terjadi di negara-negara tersebut ditunjukkan dengan adanya keterlibatan pihak militer dan otoritas negara dalam melakukan tindakan kejahatan dengan dalih menjaga keamanan nasional dan melegalkan segala bentuk perbuatan mereka, yang menyebabkan banyak orang yang hilang, disiksa, ditahan sewenang-wenang, hingga dibunuh.

Negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyelesaian tindak pidana tersebut melalui pengadilan dan/atau Komisi Kebenaran dan pemulihan (*reparations*) terhadap para korban tindak pidana berat hak asasi manusia yang terjadi. Hal ini merupakan kewajiban hukum menurut hukum internasional. Prinsip 19 dari Prinsip-prinsip Terbaru PBB untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia melalui Tindakan untuk Memerangi Impunitas dalam hal ini menyatakan bahwa: “Negara-negara harus melakukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, independen, dan tidak memihak dan mengambil tindakan yang tepat terhadap para pelaku, dituntut, diadili, dan dihukum dengan sepatutnya. Permasalahannya adalah tidak semua negara memiliki kemauan dalam menyelesaikan tindak pidana berat HAM sehingga berdampak pada keamanan nasionalnya khususnya pada masa depan karena tidak ada faktor *deterrence* (penangkalan) dimana pelaku kejahatan yang biasanya adalah militer dan sektor keamanan lainnya beserta perwakilan dari negara tidak ragu menggunakan upaya represi bahkan cenderung lebih mudah yang akhirnya mengganggu pada stabilitas dan keamanan negara.”³

¹ Statuta Roma Pasal 5.

² Pasal 7 UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

³ Hunjoon Kim and Kathryn Sikkink, “Explaining the Deterrence Effect of Human Rights Prosecutions for Transitional Countries,” *International Studies Quarterly* 54, no. 4 (2010): 939–63. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2478.2010.00621.x>.

Ragam penelitian mengenai hak asasi manusia khususnya penyelesaian tindak pidana berat HAM masa lalu dan keamanan menunjukkan mengenai pentingnya penyelesaian tindak pidana berat HAM masa lalu khususnya bentuk pengadilan.⁴ Akan tetapi, masih menjadi pertanyaan mengenai perkembangan kondisi represi itu sendiri pada negara-negara yang kemudian melakukan penyelesaian tindak pidananya baik melalui pengadilan dan pemulihan korban. Inilah yang menjadi kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini yang hendak menemukan, melalui studi komparatif, negara-negara yang melakukan penyelesaian tindak pidana berat HAM masa lalu melalui jalur pengadilan dan pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan landasan empirik yang objektif pada tingkat praktik dan kebijakan. Fokus utamanya adalah penyelesaian tindak pidana berat hak asasi manusia (HAM) yang berkontribusi terhadap keamanan negara. Aspek yang dikaji secara khusus adalah kaitannya dengan represi. Pendekatan yang digunakan adalah studi komparatif di tiga negara, yaitu Argentina, Kamboja, dan Yunani, yang masing-masing mewakili benua Amerika, Asia, dan Eropa.

Metodologi

Penulisan ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan historis terhadap peristiwa-peristiwa tindak pidana berat HAM masa lalu dan terhadap upaya penyelesaian dan pemulihan (*reparations*) terhadap para korban oleh Negara yang terjadi di Argentina, Kamboja dan Yunani. Jenis penelitian dengan metode deskriptif analitis melalui studi komparatif memberikan sangat berguna dalam konteks penelitian sosial, hukum, atau kebijakan di mana analisis perbandingan memberikan wawasan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Penulisan ini dilakukan melalui *deskstudy* untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dengan menggunakan data sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal, laporan-laporan dan informasi-serta artikel-artikel terkait lainnya sebagai data *secondary resources*. Sumber data ini berasal dari literatur Indonesia dan luar negeri yang masuk dalam kategori hak asasi manusia, keamanan dan hukum. Validitas dan reliabilitas data sekunder dilakukan dengan cara: (1) mengevaluasi sumber data; (2) memeriksa metodologi pengumpulan data; (3) menganalisis konsistensi data; (4) memastikan validitas data; dan (5) menjamin reliabilitas melalui reproduksibilitas dan dokumentasi lengkap.⁵

⁴ Ibid.

⁵ Alan Bryman, *Social Research Methods*, 5th ed. (Oxford University Press, 2016).

Upaya penyelesaian tindak pidana berat HAM masa lalu sebagai suatu tinjauan untuk keamanan dari represi yang berkontribusi terhadap perdamaian yang memiliki dampak terhadap stabilitas di antaranya stabilitas politik dan ekonomi. Hasil penelitian Kathryn Sikkink menunjukkan bahwa negara-negara yang melakukan penyelesaian tindak pidana berat HAM masa lalu menjadi lebih kurang represif.⁶ Namun demikian, disisi lain, dalam keadilan transisional, upaya penyelesaian tidak hanya pengadilan tetapi juga pemulihan bagi korban yang merupakan satu paket dalam penyelesaian tindak pidana berat HAM masa lalu.⁷ Penelitian ini ingin membuktikan bahwa melakukan upaya penyelesaian yang satu kesatuan antara pengadilan dan pemulihan yang berkontribusi kepada keamanan di suatu negara khususnya terkait represi.⁸

Dalam teori spiral kekerasan (*spiral of violence theory*) terhadap tindak represi yang dilakukan negara yang berujung pada tindak pidana berat HAM masa lalu.⁹ Teori ini menyatakan bahwa represi oleh negara, seperti tindakan kekerasan atau pembatasan kebebasan, sering kali memicu respons kekerasan dari masyarakat. Represi meningkatkan ketidakpuasan publik dan cenderung memicu siklus kekerasan baru, terutama ketika masyarakat merasa hak-haknya dilanggar.¹⁰ Misalnya, tindakan represif pemerintah dapat memicu perlawanan atau radikalisasi individu atau kelompok yang merasa terancam, yang pada gilirannya mengurangi tingkat perdamaian dan stabilitas negara tersebut.

Pembahasan

Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Berat HAM Masa Lalu di Argentina, Kamboja dan Yunani

Terdapat elemen yang perlu dipertimbangkan ketika menilai keseriusan suatu tindak pidana berat HAM, antara lain: jenis hak yang dilanggar dan karakter kejahatan, jumlah korban, berulangnya pelanggaran dan perencanaannya, serta kegagalan pemerintah untuk mengambil

⁶ Kathryn Sikkink, *Membuktikan Harapan: Efektivitas Perjuangan HAM Pada Abad 21* (Jakarta: PUSAD Paramadina, 2022).

⁷ Patrick Burgess et al., *Transitional Justice Handbook* (Jakarta: Asia Justice and Rights (AJAR) and the Transitional Justice Asia Network (TJAN), 2023).

⁸ Bryman, *Social Research Methods*.

⁹ Thomas Risse, C. Stephen Ropp, and Kathryn Sikkink, *The Power of Human Rights* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999).

¹⁰ Helder Camara, *Spiral of Violence* (London: Sheed and Ward Ltd., 1971).

tindakan yang tepat terkait dengan tindak pidana yang dimaksud.¹¹ Menurut standar HAM internasional, yang diatur dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (*Rome Statute of the International Criminal Court, ICC*) ada empat kategori tindak pidana berat HAM yang diatur pada pasal 5 antara lain 1) Kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu kejahatan meluas dan sistematis yang ditujukan kepada warga sipil, yang tidak manusiawi dan menyebabkan penderitaan fisik dan mental, (antara lain pembunuhan di luar hukum; penyiksaan dan hukuman kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat; penghilangan paksa; perbudakan dan praktik serupa perbudakan; deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa; perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, pemaksaan kehamilan, pemaksaan sterilisasi, atau bentuk kekerasan seksual lain yang memiliki bobot setara; dan diskriminasi sistematis, khususnya berdasarkan ras, etnis, atau jenis kelamin, melalui aturan hukum dan kebijakan yang bertujuan mempertahankan subordinasi suatu kelompok); 2) Genosida, yaitu pembantaian brutal dan sistematis terhadap sekelompok suku bangsa dengan tujuan memusnahkan seluruh atau sebagian bangsa tersebut, (seperti: pembunuhan anggota kelompok; penyiksaan dan hukuman kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat; sengaja menciptakan kondisi hidup yang memusnahkan; mencegah kelahiran; dan memindahkan anak-anak secara paksa); 3) Kejahatan perang, yaitu pelanggaran terhadap hukum perang, baik oleh militer maupun sipil, (seperti menyerang warga sipil dan tenaga medis; perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, pemaksaan kehamilan, pemaksaan sterilisasi, atau bentuk kekerasan seksual lain yang memiliki bobot yang setara; menyerang pihak yang telah mengibarkan bendera putih tanda menyerah); dan 4) Agresi, yaitu perilaku yang bertujuan menyebabkan bahaya atau kesakitan terhadap target serangan.

Praktik-praktik penyiksaan, penghilangan orang, penahanan sewenang-wenang dan bahkan pembunuhan yang merupakan karakteristik pelanggaran berat HAM banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dan penyiksaan adalah metode yang lebih disukai untuk menghancurkan seorang musuh yang didefinisikan sebagai suatu penyangkalan jati diri. Penyiksaan bukan tentang mencari informasi, tetapi tentang menghancurkan pikiran dan membongkar kemampuan bersosialisasi yang dimiliki oleh seseorang melalui traumatisasi jiwa yang harus hilang selamanya karena penyiksaan dimaksudkan untuk

¹¹ Cecilia Medina Quiroga, *The Battle of Human Rights: Gross, Systematic Violations and The Inter-American System* 11 (1988). Lihat pula M. E. Tardu, *United Nations Response to Gross Violations of Human Rights: The 1503 Procedure*, Santa Clara L. Rev. 559, 582-84 (1980).

membunuh ide-ide bukan ideologi. Tujuannya adalah untuk menjamin suatu dunia di mana individu akan berhubungan dengan aktivitas politik di masa depan dengan pengalaman rasa sakit yang luar biasa saat disiksa.¹²

Negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyelesaian dan pemulihan (*reparations*) terhadap para korban tindak pidana berat hak asasi manusia yang terjadi dan merupakan kewajiban hukum menurut hukum internasional. Menurut instrumen hak asasi manusia internasional dan/atau regional, Negara memiliki kewajiban negatif yaitu, untuk tidak mengganggu pemenuhan hak yang sah (misalnya untuk menghormati hak yang tidak dapat dikurangi dari semua orang untuk tidak dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang); dan kewajiban positif, yaitu melindungi hak dari campur tangan orang lain (misalnya untuk mengambil tindakan legislatif, administratif, yudisial, edukatif, dan tindakan lain yang diperlukan untuk menjamin pemenuhan hak untuk hidup oleh semua orang dalam yurisdiksi Negara).¹³

Menurut Stanley Cohen bahwa setelah runtuhnya rezim otoriter atau kediktatoran, salah satu langkah pertama yang perlu diambil oleh pemerintah yang baru terpilih adalah menangani kekejaman rezim sebelumnya. Pertama-tama, cara menghadapi kejahatan pemerintah sebelumnya, cara membongkar perangkat penindasan yang digunakan oleh negara, dan cara menciptakan atau memulihkan supremasi hukum, demokrasi, dan masyarakat sipil. Dalam menangani kekejaman masa lalu itulah berbagai perangkat keadilan transisi digunakan, dan memberikan bantuan dalam memahami cara memenuhi kebutuhan para korban dan keluarga mereka.¹⁴ Seperti yang pernah dikatakan Nelson Mandela, "Ketika semua negara ini pulih dari trauma dan luka masa lalu, mereka harus merancang mekanisme tidak hanya untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, tetapi juga untuk memastikan bahwa martabat para korban, penyintas, dan kerabat dipulihkan." Pada konteks Argentina, Kamboja, dan Yunani penerapan model spiral teori menjelaskan bagaimana perubahan dalam kebijakan HAM dapat terjadi melalui interaksi antara tekanan domestik dan internasional. Berikut adalah analisis penerapan model ini pada Argentina, Kamboja, dan Yunani:¹⁵

¹² Silvia Borzutzky, "The Politics of Impunity: The Cold War, State Terror, Trauma, Trials and Reparations in Argentina and Chile", *Latin American Research Review* (2007)

¹³ International Commission of Jurists "Achieving Justice for Gross Human Rights Violations in Cambodia - A Baseline Study ICJ Global Redress and Accountability Initiative," (Geneva, Switzerland, International Commission of Jurists, 2017).

¹⁴ Stanley Cohen, "State Crimes of Previous Regimes: Knowledge, Accountability, and the Policing of the Past," *Law & Social Inquiry* 20, no. 1 (1995): 7-50.

¹⁵ Kathryn Sikkink, *Membuktikan Harapan: Efektivitas Perjuangan HAM Pada Abad 21*.

1. Argentina: Di Argentina, model spiral terlihat dalam transisi dari rezim otoriter ke demokrasi, di mana tekanan dari dalam negeri oleh kelompok HAM dan masyarakat sipil, serta tekanan internasional, berkontribusi pada penuntutan pelanggaran HAM masa lalu. Pengadilan terhadap pelaku “Perang Kotor” menunjukkan bagaimana tekanan domestik dan internasional dapat bekerja sama untuk mendorong akuntabilitas dan reformasi.
2. Kamboja: Di Kamboja, model spiral tidak berfungsi seefektif di Argentina. Meskipun ada pengadilan untuk pelanggaran HAM masa lalu, kurangnya tekanan internasional yang memadai pada saat pelanggaran terjadi, serta isolasi negara tersebut, menghambat penerapan model ini. Sistem HAM internasional pada saat itu tidak memberikan respons yang memadai, dan Kamboja hampir luput dari perhatian internasional, sehingga mengurangi efektivitas tekanan internasional.
3. Yunani: Yunani menunjukkan penerapan model spiral yang lebih efektif. Setelah transisi dari rezim militer ke demokrasi, tekanan internasional dari sistem HAM Eropa dan organisasi internasional membantu mendorong perubahan. Laporan dari Amnesty International dan gugatan dari negara-negara Skandinavia memberikan tekanan signifikan yang berkontribusi pada pengurangan represi dan transisi ke demokrasi. Secara keseluruhan, model spiral menunjukkan bahwa kombinasi tekanan domestik dan internasional dapat efektif dalam mendorong perubahan kebijakan HAM, meskipun efektivitasnya dapat bervariasi tergantung pada konteks dan respons dari komunitas internasional yang mendorong proses penyelesaian dengan pengadilan dan pemulihan.

Pemulihan dari kata kerja *to repair* dan kata *reparation* adalah tindakan mengembalikan sesuatu ke kondisi sebelumnya, untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan, kompensasi, penebusan dosa, restitusi. Program pemulihan (*reparations*) awal mencakup pensiun, kesehatan, pelatihan ulang dan tunjangan pendidikan, dan terkadang tunjangan perumahan.¹⁶ Pemulihan (*Reparation*) juga termasuk langkah-langkah di luar penggantian uang, tetapi dapat mencakup rehabilitasi, permintaan maaf kepada publik, penggantian properti, yang sesuai dengan tingkat

(Jakarta: PUSAD Paramadina, 2022).

¹⁶ Silvia Borzutzky, “The Politics of Impunity: The Cold War, State Terror, Trauma, Trials and Reparations in Argentina and Chile,” *Latin American Research Review* 42, no. 1 (2007): 112–36.

kerusakan.¹⁷ Menurut Borzutzky ada perdebatan mengenai tujuan pemulihan (*reparations*), diantaranya adalah apakah untuk mencapai keadilan atau mencegah pemerintah kembali melakukan kekejaman yang sama, apakah pemulihan merupakan bentuk keadilan dan pencegahan yang efektif, dan bagaimana dampaknya terhadap korban, apakah hanya sebagai “penutupan” politik. Namun, ada hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa tidak ada nilai moneter yang dapat menggantikan kehilangan orang yang dicintai, ataupun untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh penyiksaan. Meskipun demikian, bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan, pemulihan (*reparations*) dapat membuat perbedaan dengan adanya akses seperti kesehatan, makanan, atau pendidikan. Hal krusial untuk ditekankan bahwa pemulihan (*reparations*) tidak boleh berfungsi sebagai pengganti untuk mencari kebenaran dan mendapatkan keadilan, dan tidak boleh pula menjadi bentuk impunitas lainnya.¹⁸

Dalam konteks keadilan transisi, penting untuk diingat bahwa, meskipun komisi kebenaran atau mekanisme serupa merupakan aspek penting dari hak atas kebenaran (sebagai elemen reparasi bagi korban), keduanya harus digunakan bersamaan dengan penyelidikan fakta yang dilakukan dengan tujuan untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran berat hak asasi manusia¹⁹ Keberadaan komisi kebenaran pun tidak dapat digunakan untuk menggantikan proses mengadili karena Komisi Kebenaran tidak memiliki kapasitas dan kewenangan material menghukum.²⁰ Kewajiban untuk menyelidiki dan meminta pertanggungjawaban pelaku mengharuskan agar penyelidikan dilakukan oleh otoritas investigasi yang independen dan tidak memihak: independen dari mereka yang diduga terlibat, termasuk dari lembaga yang dituduh; dan tidak memihak, bertindak tanpa prasangka, bias, atau diskriminasi.²¹ Misalnya, penyelidikan terhadap tuduhan yang dibuat terhadap pasukan keamanan dan militer harus dilakukan oleh komisi

¹⁷ H. Victor Conde, “A Handbook of International Human Rights Terminology”, Second Edition, University of Nebraska Press, 2004.

¹⁸ Silvia Borzutzky, “The Politics of Impunity: The Cold War, State Terror, Trauma, Trials and Reparations in Argentina and Chile”, *Latin American Research Review* 42, No. 1 (2017): 112-36

¹⁹ International Commission of Jurists (ICJ), *Op.Cit.*, hlm 24

²⁰ Hunjoon Kim and Kathryn Sikkink, “Explaining the Deterrence Effect of Human Rights Prosecutions for Transitional Countries,” *International Studies Quarterly* 54, no. 4 (December 2010): 939–63. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2478.2010.00621.x>.

²¹ Dalam konteks investigasi pembunuhan di luar hukum, misalnya, lihat ICJ, *Practitioners Guide No 9: Enforced Disappearance and Extrajudicial Execution – Investigation and Sanction* (2015), hlm. 134-138. Lihat juga *Practitioners Guide No 7*, di atas catatan 131, khususnya Bab V

penyelidikan independen, yang terdiri dari anggota yang independen dari lembaga, badan, atau orang mana pun yang mungkin menjadi subjek penyelidikan.²² Selain itu, penyelidikan harus dilakukan secara menyeluruh dan efektif, serta memerlukan kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk diberikan kepada otoritas investigasi.

Berikut analisa tentang peristiwa tindak pidana berat HAM yang terjadi di Argentina, Kamboja dan Yunani, dan upaya-upaya dalam penyelesaian dan pemulihannya mewakili negara-negara pada benuanya masing-masing.

1. Argentina

a). Peristiwa dan karakteristik tindak pidana berat HAM

Argentina, setelah memperoleh kemerdekaan dari Spanyol pada tahun 1816 dan hingga awal tahun 1900-an, merupakan pemerintahan oligarki di bawah kepemimpinan Julio Roca. Pada tahun 1943 pemerintahan Roca berakhir melalui kudeta yang dilakukan oleh Peron dan para perwira nasionalis dan otoriter untuk mengambil alih kekuasaan. Perón terpilih sebagai presiden pada tahun 1946 dan dimulainya pemerintahan model korporatis. Pemerintahan Peronis adalah pemerintahan demokrasi, namun masih menggunakan praktik-praktik semi-otoriter, seperti membatasi kebebasan berekspresi, berkumpul dan melakukan aksi mogok, serta mengendalikan lembaga peradilan. Pada tahun 1955, Perón digulingkan oleh kudeta militer dan diasingkan. Selama periode 1955 hingga 1973 semua bentuk Peronisme dilarang, dan berlaku demokrasi terbatas di Argentina.²³ Perón meninggal pada tahun 1974 di tengah gelombang kekerasan antara faksi sayap kanan dan sayap kiri pendukung Peronis dan istrinya, Isabel Perón, yang menjabat wakil presiden kemudian menggantikannya.²⁴

Setelah kematian Perón, pada tanggal 24 Maret 1976, militer Argentina menggulingkan pemerintahan Isabel Perón melalui operasi

²² Misalnya, lihat: Komite Hak Asasi Manusia, Kesimpulan: Sri Lanka, Dokumen PBB CCPR/C/79/Add.56 (1995), paragraf 15; dan Manual PBB yang Direvisi tentang Pencegahan dan Investigasi Efektif atas Eksekusi Ekstra-Legal, Sewenang-wenang, dan Ringkasan (PBB, 2016) - Protokol Minnesota, Prinsip 11.

²³ Andres Levinson. "The Dirty War." *Lecture Human Rights in Argentina* class lecture, USF Tampa. Buenos Aires (2011)

²⁴ Andreas Degaldo, "Memory and Truth in Human Rights: The Argentina Case. The Issue of Truth and Memory in the Aftermath of Gross Human Rights Violations in Argentina," graduate thesis, University of South Florida, Tampa, 2013.

Silvia Borzutzky, "The Politics of Impunity: The Cold War

militer “Operativo Independencia”²⁵ dan melaksanakan “Proses Reorganisasi Nasional” yang dikenal sebagai “El Proceso”, dengan tujuan utama untuk menata ulang sistem politik di Argentina, dimana ribuan orang hilang dan tidak pernah terlihat lagi, disebut dengan istilah “desaparecidos” oleh organisasi hak asasi manusia.²⁶ Para anggota militer yang bertindak berdasarkan Doktrin Keamanan Nasional yang disebut juga dengan istilah “Perang Kotor”, dengan membunuh semua subversif, serta kaki tangan dan simpatisan mereka. Setiap orang yang berpikir berbeda disingkirkan atau ditekan dan diteror, di antaranya termasuk pemimpin serikat pekerja, para pekerja, dan mereka dari kelas menengah ke bawah.

Komisi Nasional untuk Orang Hilang (*Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas*, CONADEP) dalam laporan tentang temuan-temuan dari hasil kerjanya berjudul *Nunca Mas*, diperkirakan ada sekitar 8.960 korban orang hilang selama periode 1976 hingga 1983 di bawah pemerintahan militer junta, namun karena banyak keluarga korban yang merasa takut untuk melapor, sehingga diperkirakan jumlah sebenarnya lebih besar dari data yang ditemukan, yaitu berkisar antara 10.000 hingga 30.000 orang. Bagan berikut ini menunjukkan penghilangan orang dilakukan dilihat dari lokasi penculikan korban:

Detenidos en su domicilio ante testigos	62,0 %
Detenidos en la vía pública	24,6 %
Detenidos en lugares de trabajo	7,0 %
Detenidos en lugares de estudio	6,0 %
Desaparecidos que fueron secuestrados en dependencias Militares, Penales, o Policiales; estando legalmente detenidos en esos establecimientos	0,4 %
Nunca Más, CONADEP	

(data diambil dari laporan CONADEP berjudul *Nunca Mas*, 1984)

Bagan 1 - Penghilangan orang secara paksa di Argentina

Dari bagan di atas, menunjukkan ada sekitar enam puluh dua persen penghilangan orang diambil dari rumah mereka sendiri; sekitar dua puluh empat persen diambil dari jalanan; ada tujuh persen diambil dari tempat kerja mereka; dan enam persen diambil dari sekolah mereka; sementara sejumlah kecil lainnya diambil saat ditahan secara sah di penahanan militer, lapas, dan kepolisian. Orang-orang yang hilang dibawa ke pusat-pusat penahanan ilegal di seluruh penjuru negeri.

Orang-orang yang diculik ini ditahan dan disiksa di tempat-tempat

²⁵ Ibid.

²⁶ David Rock, “Racking Argentina,” *New Left Review* 17 (2002): 95–113

penahanan di berbagai kota di Argentina, dan salah satu yang paling terkenal adalah ESMA (*Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada*), adalah sekolah militer yang digunakan sebagai pusat penahanan ilegal selama kediktatoran militer junta. Bangunan yang digunakan sebagai tempat penahanan berada di bagian mes perwira, yang terdiri dari tiga lantai dengan loteng. Loteng tempat tahanan para korban tersebut bahkan memiliki kamar bayi tempat para wanita hamil melahirkan.²⁷

Menurut organisasi HAM *Abuelas de la Plaza de Mayo* bahwa sebagian besar bayi-bayi yang lahir di ESMA diambil secara paksa oleh militer dan memberikan nama dan akta kelahiran palsu agar mereka tidak dapat ditemukan dan diperkirakan ada antara 200 hingga 500 bayi-bayi yang hilang selama rezim militer Junta ini.²⁸ Bayi-bayi yang diculik dan diambil paksa adalah bagian dari rencana sistematis pemerintah selama “Perang Kotor” dengan menyerahkan anak-anak tersebut untuk diadopsi oleh keluarga militer dan sekutu rezim sehingga menghentikan berkembangnya generasi subversif baru lainnya.

Kelompok yang bertanggung jawab atas penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan disebut Satgas 3.3.2 (*Grupo de Tareas*), di bawah komando langsung laksamana Emilio Eduardo Massera dengan tujuan utama menculik para subversif dan merehabilitasi mereka di ESMA, salah satu dari sekitar 500 tempat penahanan ilegal di Argentina. Rehabilitasi pada dasarnya terdiri dari indoktrinasi, yaitu “memperbaiki” atau “menyembuhkan” para korban dari penyakit mereka.²⁹ Penyiksaan adalah metode yang lebih disukai untuk menghancurkan seorang musuh dengan mengejar laki-laki dan perempuan, anak-anak dan orang dewasa, para gerilyawan dan simpatisannya, guna menghancurkan pikiran dan membongkar kemampuan bersosialisasi yang dimiliki oleh seseorang melalui trauma untuk membunuh ide-ide bukan ideologi.³⁰

Rakyat Argentina telah banyak mengalami pengambilalihan kekuasaan oleh militer, namun rezim militer junta periode tahun 1976-1983 merupakan rezim militer yang paling keji dan kejam, dengan menggunakan kekuatan aparat militer negara untuk melawan rakyat Argentina yang seharusnya mereka lindungi.

²⁷ Delgado, Andres, 2013, “Memory and Truth in Human Rights: The Argentina Case. The Issue of Truth and Memory in the Aftermath of Gross Human Rights Violations in Argentina.” USF Tampa Graduate

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

³⁰ Silvia Borzutzky, “The Politics of Impunity: The Cold War, State Terror, Trauma, Trials and Reparations in Argentina and Chile,” *Latin American Research Review* 42, no. 1 (2007): 167–85. <https://doi.org/10.1353/lar.2007.0001>.

Dalam upaya mencegah penuntutan terhadap kejahatan yang telah mereka lakukan, militer Junta telah mengesahkan undang-undang yang dikenal sebagai “Undang-Undang Perdamaian Nasional” (*Ley de Pacificación Nacional*) pada tanggal 22 September 1983. Undang-undang ini merupakan amnesti diri yang menjamin perlindungan militer dari tuntutan atas kejahatan yang dilakukan sejak 1973 hingga 1982, dan sebagai upaya terakhir mereka untuk memastikan mereka tidak dihukum atas berbagai kekejaman yang dilakukan dalam operasi mereka melawan subversi. Namun, di sini militer salah memahami peran orang tua, khususnya ibu, untuk menemukan anak-anak mereka yang hilang; Ibu-ibu ini pada akhirnya membentuk satu-satunya forum di mana penolakan terhadap kebijakan pemerintah dapat diungkapkan³¹ dan sebagai awal dari kemunculan berbagai organisasi-organisasi HAM seperti *Abuelas de la Plaza de Mayo*, *Hijos*, dan organisasi lainnya.

Pada bulan Oktober 1983 Raul Alfonsín terpilih sebagai Presiden Argentina, dan menandai lahirnya pemerintahan demokratis di negara yang pernah berada di bawah rezim militer yang represif. Meski awalnya rezim militer mendapat perlindungan dari undang-undang amnesti diri, namun dengan hilangnya lebih dari dua ratus bayi, di mana penculikan anak-anak tidak termasuk dalam amnesti umum yang diberikan kepada militer pada tahun 1989 dan 1990, sehingga hal ini kemudian digunakan sebagai alasan untuk mengadili Jenderal Jorge Rafael Videla dan Laksamana Eduardo Massera. Karena militer meremehkan ikatan ibu, para ibu dapat mengatasi trauma sosial mereka dan memperluas diri ke ruang publik, mengambil alih arena politik mereka sendiri.³²

Berdasarkan uraian di atas, maka kejahatan yang terjadi di Argentina menurut Statuta Roma 1998 dapat digolongkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) yaitu, pembunuhan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, serta penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan persekusi, dan genosida yaitu: pembunuhan anggota kelompok; penyiksaan dan hukuman kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat; sengaja menciptakan kondisi hidup yang memusnahkan; mencegah kelahiran; dan memindahkan anak-anak secara paksa.

³¹ Ibid.

³² Ibid.

b) Upaya Penyelesaian dan Pemulihan yang telah dilakukan

Sejak awal pemerintahannya, Presiden Alfonsín segera membentuk Komisi Nasional untuk Orang Hilang (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP) yang didirikan pada tanggal 16 Desember 1983, yang memiliki mandat untuk menyelidiki orang-orang yang hilang selama periode 1976-1983, mengungkapkan fakta-fakta dari yang terlibat dan lokasi jenazah para korban, dan mencabut undang-undang amnesti militer yang telah melindungi para anggota militer dari penyelidikan.

Komisi Nasional untuk Orang Hilang (CONADEP) kemudian membuat laporan dari hasil temuan-temuan yang telah lakukan dalam sebuah laporan yang berjudul *Nunca Mas*. Dalam laporan Komisi ini diperkirakan ada sekitar 8.960 korban orang hilang periode 1976 hingga 1983 selama pemerintahan militer junta, namun diperkirakan jumlah sebenarnya lebih besar dari data yang ditemukan, yaitu berkisar antara 10.000 hingga 30.000 orang. Selama periode tersebut militer Junta telah melakukan praktik sistematis penghilangan, penyiksaan, penahanan rahasia, dan pembuangan para korban ke tempat-tempat rahasia. Para korban yang hilang dibunuh, dan dengan sedikitnya informasi mengenai para korban merupakan strategi pemerintahan militer untuk mencegah para penyintas saling berkolaborasi. Praktik-praktik represif dilakukan dengan rencana dan perintah tingkat komando militer tertinggi, namun kemudian secara de facto Presiden Jenderal Reynaldo telah memerintahkan pemusnahan seluruh dokumentasi militer yang dapat membuktikan adanya tanggung jawab dalam rantai komando.³³

Dari hasil temuan dan laporan tersebut, Komisi (CONADEP) ini merekomendasikan pembentukan program pemulihan (*reparations*) bagi keluarga korban yang hilang dan melanjutkan penuntutan dan investigasi kembali terhadap orang-orang yang masih hilang, serta reformasi peradilan dan pendidikan hak asasi manusia. Hasil dari temuan dan rekomendasi dari Komisi (CONADEP) yaitu dilakukannya reformasi, penuntutan dan pemulihan di Argentina.³⁴

Bentuk reformasi yang dilakukan antara lain Presiden Alfonsín secara resmi mendukung hasil temuan CONADEP tersebut dan mengizinkan penayangan film dokumenter tentang hasil kerja Komisi, meski pihak militer menolak laporan tersebut; dan kemudian membentuk

³³ United States Institute of Peace, "Truth Commission: Argentina," accessed September 19, 2024, <http://www.usip.org>.

³⁴ Ibid

Komisi Nasional Hak atas Identitas pada tahun 1992 guna melakukan pencarian anak-anak hilang selama “Perang Kotor”; serta mereformasi konstitusi Argentina pada tahun 1994 untuk meningkatkan demokrasi dan reformasi konstitusi yang mewajibkan negara untuk mengambil langkah-langkah positif guna memastikan pemenuhan hak asasi manusia secara penuh.³⁵

Langkah berikutnya adalah dibukanya penuntutan terhadap militer Junta, dengan menggunakan laporan atas temuan-temuan yang telah dilakukan oleh CONADEP, yang sangat penting dalam persidangan tersebut, sehingga akhirnya lima jenderal diputuskan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara. Namun karena undang-undang amnesti rezim militer (dikenal dengan Undang-Undang Perdamaian Nasional, *Ley de Pacificación Nacional*) tahun 1983 masih berlaku, penuntutan lanjutan terhadap para pelaku lainnya tidak bisa diteruskan. Baru pada tahun 2003 undang-undang amnesti (*Ley de Pacificación Nacional*) tersebut akhirnya dicabut oleh pemerintah sipil Argentina, sehingga penuntutan terhadap hampir 700 orang lainnya dapat kembali digelar. Dan hasilnya hingga 2010, sekurang-kurangnya lebih dari 50 orang telah dijatuhi hukuman.³⁶

Pada tahun 2004 sebagai upaya pemulihan (*reparations*) pemerintahan transisi menyediakan kompensasi sebesar US\$3 miliar bagi para korban yang ditahan secara illegal tersebut. Sebagai syarat para korban mendapatkan kompensasi tersebut, mereka harus membuktikan bahwa mereka telah ditahan tanpa pengadilan pada periode 1976-1979, namun militer yang tidak kooperatif sehingga tidak memberikan dokumentasi-dokumentasi yang dibutuhkan untuk itu.

Berdasarkan uraian di atas maka pemerintahan transisi Argentina telah mengupayakan penyelesaian dan pemulihan (*reparations*) terhadap tindak pidana berat HAM yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya dengan melakukan penerapan mekanisme-mekanisme sebagaimana dijelaskan dalam instrumen hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional, yaitu membentuk komisi nasional, melakukan reformasi, penyelidikan, penuntutan terhadap pelaku pelanggaran HAM berat dan pemberian kompensasi kepada para korban.

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid

2. Kamboja

a) Peristiwa dan Karakteristik tindak pidana berat HAM

Pada tanggal 17 April 1975, dua minggu sebelum jatuhnya Saigon, Phnom Penh jatuh ke tangan Khmer Merah, menandai dimulainya sejarah kelam “Ladang Pembantaian.” Rezim Khmer Merah meluncurkan kampanye untuk menciptakan “sistem sosial yang bersih” yang melanggar hak asasi manusia secara besar-besaran, memaksa tiga juta orang untuk mengungsi, dan membunuh siapa pun yang dianggap mengancam tujuan rezim tersebut.

Khmer Merah atau Khmer Rouge adalah sebuah gerakan militer berideologi komunis yang memerintah Kamboja pada periode 1975 hingga 1979. Gerakan Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot memegang tampuk kekuasaan di Kamboja setelah menang dalam Perang Gerilya. Khmer Merah diperkirakan didirikan pada 1967, sebagai golongan militer dari Partai Komunis Kamboja/Kampuchea. Kekuasaan Khmer Merah atas Kamboja akhirnya digulingkan pada 1979, setelah mendapat serangan dari pasukan Vietnam. Berdirinya Khmer Merah Gerakan Komunis Kamboja berawal dari Partai Revolusi Rakyat Khmer yang dibentuk pada 1951 di bawah naungan Viet Minh, sebuah Partai Kemerdekaan Vietnam.

Para tokoh komunis Kamboja, yang memiliki latar belakang pendidikan di Perancis, kemudian menamainya dengan Partai Komunis Kampuchea. Di awal berdirinya tersebut, Partai Komunis Kampuchea terlibat dalam gerakan melawan pemerintahan Kamboja yang dipimpin oleh Pangeran Norodom Sihanouk. Partai Komunis Kampuchea melakukan perlawanan terhadap pemerintah Kamboja dengan cara bergerilya. Namun, perlawanan itu hanya membuat sedikit kemajuan dalam perang melawan Norodom Sihanouk.

Pemerintahan Norodom Sihanouk akhirnya digulingkan oleh militer sayap kanan pada tahun 1970. Setelah itu, Gerakan Komunis Kamboja, yang diwakili Khmer Merah, berbalik mendukung Norodom Sihanouk setelah digulingkan. Selain itu, Amerika Serikat juga terlibat dalam konflik politik di Kamboja dengan melakukan pengeboman besar-besaran. Pihak yang menggulingkan Norodom Sihanouk, Lon Nol, kemudian mendirikan Republik Khmer, yang pro terhadap Amerika Serikat. Hal itu berakibat pada perang saudara Kamboja yang akhirnya dimenangkan oleh Khmer Merah. Khmer Merah menguasai Phnom Penh dan pemerintah Kamboja digulingkan pada 17 April 1975. Pemimpin militer Khmer Merah, Pol Pot, kemudian diangkat menjadi kepala pemerintahan yang baru.

Setelah berhasil menguasai Kamboja, Khmer Merah mengganti nama

negara Kamboja menjadi Demokratik Kamboja. Setelah berkuasa, Khmer Merah mempraktikkan reformasi pemikiran, kerja paksa, kelaparan, pemukiman kembali secara paksa, kolektivisasi tanah, dan teror negara. Hal ini menyebabkan aparaturnya yang sangat tersentralisasi dan brutal, dengan kekerasan yang dinormalisasi dan disebarluaskan secara diam-diam di seluruh Kamboja. Taktik-taktik ini akhirnya memuncak dalam Genosida Kamboja yang terkenal, yang mengakibatkan kematian sedikitnya 1,5 juta orang di bawah kepemimpinan Pol Pot.³⁷

Berakhirnya pemerintahan Khmer Merah di Kamboja pada 1979 setelah penyerangan yang dilakukan oleh Vietnam pada tahun 1978. Pasukan Vietnam berusaha memasang pemerintahan boneka didukung bantuan dan ahli dari Vietnam. Khmer Merah kemudian mundur ke beberapa daerah terpencil, bahkan hingga ke Thailand dan melanjutkan gerilya. Pada 1997, pasukan Khmer Merah yang masih bergerilya mengalami kekacauan setelah Pol Pot ditangkap. Pol Pot sendiri tinggal di pedesaan Kamboja hingga 1997, ketika ia diadili atas kejahatannya terhadap negara.

Berdasarkan uraian di atas, maka kejahatan yang terjadi di Kamboja menurut Statuta Roma 1998 dapat digolongkan genosida yaitu: pembunuhan anggota kelompok; penyiksaan dan hukuman kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat; sengaja menciptakan kondisi hidup yang memusnahkan; mencegah kelahiran; dan memindahkan anak-anak secara paksa.

b) Upaya Penyelesaian dan Pemulihan (*Reparations*)

Pemerintah transisi Kamboja, pada tahun 1995 menawarkan amnesti kepada kader Khmer Merah yang bergerilya. Tahun berikutnya, Leng Sary, salah satu tokoh Khmer Merah, akhirnya menerima tawaran amnesti pemerintah Kamboja bersama dengan pasukan gerilyanya. Pada tahun 1997, Pol Pot ditangkap dan mengadili kepemimpinan Khmer Merah atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan semasa rezim pemerintahan Pol Pot berkuasa. Namun, persidangan Pol Pot hanya sebatas formalitas, dan mantan diktator ini meninggal karena sakit saat menjadi tahanan rumah di kediamannya.

Akan tetapi dunia internasional tidak mengakui pengadilan atas kejahatan genosida terhadap Pol Pot dan Leng Sary yang dilaksanakan

³⁷ Wei Azim Hung, "The Cambodian Genocide: Operationalizing Violence Through Ideology," *E-International Relations*, accessed December 1, 2024, <https://www.e-ir.info/2024/01/01/the-cambodian-genocide-operationalizing-violence-through-ideology/>.

pada 1979 tersebut. Baru pada tahun 2003 setelah disepakati “*agreement*” baru dapat dibentuk kembali *extraordinary chambers* atas asistensi PBB dan baru efektif terlaksana pada tahun 2006-2007 setelah mengalami revisi hukum ECCC.

The Extraordinary Chambers in the Court of Cambodia (ECCC) merupakan nama resmi pengadilan Kamboja yang dibentuk berdasarkan resolusi 57/228 Majelis Umum PBB pada 18 Desember 2002, yang menjelaskan bahwa telah terjadi pelanggaran serius hukum humaniter internasional selama periode pemerintahan demokratik Kampuchea atau rezim Khmer Merah pimpinan Pol Pot selama periode 1975 hingga 1979, Setidaknya, dalam periode tersebut sebanyak 1,7 juta orang diyakini telah meninggal karena kelaparan, penyiksaan, eksekusi dan kerja paksa.³⁸

Proses pembentukan ECCC berlangsung puluhan tahun disebabkan beberapa anggota tetap Dewan Keamanan PBB tidak memiliki ketertarikan pada proses ini. Cina menolak, karena memiliki hubungan dengan rezim Khmer Merah dibawah Pol Pot. Sementara Amerika Serikat juga tidak tertarik, sebab tidak mengakui Vietnam sebagai pembebas rakyat Kamboja dan menganggap Vietnam sebagai masalah. Namun ada pula sebab lain, yakni pemerintah Kamboja sendiri menunda-nunda terus pengadilan Kamboja. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, yang dulunya anggota Khmer Merah, setelah didesak pada tahun 1997 akhirnya mengalah kepada PBB, dan bersedia mengajukan teman seperjuangannya ke pengadilan HAM (ECCC) untuk mengakhiri impunitas dan menghapus masa kelam Kamboja dalam pelanggaran HAM berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan dan memberi keadilan bagi korban dan keluarganya.

Persidangan dimulai pada 2009, tetapi hanya tiga orang yang diadili, salah satunya adalah Kaing Guek Eav, komandan penjara S21, yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena kejahatan kemanusiaan. Sebagian besar pendukung Khmer Merah yang memiliki andil dalam Genosida Kamboja tetap tidak mendapatkan hukuman.

Menurut survei dengan melibatkan korban Khmer Merah, data diambil Januari-Juni 2018, ang dilakukan oleh Williams et al, bahwa 81,4% responden (termasuk mayoritas pihak sipil) tidak dapat menyebutkan satu pun proyek reparasi dan menunjukkan sedikit pengetahuan tentang proyek apa yang sebenarnya merupakan reparasi. Sementara 22,2% responden survei meyakini reparasi finansial individual adalah reparasi yang paling tepat bagi para korban saat ini, 93,9% setuju bahwa perlu untuk menyediakan reparasi simbolis, seperti tugu peringatan, layanan

³⁸ Ollenk Syamsuddin Radja, Pengadilan HAM Berat (Studi Kasus Kamboja), Kompasiana, 2017, diakses 17 September 2024, <http://www.kompasiana.com>.

kesehatan, pendidikan atau infrastruktur.. Untuk masa depan, 64,7% responden survei mengharapkan reparasi (finansial) individual dan 61,3% menyebutkan pembentukan komisi kebenaran. Keinginan lainnya termasuk referensi yang lebih umum mengenai perdamaian dan tidak terulangnya rezim Khmer Merah, keadilan dan lebih banyak penuntutan.³⁹

Sebagaimana penjelasan di atas, maka pemerintahan transisi Kamboja, telah mengupayakan penyelesaian terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh rezim Khmer Merah dengan mereformasi hukum Kamboja, membentuk peradilan ECCC dengan kerja sama dengan PBB untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM berat, meskipun keberhasilannya masih sangat minim. Namun pemerintahan Kamboja hingga kini belum membentuk Komisi Pencarian Kebenaran ataupun melakukan pemulihan (*reparations*) dengan memberikan kompensasi terhadap para korban dan keluarga korban Khmer Merah, sebagaimana disebutkan pada survei di atas yang mengkonfirmasi tidak adanya program pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam prinsip hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.

3. Yunani

a). Peristiwa dan Karakteristik tindak pidana berat HAM

Krisis politik di Yunani menyebabkan Perdana Menteri Georgios Papandreou mengundurkan diri pada tanggal 15 Juli 1965. Namun, Raja Konstantinus muda kemudian mengangkat perdana menteri dari partai Papandreou sendiri, yang menyebabkan lebih banyak lagi kerusuhan. Pada tanggal 21 April 1967 tiga perwira berpangkat rendah, Kolonel Georgios Papadopoulos, Brigadir Jenderal Stylianos Pattakos, dan Kolonel Nikolaos Makarezos melakukan kudeta dan mengambil alih pemerintahan dan berkuasa selama tujuh tahun. Pasukan militer, dipimpin Kolonel Papadopoulos menduduki beberapa wilayah strategis terpenting di Athena, lalu menangkap semua politisi penting dan Letnan Jenderal Grigorios Spandidakis, Panglima Tertinggi Angkatan Darat Yunani. Dengan alasan menjaga negara jatuh ke tangan komunis, setiap orang yang masuk dalam 10.000 nama daftar hitam militer, baik tokoh terkemuka maupun warga biasa yang merupakan golongan sayap kiri secara sistematis ditangkap, dan dikirim ke tempat penahanan atau kamp-

³⁹ Timothy Williams, Julie Bernath, Boravin Tann, dan Somaly Kum, "Justice and Reconciliation for the Victims of the Khmer Rouge: Victim Participation in Cambodia's Transitional Justice Process," report brief, 2019, diakses September 23, 2024, <http://www.boell.org>.

kamp konsentrasi di Pulau Yaros.⁴⁰ Dalam sebuah artikel dari wawancara para saksi menyebutkan lebih dari 8.000 orang ditangkap. Dari jumlah tersebut, 6.188 orang diasingkan. Sebanyak 3.500 orang lainnya kemudian dikirim ke pusat penyiksaan ESA (Polisi Militer Yunani).⁴¹

Selama pemerintahan diktatornya, Papadopoulos memimpin rezim otoriter, anti-komunis, dan ultranasionalis yang akhirnya mengakhiri monarki Yunani dan mendirikan republik, dengan dirinya sendiri sebagai presiden. Dan untuk meningkatkan kekuasaan, ia menanggukkan sekitar 11 pasal Konstitusi, dan melarang kebebasan berekspresi, dengan menerapkan aturan penyensoran ketat terhadap siaran radio, surat kabar, dan televisi, serta menjadikan banyak warga sipil sebagai informan dan mata-mata. Dalam upaya menyembunyikan kejahatan rezim militer terhadap rakyat Yunani, militer junta memulai kampanye pencitraan untuk mendongkrak popularitas mereka di kalangan masyarakat dengan pembangunan sejumlah besar fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, pabrik, stadion, dan jalan baru. Hasilnya popularitas mereka di kalangan sebagian masyarakat Yunani meningkat, namun, hal tersebut tidak cukup untuk menutupi insiden-insiden lainnya yang terjadi di berbagai daerah.⁴²

Perlawanan terhadap kekuasaan militer junta selama tujuh tahun terus berlanjut, baik dari dalam maupun luar negeri. Para politisi, cendekiawan, seniman, dan akademisi yang tinggal pengasingan, di luar negeri, bersatu untuk memberitahu kepada dunia tentang pelanggaran hak asasi manusia yang telah dilakukan oleh militer yang menerapkan kebijakan rezim kejam dengan menahan banyak penduduk. Sejak awal berbagai kalangan, baik dari elemen-elemen demokrasi maupun sayap kiri telah menentang militer junta. Pada tahun 1968, kelompok-kelompok militan seperti Gerakan Pembebasan Panhellenic, Pertahanan Demokratik, dan Persatuan Demokratik Sosialis, baik yang berada di pengasingan di luar negeri maupun di dalam negeri, telah dibentuk untuk mempromosikan pemerintahan yang demokratis.⁴³

Aksi bersenjata pertama terhadap militer junta adalah upaya pembunuhan yang gagal terhadap Georgios Papadopoulos pada tanggal 13 Agustus 1968 yang dilakukan oleh Alexandros Panagoulis, yang kemudian ditangkap dan dibawa ke markas besar Polisi Militer Yunani (EAT-ESA), di mana ia diinterogasi, dipukuli, dan disiksa. Panagoulis

⁴⁰ Ibid

⁴¹ TiMES, "Greece: Answering to History," TIME, 1976, accessed September 29, 2024, <http://www.archive.org>.

⁴² Ibid

⁴³ Ibid

akhirnya diputuskan hukuman mati namun sebelum sempat dieksekusi, rezim militer junta telah berakhir, ia kemudian dibebaskan melalui pemberian grasi.⁴⁴

Ketika militer junta akhirnya menyerah, setelah banyaknya protes dari rakyat dan dunia, junta kemudian mengadakan pemilihan umum pada tahun 1973. Kolonel Papadopoulos mengangkat Spyridon Markezinis sebagai Perdana Menteri pemerintahan transisi Yunani dan selanjutnya mengangkat dirinya sendiri sebagai Presiden Republik Yunani. Berbagai pihak berharap bahwa pemilihan umum ini akan demokratis dan tidak akan mengubah Konstitusi seperti referendum 1968. Namun pada bulan November 1973 ratusan mahasiswa dan masyarakat melakukan aksi protes dan menduduki gedung Universitas Teknik Nasional Athena dan menyerukan agar para kolonel turun dari kekuasaan. Untuk mengendalikan kerusuhan tersebut, pemerintahan transisi meminta bantuan militer, yang mengirim tank-tank militer untuk melakukan tindakan pembersihan secara brutal terhadap para demonstran di universitas ini, sehingga mengakibatkan sejumlah orang tewas.⁴⁵

Hal tersebut, menjadi kesempatan bagi kubu garis keras, Kolonel Dimitrios Ioannidis untuk menggulingkan Papadopoulos melalui kudeta pada tanggal 25 November, Ioannidis memiliki ambisi untuk menyatukan Yunani dan Siprus dengan menggulingkan Presiden Siprus, Uskup Agung Makarios, namun tiga hari kemudian Ioannidis mengundurkan diri, dan membuka jalan bagi invasi Turki ke Siprus. Selanjutnya Constantine Karamanlis kembali ke Yunani dan mendirikan pemerintahan yang demokratis.⁴⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka kejahatan yang terjadi di Yunani dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) sesuai pasal 6 Statuta Roma 1998 yaitu terjadi pembunuhan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang dan persekusi.

b) Upaya Penyelesaian dan Pemulihan (*Reparations*)

Dalam upaya penyelesaian terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan rezim militer di bawah kekuasaan Papadopoulos, pemerintahan transisi *Constantine* Karamanlis menangkap semua anggota militer junta dan membuka pengadilan massal untuk mengadili mereka. Kemudian

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Ibid

Papadopoulos, Pattakos, Makarezos, dan Ioannidis awalnya diputuskan bersalah dan dijatuhi hukuman mati karena pengkhianatan tingkat tinggi, tetapi hukuman tersebut diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup.

Pada September 1967, Denmark, Norwegia, Swedia, dan Belanda membawa perkara Yunani ke Komisi Hak Asasi Manusia Eropa. Mereka menuduh junta Yunani telah melakukan pelanggaran Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (Konvensi HAM Eropa). Junta Yunani sendiri baru mulai berkuasa pada awal tahun 1967.

Sebagaimana penjelasan di atas, maka pemerintahan Yunani, meskipun prosesnya lambat, telah mengupayakan penyelesaian dan pemulihan (*reparations*), terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya dengan melakukan penerapan mekanisme-mekanisme sebagaimana dijelaskan dalam instrumen hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional, yaitu membentuk komisi klarifikasi sejarah untuk mencari kebenaran, melakukan reformasi, penyelidikan, penuntutan terhadap pelaku pelanggaran HAM berat dan pemberian kompensasi kepada para korban.

Bentuk Keamanan dari Represi di Argentina, Kamboja dan Yunani

Represi di suatu negara dapat memiliki kontribusi yang kompleks terhadap keamanan nasional, sering kali menciptakan lebih banyak masalah daripada yang diselesaikannya. Represi negara terhadap warganya sering kali bertujuan untuk menjaga keamanan dan stabilitas, tetapi dalam banyak kasus, tindakan ini justru menciptakan lebih banyak masalah. Ketegangan sosial yang meningkat, kekerasan yang meluas, dan erosi kepercayaan publik adalah beberapa konsekuensi dari pendekatan represif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mencari pendekatan yang lebih dialogis dan humanis dalam menangani ketidakpuasan sosial untuk menciptakan keamanan yang berkelanjutan.

Penyelesaian tindak pidana berat HAM masa lalu dapat memiliki dampak signifikan terhadap keamanan nasional di negara tersebut. Ketika pelanggaran HAM masa lalu diselesaikan melalui mekanisme akuntabilitas, seperti pengadilan dan komisi kebenaran, hal ini dapat memperkuat supremasi hukum dan memperbaiki hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Ini berkontribusi pada stabilitas politik dan sosial, yang merupakan elemen penting dari keamanan nasional. Penelitian menunjukkan bahwa negara-negara yang menggunakan pengadilan untuk menuntut pelanggaran HAM mengalami penurunan tingkat depresi dibandingkan dengan negara-negara yang tidak menggunakan

pengadilan. Di Argentina, misalnya, penuntutan terhadap pelaku “Perang Kotor” membantu mengurangi tingkat represi dan memperkuat norma-norma demokrasi, yang pada gilirannya meningkatkan keamanan nasional dengan mengurangi potensi konflik internal. Sebaliknya, di Kamboja, meskipun ada upaya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, kurangnya tekanan internasional dan mekanisme penegakan yang kuat menghambat perbaikan yang signifikan dalam keamanan nasional. Hal serupa terjadi dengan Yunani.⁴⁷ Dengan demikian, penyelesaian tindak pidana berat HAM masa lalu dapat berfungsi sebagai fondasi untuk membangun keamanan nasional yang lebih kuat dengan mengurangi ketegangan sosial dan politik serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Hal yang sedikit berbeda dengan yang terjadi di Kamboja. Setelah jatuhnya rezim Khmer Merah, Kamboja mengalami perubahan politik yang signifikan. Namun, sistem HAM internasional pada saat itu tidak memberikan respons yang memadai terhadap tindak pidana berat yang terjadi, dan negara ini hampir luput dari perhatian internasional. Akibatnya pada tahun 2018, rezim berkuasa Cambodia Peoples Party (CPP) memanfaatkan represi untuk memenangkan pemilu dalam rangka mempertahankan kekuasaannya. Hal tersebut terlihat ketika dalam menghadapi pemilu tahun 2018, rezim melakukan penutupan dan penjualan paksa media independen, membubarkan partai oposisi utama Cambodia National Rescue Party (CNRP), serta membatasi hak politik dan sipil masyarakat dengan mengamandemen Konstitusi Kamboja dan UU Hukum Pidana pada awal tahun 2018.⁴⁸

Dihubungkan dengan indeks perdamaian, Global Peace Index (GPI) 2024, hanya Yunani dan Argentina yang berada pada posisi tingkat aman yang tinggi, sementara untuk Kamboja pada tingkat yang medium.⁴⁹ Dalam Indeks Perdamaian Global (GPI) 2024, Kamboja, Yunani, dan Argentina memiliki klasifikasi perdamaian yang berbeda karena faktor-faktor yang berbeda terkait dengan keamanan, konflik, dan militerisasi. GPI mengevaluasi negara-negara berdasarkan tingkat keamanan dalam negeri, keterlibatan konflik, dan militerisasi, yang berkontribusi pada skor “kedamaian” mereka secara keseluruhan. Kamboja diklasifikasikan

⁴⁷ Kathryn Sikkink, *Membuktikan Harapan: Efektivitas Perjuangan HAM Pada Abad 21*. (Jakarta: PUSAD Paramadina, 2022).

⁴⁸ Nurfadilah Arini, “Represi Untuk Memenangkan Pemilihan Umum Nasional Kamboja Tahun 2018 Dalam Rangka Mempertahankan Kekuasaan Rezim Cambodia People’s Party” (tesis, Universitas Indonesia, 2019).

⁴⁹ Institute for Economics and Peace, *Global Peace Index 2024* (Sydney: Institute for Economics and Peace, 2024)

dalam “perdamaian sedang” terutama karena tantangan sosial-politiknya, seperti stabilitas pemerintah, kebebasan sipil yang terbatas, dan tingkat keamanan yang relatif rendah. Masalah ekonomi dan pembatasan kebebasan oleh pemerintah berdampak pada peringkat kedamaiannya, sehingga menciptakan klasifikasi kelas menengah.

Sebaliknya, Yunani dan Argentina keduanya dinilai sebagai “kedamaian tinggi”. Yunani, terlepas dari tantangan ekonomi, telah menunjukkan peningkatan dalam stabilitas politik dan keamanan sosial, serta penurunan tingkat kejahatan dan penegakan hukum yang efektif, sehingga meningkatkan tingkat kedamaiannya. Argentina, terlepas dari kesengsaraan ekonominya, telah mengalami lebih sedikit kekerasan dan konflik politik daripada negara-negara dengan skor perdamaian yang lebih rendah. Stabilitas relatif ini mendukung klasifikasi “perdamaian tinggi” untuk kedua negara, yang membedakannya dari Kamboja, di mana faktor domestik dan regional lebih bergejolak.

Di Kamboja, meskipun telah ada pengadilan untuk tindak pidana berat HAM masa lalu, kondisi damai dan pengurangan represi masih sulit dicapai dibandingkan dengan Yunani dan Argentina. Salah satu alasan utamanya adalah bahwa sistem HAM internasional pada saat itu tidak memberikan respons yang memadai terhadap pelanggaran berat yang terjadi di Kamboja. Negara ini hampir luput dari perhatian internasional karena menutup perbatasannya dan melarang pengawasan, sehingga tidak ada tekanan internasional yang signifikan untuk mendorong perubahan. Selain itu, mekanisme penegakan HAM di Kamboja tidak sekuat di Yunani dan Argentina, di mana tekanan internasional dan domestik lebih efektif dalam mendorong transisi ke demokrasi dan pengurangan represi.⁵⁰

Kesimpulan

Keamanan dari represi berkontribusi kepada perdamaian ditinjau dari upaya penyelesaian tindak pidana berat HAM masa lalu jika penyelesaiannya tersebut merupakan satu paket antara pengadilan dan pemulihan serta tidak mengalami penundaan yang tidak berarti dan mendapatkan perhatian dan dukungan dari dunia internasional. Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa peristiwa dan karakteristik tindak pidana berat HAM yang terjadi di Argentina, Kamboja dan Yunani dilakukan oleh negara terutama pemerintahan rezim militer terhadap para subversif dan pemberontak

⁵⁰ Kathryn Sikkink, Op. Cit.

yang memiliki karakteristik di mana para korban mengalami pembunuhan, penyiksaan, penghilangan orang, dengan mengacu kepada Statuta Roma 1998, dapat digolongkan sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia, yaitu pasal 6 dan 7, sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) dan genosida.

Mekanisme penyelesaian dan pemulihan (*reparations*) yang merupakan tanggung jawab Negara telah dilakukan diupayakan oleh Argentina dan Yunani. Argentina membentuk komisi-komisi guna mengumpulkan bukti-bukti terjadinya pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh rezim militer dengan melakukan penerapan mekanisme-mekanisme sebagaimana dijelaskan dalam instrumen hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional, yaitu membentuk komisi klarifikasi sejarah untuk mencari kebenaran, melakukan reformasi, penyelidikan, penuntutan terhadap pelaku pelanggaran HAM berat dan pemberian kompensasi kepada para korban. Yunani awalnya menyangkal tuduhan yang dilaporkan oleh negara Uni Eropa sebagaimana dijelaskan sebelumnya namun kini sudah melakukan penuntutan terhadap para pelaku pelanggaran HAM berat, namun belum ada mekanisme pemulihan (*reparations*) untuk pemenuhan hak ekosob para korban. Akan tetapi, Kamboja meskipun sudah bekerja sama dengan PBB untuk penuntutan para pelaku pelanggaran HAM, namun belum melakukan mekanisme pemulihan (*reparation*) sebagaimana diamanatkan Konvensi Hak Asasi Manusia dan hukum humaniter, dan pemerintah.

Temuan penelitian ini dapat memberikan refleksi bagi Indonesia dalam menyelesaikan tindak pidana berat HAM masa lalu. Pentingnya penyelesaian tersebut berkontribusi kepada keamanan nasional khususnya terkait represi di mana bentuk penuntutan dan/atau pengadilan perlu menjadi satu kesatuan dengan pemulihan. Perlu ada penelitian lanjutan untuk meninjau pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana berat HAM masa lalu untuk dapat berkontribusi kepada keamanan nasional.

Daftar Pustaka

- Arini, Nurfadilah. "Represi Untuk Memenangkan Pemilihan Umum Nasional Kamboja Tahun 2018 Dalam Rangka Mempertahankan Kekuasaan Rezim Cambodia People's Party." Master's thesis, Universitas Indonesia, 2019.
- Borzutzky, Silvia. "The Politics of Impunity: The Cold War, State Terror, Trauma, Trials and Reparations in Argentina and Chile." *Latin American Research Review* 42, no. 1 (2007): 112-36.

- Bryman, Alan. *Social Research Methods*. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2016.
- Burgess, Patrick, et al. *Transitional Justice Handbook*. Jakarta: Asia Justice and Rights (AJAR) and the Transitional Justice Asia Network (TJAN), 2023.
- Camara, Helder. *Spiral of Violence*. London: Sheed and Ward Ltd., 1971.
- Cohen, Stanley. "State Crimes of Previous Regimes: Knowledge, Accountability, and the Policing of the Past." *Law & Social Inquiry* 20, no. 1 (1995): 7–50.
- Conde, H. Victor. *A Handbook of International Human Rights Terminology*. 2nd ed. Lincoln: University of Nebraska Press, 2004.
- Delgado, Andreas. "Memory and Truth in Human Rights: The Argentina Case. The Issue of Truth and Memory in the Aftermath of Gross Human Rights Violations in Argentina." Master's thesis, University of South Florida, Tampa, 2013.
- Hung, Wei Azim. "The Cambodian Genocide: Operationalizing Violence Through Ideology." *E-International Relations*. Accessed December 1, 2024. <https://www.e-ir.info/2024/01/01/the-cambodian-genocide-operationalizing-violence-through-ideology/>.
- Institute for Economics and Peace. *Global Peace Index 2024*. Sydney: Institute for Economics and Peace, 2024.
- International Commission of Jurists (ICJ). *Practitioners Guide No. 9: Enforced Disappearance and Extrajudicial Execution – Investigation and Sanction*. Geneva: ICJ, 2015.
- International Commission of Jurists. *Achieving Justice for Gross Human Rights Violations in Cambodia - A Baseline Study*. Geneva: International Commission of Jurists, 2017.
- Kim, Hunjoon., and Kathryn Sikkink. "Explaining the Deterrence Effect of Human Rights Prosecutions for Transitional Countries." *International Studies Quarterly* 54, no. 4 (December 2010): 939–63. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2478.2010.00621.x>.
- Levinson, Andres. "The Dirty War." Lecture, *Human Rights in Argentina* class, USF Tampa, Buenos Aires, 2011. Kim, Hunjoon, and Kathryn Sikkink. "Explaining the Deterrence Effect of Human Rights Prosecutions for Transitional Countries." *International Studies Quarterly* 54, no. 4 (2010): 939–63. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2478.2010.00621.x>.
- Quiroga., Cecilia Medina. *The Battle of Human Rights: Gross, Systematic Violations and the Inter-American System*. 11. 1988.

- Radja, Ollenk Syamsuddin. *Pengadilan HAM Berat (Studi Kasus Kamboja)*. Kompasiana, 2017. Accessed September 17, 2024. <http://www.kompasiana.com>.
- Risse, Thomas, C. Stephen Ropp, and Kathryn Sikkink. *The Power of Human Rights*. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
- Rock, David. "Racking Argentina." *New Left Review* 17 (2002): 95–113.
- Sikkink, Kathryn. *Membuktikan Harapan: Efektivitas Perjuangan HAM Pada Abad 21*. Jakarta: PUSAD Paramadina, 2022.
- Tardu, M. E. *United Nations Response to Gross Violations of Human Rights: The 1503 Procedure*. *Santa Clara Law Review* 559, 582–84 (1980).
- United Nations. *Manual on the Effective Prevention and Investigation of Extralegal, Arbitrary and Summary Executions (Minnesota Protocol)*. New York: United Nations, 2016.
- United States Institute of Peace. "Truth Commission: Argentina." Accessed September 19, 2024. <http://www.usip.org>.
- Williams, Timothy, Julie Bernath, Boravin Tann, and Somaly Kum. "Justice and Reconciliation for the Victims of the Khmer Rouge: Victim Participation in Cambodia's Transitional Justice Process." Report brief, 2019. Accessed September 23, 2024. <http://www.boell.org>.

Peramalan Kebijakan Untuk Pencegahan Terorisme: Pendekatan Pemolisian Demokratis di Era Digital

Policy Forecasting for Terrorism Prevention: A Democratic Policing Approach in the Digital Era

Djuni Thamrin¹; Slamet Urip Widodo²

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Program Doktor Ilmu Kepolisian STIK/PTIK

Email: ¹Djuni.thamrin@dsn.ubharajaya.ac.id

²uripw90@gmail.com

Article Info

Received: December 4, 2024

Revised: December 12, 2024

Accepted: December 12, 2024

Abstract: *This study discussed the policies of forecasting terrorism prevention in Indonesia through a democratic policing approach within the framework of state security. The discussion of the forecasting study uses a descriptive qualitative approach. The interview method with terrorist prisoners as primary data is then deepened by literature review, and observation as secondary data. The results of this study state that the future of terrorism continues to grow. Forecasting policies in the next 10 years are needed to respond to these problems by (1) in terms of countering terrorism propaganda, the responses needed are building partnerships with the private sector, strengthening virtual police, empowering communities and local intelligence; (2) in terms of overcoming terrorist recruitment, community policing responses are carried out, strengthening financial intelligence, and improving community welfare; and (3) in terms of preventing terrorist actions, the responses needed are overcoming community divisions, conflict resolution in the regions, and strengthening counter-discourse and humanization programs.*

Keywords: *State Security, Forecasting Policy, Terrorism Prevention, Social Conflict, Democratic Policing*

Abstrak: *Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan peramalan penanggulangan terorisme di Indonesia melalui pendekatan democratic policing dalam kerangka keamanan negara. Pembahasan kajian ini menggunakan*



pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengoptimalkan wawancara mendalam dengan para narapidana teroris sebagai data primer, kemudian diperdalam dengan telaah pustaka, dan observasi sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa masa depan terorisme terus berkembang. Kebijakan peramalan dalam 10 tahun ke depan diperlukan untuk merespon permasalahan terorisme dengan cara: (1) dalam hal penanggulangan propaganda terorisme, respon yang diperlukan adalah membangun kemitraan dengan pihak swasta, penguatan virtual police, pemberdayaan masyarakat dan intelijen daerah; (2) dalam hal penanggulangan rekrutmen teroris, diperlukan respon community policing, penguatan intelijen pemantauan keuangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan (3) dalam hal penanggulangan aksi teroris, respon yang diperlukan adalah mengatasi perpecahan masyarakat, penyelesaian konflik di daerah, dan penguatan program kontra wacana melalui pendekatan humanisasi.

Kata kunci: *Keamanan Negara, Kebijakan Forecasting, Pencegahan Terorisme, Konflik Sosial, Pemolisian Demokratis*

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menjadi tempat persemaian dan sekaligus sasaran serangan aksi terrorism dalam lima dekade yang lalu. Kondisi tersebut karena Indonesia merupakan negara yang sangat pluralistik, di mana bila terjadi distorsi dalam pengelolaan keragaman dalam kehidupan beragama, berbudaya, dan terjadi diskriminasi dalam manajemen pembangunan, maka akan muncul berbagai reaksi yang dapat mengancam keamanan nasional. Indonesia juga mempunyai pengalaman panjang dalam pergerakan perlawanan kemerdekaan maupun pergolakan dan pemberontakan lokal baik yang diwarnai dengan konflik sosial, agama dan budaya (Asgor, 2014¹; Tabrani, 2018; Karnavian dan Sulisty, 2017²; Thamrin, 2020).

Dengan pengalaman panjang tersebut di atas, Indonesia menghadapi beberapa tekanan baik dari dalam maupun luar negeri agar dapat segera menyelesaikan masalah terrorism tanpa menimbulkan korban baru yang lebih banyak dan tetap dapat menghormati prinsip HAM dalam tindakan keamanan serta tidak menimbulkan guncangan politik yang kontra produktif. Selama ini kebijakan pencegahan terhadap terrorism masih bersifat reaktif dan kurang mempertimbangkan perubahan cepat dalam lanskap ancaman terrorism.

¹ Asghar, Ali, *Menteroriskan Tuhan: Gerakan Sosial Baru* (Jakarta: Pensil-324, 2014)

² M. Tito Karnavian dan Hermawan Sulisty, *Democratic Policing* (Jakarta: Pensil-324, 2017)

Penelitian ini ingin mengajukan tesis pola penanganan terrorism di Indonesia diarahkan dengan mengimplementasikan prinsip *democratic policing* yang lebih inklusif serta berbasis pada penghormatan terhadap HAM dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan terrorism di Indonesia. Kemudian diikuti dengan peramalan terhadap kecenderungan baru dari pola propaganda, rekrutmen anggota dan strategi serangan terornya. Kerangka yang sama juga didedikasikan pada upaya membangun sistem keamanan nasional yang dinamis. Pendekatan *democratic policing* ini dikombinasikan dengan kebijakan peramalan dengan mengaplikasikan konsep Willian Dunn (2000), sehingga memungkinkan suatu prediksi yang lebih akurat dan respons yang tepat terhadap ancaman dan gerakan terrorism. Penelitian ini ingin menutup celah atas kondisi penanganan terorisme yang selama ini berbasis hanya pada kekuasaan fisik dan kekuatan pemolisian tradisional.

Pada konsep pemolisian demokratis di Indonesia mulai menemukan bentuk kongkretnya terutama dalam pelibatan masyarakat pada isu keamanan dan pemolisian. Sehingga pemaknaannya mirip dengan aplikasi pemolisian masyarakat atau aplikasi Polmas. Berbagai jenis pemolisian masyarakat pernah mewarnai praktik pemolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam praktiknya, pelibatan masyarakat ini memiliki keragaman dan intensitas yang berbeda untuk setiap praktik pemolisian di berbagai tingkatan komando kepolisian.

Dengan berkembangnya penggunaan teknologi, perubahan lingkungan strategis dan dinamika ancaman maupun perkembangan praktik kejahatan, menuntut polisi bekerja lebih ketat dan intensif. Terutama polisi makin dituntut dapat menggunakan basis data terpadu, pendekatan keilmuan dan pemanfaatan teknologi. Lingkungan strategis membuat pendekatan pemolisian masyarakat dipandang sudah terlalu uzur. Apalagi, kejahatan modern saat ini telah banyak menggunakan perangkat teknologi canggih, melibatkan jaringan internasional, bersandar pada ideologi-ideologi yang makin mudah mengorbankan orang banyak hingga melakukan rela melakukan aksi bom bunuh diri. Sementara itu konsep pemolisian masyarakat hanya mengedepankan pemberdayaan masyarakat yang lebih bertumpu pada penanganan pola dan modus kriminal tradisional. Sisi lainnya, pemolisian masyarakat cenderung menempatkan posisi polisi sebagai unsur pendamping dalam membangun tertib sosial

Saat ini kondisi dan konsepsi tentang keamanan dan tertib sosial telah banyak berubah. Konsep dan perspektif tentang *security* telah

mengalami kemajuan signifikan. Caballero-Anthony (2004)³ misalnya, menyatakan setidaknya ada tiga perspektif tentang keamanan. Pandangan *pertama* beranggapan bahwa ruang lingkup keamanan sipil lebih luas dari pada keamanan militer (*military security*). Kedua adalah menentang perluasan ruang lingkup keamanan dan lebih cenderung konsisten dengan status quo. Kemudian pandangan ketiga bahwa keamanan lebih luas dari ancaman militer dan ancaman negara, namun juga berusaha untuk memperlancar proses pencapaian emansipasi manusia (*human emancipation*). Pandangan bahwa ruang lingkup keamanan lebih luas dari semata-mata keamanan militer sering disebut sebagai paradigma keamanan non-tradisional, dimana dalam pendekatan non-tradisional konsepsi keamanan lebih ditekankan kepada kepentingan keamanan pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actors*). Konsepsi ini menilai bahwa keamanan tidak bisa hanya diletakkan dalam perspektif kedaulatan nasional dan kekuatan militer, tetapi juga ditujukan kepada upaya menjamin keamanan warga negara atau keamanan manusianya dalam menjalankan kehidupan dan berekspresi atas peradabannya.

Dinamika Keamanan Nasional

Pasca Perang Dingin, kondisi politik dan keamanan Indonesia mengalami perubahan, salah satunya adalah bangkitnya rezim Orde Baru yang pada awalnya menjanjikan kemakmuran ekonomi kemudian berubah menjadi rezim pemerintahan yang otoriter. Pemerintahan otoriter Soeharto diwarnai oleh cara pandang yang sangat kuat dan dominan terhadap keamanan negara dalam kancah politik dan kekuasaan. Robin Luckham (dalam Sulisty, 2005)⁴ menyatakan bahwa tatanan baru yang dilembagakan Soeharto dibangun atas dasar kontrol militer terhadap negara dan kerja sama militer dan keamanan dengan Amerika Serikat. Luckham mensinyalir bahwa pada saat itu tatanan politik di Indonesia dipertahankan melalui kerangka negara yang sangat militeristik. Rezim yang berkuasa mengondisikan kekuatan sosial lainnya untuk terpinggirkan dan pergerakannya dibatasi. Doktrin Dwi Peran ABRI memperkuat posisi tersebut dengan memposisikan ABRI sebagai kekuatan pertahanan dan

³ Lihat dan bandingkan dengan Amaritasari, Indah Pangestu. Keamanan Nasional dalam Konteks Isu-isu Global Kontemporer: Sebuah Tinjauan Hubungan Internasional. Jurnal Keamanan Nasional UBJ. Vol 3, No 1., 2017.

⁴ Robin Luckham, dikutip dalam Hermawan Sulisty, *Dwifungsi ABRI: Perkembangan dan Perannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 1997)

keamanan sekaligus kekuatan sosial dan politik yang berperan dalam pembangunan nasional.

Pembangunan nasional dari sudut pandang doktrin militer tidak dapat dilepaskan dari kerangka keamanan. Namun, pasca reformasi atau tumbanganya Soeharto, perspektif keamanan negara menjadi lebih longgar, sehingga beberapa gerakan yang sempat dibungkam pada masa militerisasi Orde Baru muncul dan menguat. Salah satunya ditunjukkan dengan peristiwa bom Bali tahun 2002 pada masa pemerintahan Megawati Sukarnoputri. Rezim yang berkuasa langsung merumuskan paradigma keamanan negara baru untuk menghadapi gangguan keamanan berupa terorisme. Terorisme merupakan motif pengelolaan ideologi yang bertujuan untuk mengelola terorisme, yang merupakan bentuk yang diharapkan oleh masyarakat modern, yang bertujuan untuk menyalahgunakan kepentingan ideologi ekstremis. Globalisasi, meningkatnya demokrasi, dan berkembangnya budaya merupakan hal-hal yang ekstrem dalam industri modern. Hal tersebut tidak terjadi, antara "terorisme" dan "teroris" terjadi perubahan dan dinamika yang tidak terduga yang berdampak pada masyarakat. Clarke dan Newmans menyampaikan kepada mereka apa yang saya sampaikan atau kebijakan yang berlebihan seharusnya dilakukan dengan memberikan jaminan kesehatan yang memadai atas dana yang diterima. Situasi kriminal perspektif masa depan yang menjadi panduan masa depan terorisme dan perlindungan lingkungan sosial merupakan tindakan yang tepat untuk menghadapi terorisme.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pertimbangan bahwa pendekatan ini membuka pemahaman terhadap fenomena yang diteliti agar lebih mudah dipahami. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk melihat permasalahan yang kompleks dan holistik. Fokusnya adalah deskripsi makna, bukan generalisasi hasil penelitian. Deskripsi tersebut dapat digunakan kemudian untuk lebih jauh mengeksplorasi signifikansi permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini juga berlandaskan pada paradigma pragmatisme yang menekankan pada pengambilan keputusan yang konkret. Pragmatisme juga menjadi tema dalam penelitian ini. Yang menjadi perhatian utama dari paradigma ini adalah observasi, wawancara, dan triangulasi merupakan tindakan utama penelitian ini untuk menghubungkan peristiwa dan temuan dalam konteks budaya. Tindakan dan perilaku informan, baik berupa tindakan,

perkataan, maupun perilaku, merupakan rekaman penting untuk merekonstruksi satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Hal ini sejalan dengan proses perkembangan terorisme, khususnya dinamika jaringan teroris di Indonesia dan pengaruh jaringan ISIS secara global, yang pada akhirnya berdampak pada pengaruh kelompok sejenis hampir di seluruh dunia.

Penelitian ini menganalisis pendekatan utama yaitu pengawasan demokratis sebagai dasar dalam membangun model pencegahan terorisme dan peramalan kebijakan, khususnya terkait dengan rekrutmen anggota baru kelompok teroris, bentuk-bentuk penggalangan dana, dan bentuk-bentuk aksi teroris yang dilakukannya. Kepolisian Indonesia menggunakan pendekatan dan model ini sebagai model utama pencegahan terorisme yang sejalan atau senada dengan fenomena terorisme yang terjadi secara masif dan terus menerus. Secara khusus terdapat indikator efektivitas kebijakan pencegahan dalam merespon kelompok teroris yang menyebarkan aksinya. Model ini juga berguna bagi kepolisian untuk mencegah terorisme global dengan perkembangan teknologi komunikasi yang sebelumnya tidak ada. Penelitian ini berupaya membangun konstruk teoritis tentang bagaimana konsep pengawasan demokratis dapat dioperasionalkan untuk mencegah terorisme, khususnya terkait dengan ancaman terorisme di Indonesia.

Hasil dan Diskusi

Karakter ancaman terorisme di Indonesia mengalami perubahan tren⁵. Pentingnya memahami perubahan sifat ancaman terorisme berhubungan langsung dengan peningkatan efektivitas tindakan pencegahan. Pola serangan teroris telah berubah dibandingkan dekade sebelumnya. Sasaran teroris tidak lagi terfokus pada individu atau entitas tertentu, yang umumnya beragama Barat atau Kristen, namun sejak tahun 2010 lebih banyak menyasar aparat keamanan, khususnya polisi. Perubahan sasaran tersebut menjelaskan “kemarahan” terhadap polisi yang mampu menggagalkan rencana aksi teroris. Bahkan, banyak rekannya yang tewas dalam baku tembak dengan polisi.

Perubahan sasaran teroris yang kerap menyerang polisi memerlukan evaluasi terhadap penanganan terorisme yang sebenarnya. Penggunaan

⁵ Perubahan trend terrorism sangat jelas terlihat dari perubahan cara serangan terror yang mereka lakukan, perubahan strategi recruitment anggota baru serta jargon propaganda yang mereka jalankan. Pelaku terror misalnya, sekarang mulai melibatkan Perempuan dan anak serta keluarga batih.

kekuatan militer atau pendekatan garis keras tidak menjamin upaya melemahkan terorisme. Oleh karena itu, perlu adanya terobosan pendekatan alternatif, termasuk evaluasi terkait metodologi strategi deradikalisasi.

Belakangan ini, posisi teroris juga makin gencar menyasar Jakarta sebagai episentrum aksi teroris. Sebab, Jakarta merupakan jantung Indonesia, ibu kota tempat seluruh aktivitas masyarakat berlangsung, sekaligus tempat perputaran ekonomi dan bisnis. Jika terjadi aksi teroris di ibu kota, diharapkan media nasional dan internasional turut memberitakannya. Di sisi lain, posisi teroris di Jakarta mampu mengimbangi menurunnya kemampuan aksi teroris. Selain di Jakarta, aksi teroris juga menggemparkan Kota Surabaya. Aksi teroris di Surabaya ini menarik karena mengungkap keberadaan kelompok teroris yang tengah berkembang di Surabaya. Bahkan, pusat pergerakan teroris terbanyak selama ini berada di Jawa Tengah. Aksi teroris di Surabaya membuktikan bahwa kelompok teroris ini masih eksis⁶.

Kebijakan Peramalan terhadap bentuk baru Propaganda Terorism

Kebijakan *forecasting* yang dapat diamati dan dipraktikkan pada kasus terorisme di Indonesia, dapat dilihat dalam tiga bagian, yaitu dimensi propaganda dan promosi, dimensi recruitmen anggota baru dan dimensi serangan terornya itu sendiri.⁷ Analisis kebijakan *forecasting* selalu berorientasi pada isu masalah yang dimunculkan oleh teroris dan berorientasi pada tindakan mereka. Pada tahap analisis kebijakan, tahapan penting dalam peramalan adalah tahap perumusan masalah, kemudian diikuti oleh tahapan rekomendasi, monitoring dan evaluasi⁸. Walaupun demikian, mereka tetap mempertahankan cara-cara propaganda lama dengan menggunakan wahana pengajian umum, diskusi *one on one*, pertemuan eksklusif maupun diskusi bergerak dari rumah ke rumah.

Proyeksi propaganda kelompok teroris di Indonesia dimasa yang akan datang akan lebih mengandalkan kekuatan media sosial. Seperti

⁶ Ronald V. Clarke, "Situational Crime Prevention," *Crime and Justice* 19 (1995): 91-150..

⁷ E. Prasetyono, R. Muna, dan M. Syaltout, "Kaji Ulang Indeks Keamanan Manusia Indonesia 2013," *Ditpolkom Bappenas*. Diakses 4 November 2021. <https://bappenas.go.id>.

⁸ J. Dunn dan D. Gambetta, "Trust and Political Agency," dalam *Trust: Making and Breaking Cooperative Relations*, edisi elektronik, Department of Sociology, University of Oxford, 2000, 73-93.

saluran Facebook, Instagram, Telegram, atau WhatsApp dan akan menghindari penggunaan media massa di mana propaganda ideologi radikal atau ekstrem, di media sosial akan menggunakan situs-situs yang tidak mudah diretas oleh pemerintah termasuk oleh intelijen siber Polri, kelompok teroris akan kembali memperbanyak konten tersebut di media sosial. Hal ini terjadi berulang kali dan dilakukan dalam skala yang sangat masif.

Ancaman terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah kejahatan siber, yakni kejahatan melalui dunia maya. Format kejahatan ini telah menyebar ke seluruh pelosok dunia. Pada tahun 2024, Indonesia akan menjadi negara kedua dengan jumlah kasus kejahatan siber tertinggi setelah Ukraina (Kominfo, 10 April 2024). Selama pandemi Covid-19, kejahatan siber meningkat drastis. Aktivitas yang berkepanjangan di internet selama pandemi memungkinkan terjadinya kejahatan siber. Salah satunya digunakan untuk menyebarkan propaganda ideologi radikal. BNPT mengamati adanya peningkatan propaganda tentang terorisme dan radikalisme selama pandemi (Suara, 15 Februari 2024).

Motif dan bentuk kejahatan terorisme dengan menggunakan dunia maya akan semakin beragam dan intensif, termasuk penyebaran ideologi ekstrem maupun radikal. Sehingga dimasa mendatang upaya untuk menangkal aksi propaganda kelompok teroris adalah merumuskan kebijakan yang dapat menemukan metode dan strategi pengelolaan siber yang tepat untuk menjangkau *platform online* yang digunakan dalam masyarakat agar tidak mudah terpapar dan diintervensi oleh ideologi radikal. Patroli siber harus dapat mengidentifikasi berbagai manipulasi digital yang membawa pesan dan ideologi radikal (Vish, Bustamante, 2024). Salah satunya dengan mendistribusikan sumber daya intelijen keamanan siber di tingkat lokal agar aktivitas propaganda ideologi radikal melalui jejaring sosial lebih cepat terdeteksi. Pemerintah juga perlu memperluas kerja sama dengan pihak swasta untuk memperkuat penggunaan media sosial. Pengerasan tersebut tidak hanya berdampak pada konten, tetapi juga identifikasi wajah pengguna media sosial agar mudah dideteksi oleh polisi siber. Selain itu, propaganda berdirinya khilafah di kalangan umat Islam akan semakin marak, salah satunya didorong oleh terbukanya masyarakat industri 5.0 dan implementasi praktik demokrasi dan keterbukaan sosial. Rencana revisi UU ITE harus dirumuskan dengan jelas dan hati-hati, jika tidak maka akan menimbulkan “kekacauan sosial” akibat kegilaan informasi palsu dan penyebaran ideologi radikal di tengah masyarakat beradab yang terbuka namun gagap.⁹

⁹ Bandingkan dengan hal serupa yang sudah diidentifikasi oleh S. Klingberg

Model propaganda teroris umumnya dilakukan melalui media sosial. Tidak hanya untuk tujuan propaganda, kelompok teroris bahkan menggunakan media sosial untuk merekrut, merencanakan, dan melakukan aksi terorisme serta mengeksekusi korban, selain untuk menarik dana.¹⁰ Tahun ini, pengguna media sosial di dunia diproyeksikan mencapai 3,02 miliar orang dari total populasi dunia yang mencapai 7,8 miliar per Februari 2020.¹¹ Pertumbuhan pengguna media sosial akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Dengan kecepatan dan kekuatan media sosial tersebut, ia tidak hanya memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat tetapi juga dalam fungsi pemerintahan.¹²

Mengapa jejaring sosial sangat strategis untuk menyebarkan propaganda bagi teroris? Salah satu alasan yang cukup masuk akal diungkapkan Engesser, dkk (2017), adalah di tengah logika media yang cenderung bekerja dengan menerapkan logika baru, yakni hibridisasi, para aktor beralih ke jejaring sosial untuk menghindari media institusional dan kontrol jurnalistik¹³. Dengan cara ini, pesan propaganda yang disampaikan tidak harus mengikuti nilai-nilai jurnalistik dan seringkali lebih bersifat personal dan emosional. Dengan paradigma ini, jejaring sosial cenderung dijadikan sebagai penyebar isu-isu kepentingan kelompok tertentu yang sedang bertikai. Klausen (2015) menjelaskan bahwa proses perekrutan, propaganda dan pelaksanaan aksi teroris menggunakan jaringan sosial yang disebut dengan “teater teror”¹⁴. Hal ini terungkap dalam penelitian ini bahwa sebagian besar teroris telah menggunakan media sosial untuk melakukan aksinya. Bahkan dengan intensitas pesan yang semakin

dalam “Countering Terrorism: Digital Policing of Open-Source Intelligence and Social Media Using Artificial Intelligence.” In *Artificial Intelligence and National Security*, 101-111. Springer, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-031-06709-9_6.

¹⁰ Pooja N. Jain dan Archana S. Vaidya, “Analysis of Social Media Based on Terrorism – A Review,” *Vietnam Journal of Computer Science* 8, no. 1 (2021): 1-21, <https://doi.org/10.1142/S2196888821300015>.

¹¹ Data Reportal, “Digital 2020: Global Digital Overview,” *DataReportal*, diakses 4 November 2020, <https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview>.

¹² Pooja Jain dan Anuradha Vaidya, “Analysis of Social Media Based on Terrorism: A Review,” *Journal of Cybersecurity and Privacy* 1, no. 1 (2021): 1-14, <https://doi.org/10.1142/S2196888821300015>.

¹³ Matthias Engesser et al., “Populism and Social Media: How Politicians Spread a Fragmented Ideology,” *Information, Communication & Society* 20, no. 8 (2017): 1109-1126. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1207697>.

¹⁴ Jytte Klausen, *Tweeting the Jihad: Social Media Networks of Western Foreign Fighters in Syria and Iraq* (Studies in Conflict & Terrorism, 2015): 1-22. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2014.974948>.

emosional yang disertai gambar atau video yang pasti tidak bisa dimuat pada media massa umum.

Borau dan Wamba menghasilkan situasi yang sama di mana mereka mengungkap maraknya penggunaan media sosial oleh organisasi teroris untuk mempublikasikan ideologi dan mendaftarkan anggota atau simpatisannya.¹⁵ Di Asia Pasifik, sekitar tiga kelompok teroris juga melakukan aksi propagandanya melalui media sosial¹⁶. Fisher juga menemukan bahwa kelompok teroris menyalahgunakan media sosial untuk menampilkan keberadaan daring dan menyebarkan konten propaganda daring¹⁷. Dalam beberapa aksi terorisme yang terjadi di Eropa antara tahun 2008 hingga 2017, tampak bahwa media sosial memegang peranan penting dalam menyebarkan pesan propaganda kelompok teroris.¹⁸ Misalnya, Hutchinson dkk¹⁹ dan Greene²⁰ melakukan studi tentang propaganda ISIS. Greene menemukan bahwa pola penyebaran ideologi dan ajakan ISIS untuk melakukan aksi teroris lebih canggih dengan menggunakan media sosial. Pengaruh kejahatan ISIS telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, melalui media sosial. ribuan orang telah dengan sukarela menuju ke Suriah untuk menjadi mujahid ISIS karena didorong oleh propaganda melalui media sosial.

Di waktu mendatang, media sosial akan terus menjadi *platform* propaganda murah yang dapat dimanfaatkan kelompok teroris untuk menyebarkan ideologi radikal mereka. Namun demikian, media sosial juga memiliki rekam jejak yang positif karena dapat menjadi *platform* yang membantu militer, pertahanan, polisi, dan masyarakat dalam hal keamanan saat terjadi peristiwa teroris.²¹ Media sosial juga digunakan

¹⁵ Sebastien Borau and Samuel F. Wamba, "Social Media: The Good, the Bad, and the Ugly," *Journal of Business Research* 124 (2021): 584–596. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.10.009>.

¹⁶ Julian Droogan, Lise Waldek, and Shane Peattie, "Terrorists' Use of the Internet through the Lens of Situational Crime Prevention: Preventing Radicalisation from Cyberspace," *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism* 15, no. 1 (2020): 52–66. <https://doi.org/10.1080/18335330.2020.1719183>.

¹⁷ Ali Fisher, *Lone-Actor Terrorism: Social Networks and Digital Propaganda* (Routledge, 2019).

¹⁸ Raghav Jain and Alok Vaidya, "Role of Social Media in Propagating Terrorist Agendas," *Journal of Global Security Studies* 6, no. 3 (2021): 422–437. <https://doi.org/10.1093/jogss/ogaa047>.

¹⁹ John Hutchinson et al., *ISIS Propaganda: A Study of Its Effectiveness in Recruitment and Influence* (Palgrave Macmillan, 2017).

²⁰ Alan Greene, *The Origins of ISIS: Militant Jihad and the Internet Age* (Routledge, 2015).

²¹ Teodor Mitew, "The Rise of the Heterarchical Military: Networks, Knowledge, and Power," *Australian Defence Force Journal* 197 (2015): 15–25.

untuk memperoleh informasi mengenai bencana dari masyarakat, organisasi darurat, dan institusi akademis²².

Dan yang terpenting, jejaring sosial juga anti-teroris (Bartlett dan Miller²³, Paryanto²⁴, dan Klingberg²⁵). Dengan tersedianya data di media sosial, pengawasan kontra terorisme dapat dilakukan lebih cepat dan terukur. Kemajuan ini menunjukkan evolusi analisis media sosial yang dapat membantu intelijen keamanan siber melindungi dan mencegah tindakan terorisme. Pada platform digital, pengawasan anti terorisme dapat dilakukan dengan cara mengurangi konten teroris dari konten lain yang tidak mengandung terorisme. Penelitian terbaru yang diterbitkan oleh Kalpakis dkk²⁶ didasarkan pada analisis karakteristik tertentu dari konten terkait terorisme yang dipublikasikan di Twitter. Analisis tersebut bertujuan untuk membedakan akun Twitter terkait terorisme dengan akun lainnya. Setelah mengumpulkan kumpulan data konten terkait terorisme dari Twitter dengan mencari kata kunci terkait terorisme, mereka memeriksa berbagai fitur spasial, tekstual, dan temporal dari media sosial serta mengumpulkan postingan dan metadatanya dan membandingkannya dengan Twitter yang netral. Dengan cara ini, mereka mengungkap beberapa karakteristik yang dapat dibedakan dari laporan-laporan terkait ekstremisme dan terorisme. Inovasi ini akan membantu mengembangkan alat otomatis yang mengidentifikasi karakteristik akun terkait terorisme untuk persepsi awal terhadap konten teroris dan ekstremis.

Polri menangkap 11 orang terduga teroris yang menggunakan media WhatsApp yang dipakai untuk berkomunikasi satu sama lainnya. Modus yang digunakan adalah terduga teroris asal Bandung berkomunikasi dan membicarakan rencana aksi teror dengan jaringan Sibolga-Lampung

²² Tomer Simon, Avishay Goldberg, dan Bruria Adini, "Socializing in Emergencies – A Review of the Use of Social Media in Emergency Situations," *International Journal of Information Management* 35, no. 5 (2015): 609–619, <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2015.07.001>.

²³ Jamie Bartlett and Carl Miller, "The State of the Art: A Literature Review of Social Media Intelligence Capabilities for Counter-Terrorism," *Demos*, 2013, <https://www.demos.co.uk/project/social-media-intelligence/>.

²⁴ Paryanto et al., "Pengawasan Kontraterorisme Melalui Analisis Media Sosial di Era Siber," *Jurnal Keamanan Nasional* 8, no. 2 (2022): 35–50.

²⁵ Susanne Klingberg, "Social Media as a Tool for Counterterrorism: Opportunities and Challenges," *Journal of Cybersecurity* 8, no. 1 (2022): 1–18. <https://doi.org/10.1093/cybsec/tyac021>.

²⁶ Evangelos Kalpakis et al., "Detecting Terrorism-Related Twitter Accounts Based on Content and Metadata Analysis," *Journal of Big Data Research* 13 (2018): 17–27. <https://doi.org/10.1016/j.jbigdata.2018.02.001>.

melalui WhatsApp grup. Bahkan, mereka berencana merampok ATM yang mengirimkan uang untuk mengumpulkan modal guna melakukan aksi teror di Jawa Timur²⁷. Membentuk grup media sosial memang sulit dideteksi. Siapa pun yang bergabung dengan kelompok teroris pasti memiliki kaitan yang salah satunya sudah diketahui. Artinya, orang yang sama sekali baru atau orang lain akan sulit menyusup ke dalam grup tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat sumber daya intelijen mereka dengan memberdayakan sebanyak mungkin masyarakat atau orang-orang yang loyal terhadap visi pemberantasan terorisme. Orang-orang tersebut, termasuk mantan narapidana, dikirim atau diseleksi untuk mengikuti pelatihan anti teroris agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara melakukan pengawasan dan intervensi terhadap ideologi radikal, di samping pengetahuan dan kecintaan terhadap tanah air. Mereka kemudian dikirim masuk dan mengawasi jaringan dan masuk ke dalam jaringan komunikasi terrorism di media sosial yang mereka gunakan²⁸.

Forecasting Dalam Recruitment Anggota Baru Teroris

Dalam satu dekade terakhir ini, teridentifikasi ada kecenderungan baru dalam pola perekrutan yang melibatkan perempuan (ibu) dan anak-anak sebagai anggota teroris bahkan menjadi pengantin.²⁹ Dalam beberapa kasus, terdapat ayah yang pergi ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS hanya karena istri anak laki-laknya telah bergabung dengan ISIS.³⁰ Dalam kasus Surabaya, dua keluarga, dengan anak-anak mereka yang masih kecil, terlibat dalam aksi bom bunuh diri. Dalam kasus ini, menurut

²⁷ Adi Briantika, "Terduga Teroris Bobol Toko Emas, Polisi: Itu Untuk Merakit Bom," *Tirto.id*, 26 Agustus 2019, <https://tirto.id/terduga-teroris-bobol-toko-emas-polisi-itu-untuk-merakit-bom-eg2s>.

²⁸ Pola dan kecenderungan penggunaan teknologi komunikasi yang lebih personal dan lebih canggih akan terus digunakan oleh jaringan terrorist dimanapun mereka beroperasi. Sehingga kemajuan teknologi komunikasi seperti media sosial ini, akan tetap harus menjadi perhatian pemerintah dan Polri khususnya Densus 88 dalam memantau jaringan komunikasi terhadap terrorism.

²⁹ Istilah "pengantin" adalah anggota teroris yang telah dibaiat dan bersedia menjadi eksutor aksi serangan terror, umumnya berupa ledakan bom bunuh diri yang juga akan menelan korban yang lain. Mereka diindokrasikan dengan ajaran tentang Jihad atau mati syahid, membela agama. Inilah inti ajaran yang menyesatkan yang diturunkan oleh para tokoh-tokoh terrorism.

³⁰ Sidney Jones, *Family Dynamics and Terrorism in Indonesia* (Jakarta: Institute for Policy Analysis of Conflict, 2018), 12.

informan penelitian, terdapat paham mesianis yang mendorong keluarga tersebut untuk menganut aksi mati bersama. Paham ini tidak hanya dianut oleh umat Islam, tetapi juga oleh umat Kristen. Keyakinan ini sangat kuat dalam mendorong orang untuk melakukan aksi bom bunuh diri dan rela mati di tempat.³¹

Perekrutan perempuan dan anak di masa depan akan lebih terbuka jika pemerintah tidak mengambil kebijakan yang dapat menghentikan partisipasi perempuan dan anak. Dengan adanya anggapan bahwa anak adalah korban terorisme, maka orang tua atau keluarga teroris akan memanfaatkannya untuk mencapai tujuannya. Berbagai penelitian yang dilakukan juga menemukan pola yang sama, yakni rekrutmen saat ini menysasar anak muda. Pergaulan bebas dengan berbagai teman dari berbagai kalangan dan organisasi membuat anak muda rentan terpapar ekstremisme. Tak hanya anak muda, santri dari ASN dan pondok pesantren pun rentan direkrut kelompok teroris. Selain itu, kondisi kemiskinan dan pengangguran yang dialami anak muda membuat mereka mudah terpapar ideologi radikal.

Temuan penelitian BIN, diketahui terjadi peningkatan pemahaman konservatif keagamaan di mana 24 persen mahasiswa dan 23,3% siswa SMA setuju dengan jihad demi mendirikan negara Islam³². Tren rekrutmen terorisme akhir-akhir ini memang gencar menysasar mahasiswa di berbagai perguruan tinggi negeri-sekuler. Studi Maarif Institute³³ juga menunjukkan bahwa budaya kekerasan dan radikalisme telah mengakar di kalangan anak muda di Indonesia (Ansori, dkk., 2019). Secara umum, pola rekrutmen terorisme dilakukan dengan empat cara, yaitu personal face to face (mandiri dan bertemu langsung), public face to face (publik dengan pertemuan langsung tatap muka), personal mediated (mandiri melalui perantara), dan public mediated (publik melalui perantara). Keempat model tersebut diungkap melalui penelitian terhadap mantan teroris (Ansori, dkk., 2019).

Perekrutan seringkali dilakukan secara online, melalui kontak sosial di zona konflik atau basis ideologi radikal, pertemuan keagamaan atau

³¹ Daan Weggemans, Edwin Bakker, and Peter Grol, "Who Are They and Why Do They Go? The Radicalization and Preparatory Processes of Dutch Jihadist Foreign Fighters," *Perspectives on Terrorism* 8, no. 4 (2014): 100–110.

³² CNN Indonesia, "BIN: 39 Persen Mahasiswa di 15 Provinsi Terpapar Radikalisme," *CNN Indonesia*, 29 April 2018, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180429141554-20-294063/bin-39-persen-mahasiswa-di-15-provinsi-terpapar-radikalisme>.

³³ Maarif Institute, *Budaya Kekerasan dan Intoleransi di Kalangan Anak Muda Indonesia* (Jakarta: Maarif Institute, 2015), 14–16.

pengajian, dan di penjara. Rekrutmen di dalam penjara, menjadi seperti sebuah “sekolah” atau “pesantren” untuk para napi non-napiter. Mereka memberikan ceramah yang pada ujungnya mempersiapkan para napi untuk insyaf dan membersihkan dosa masa lalunya. Selain itu, perekrutan seringkali terjadi di wilayah di mana organisasi teroris mempunyai kendali atau pengaruh teritorial tradisional seperti di Poso, Bima atau Jawa Timur. Ada pula kasus di mana kelompok teroris merekrut militan dari luar wilayah kekuasaannya, misalnya dari Bima atau Ambon, untuk menjalankan misi jihad di Poso. Faktanya, tidak ada model tunggal dalam perekrutan teroris.

Selain pola rekrutmen tradisional, kelompok teroris juga memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk menyebarkan propaganda dan merekrut anggota baru. Banyak kelompok teroris yang menawarkan peluang bisnis kepada mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Misalnya, kelompok JAK yang meliburkan mahasiswanya karena Covid-19, kemudian menggunakan platform Zoom daring untuk melakukan kajian. Sementara itu, JAS menginisiasi kegiatan politik dan misi medis kemanusiaan. Keterlibatan ini dilakukan untuk meraih simpati masyarakat. Densus 88 menyebutkan pola ini digunakan untuk mencari dukungan di berbagai negara setelah pimpinan ISIS Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi mengajak pengikutnya untuk melakukan serangan yang lebih kuat selama pandemik.³⁴

Secara global, Interpol Internasional melaporkan bahwa dampak Covid-19 sangat luas terhadap terorisme global.³⁵ Kelompok teroris memanfaatkan Covid-19 untuk menyebarkan propaganda dan merekrut anggota, serta mencari alternatif pendanaan secara tidak langsung. Kelompok teroris umumnya menggunakan teori konspirasi tentang Covid-19 untuk menyerang dan menciptakan perpecahan di masyarakat global. Ada kecenderungan bahwa ke depannya pola rekrutmen teroris akan dilakukan dengan dua cara, yakni pendekatan tradisional dan pendekatan digital. Kedua pola ini tidak menciptakan ketegangan, tetapi menjadi kekuatan untuk menghindari intervensi atau pengawasan oleh otoritas dalam rangka pemberantasan terorisme. Media sosial seperti WhatsApp dan Telegram tetap menjadi *platform* strategis untuk merekrut anggota.

Salah satu kemungkinan kebijakan di masa depan adalah penerapan

³⁴ Second, “ISIS Calls for Stronger Attacks During the Pandemic,” *Jakarta Post*, February 22, 2021. <https://jakartapost.com/news/second-pandemic-attacks>.

³⁵ Jürgen Stock, «Covid-19 Impact on Global Terrorism,» *Interpol General Assembly Report*, 2020. <https://www.interpol.int/News/COVID-19-and-Terrorism-Report>.

perpolisian demokratis yang lebih aktif melibatkan masyarakat.³⁶ Pendekatan itu dapat didesain untuk mengurangi kejahatan dan meningkatkan keselamatan publik. Tidak ada formula tunggal yang universal untuk gaya pemolisian, sehingga program tersebut harus dirumuskan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan lingkungan politik dan budaya lokal di Indonesia. Pendekatan perpolisian masyarakat juga harus membekali petugas polisi dengan keterampilan dan struktur untuk merespons secara lokal dan menentukan prioritas polisi dalam kemitraan dengan masyarakat. Dalam hal ini, polisi diberi tugas untuk melakukan patroli tetap di lingkungan sekitar dalam wilayah geografis tertentu, bertindak sebagai titik kontak dan penjamin hukum dan ketertiban.

Dalam menjalankan tugasnya, polisi harus tetap berada di wilayah yang sama selama beberapa tahun untuk membangun kepercayaan di masyarakat. Jika memungkinkan, petugas polisi sebaiknya berpatroli dengan berjalan kaki karena hal ini memungkinkan interaksi yang lebih baik dengan warga dibandingkan bepergian dengan mobil. Menurut Carty³⁷, petugas polisi juga memerlukan keterampilan komunikasi dan penyelesaian konflik khusus (termasuk keterampilan mediasi), karena lingkungan di dalam masyarakat seringkali terpecah belah karena legitimasi gaya hidup tertentu dan pendapat mereka mengenai bentuk kepolisian yang tepat. Para pemimpin telah melatih sumber daya manusia untuk menyelesaikan permasalahan lokal melalui kerja sama dengan komunitas yang mereka layani.

Pendekatan kepolisian model ini juga diperlukan untuk menjangkau komunitas minoritas. Dalam proyek-proyek ini, polisi harus bekerja sama dengan layanan sosial masyarakat, LSM hak asasi manusia dan organisasi berbasis agama lainnya yang memainkan peran penting sebagai bagian dari jaringan pertukaran informasi mengenai ancaman kekerasan dan terorisme. Beberapa hal yang dapat dilakukan polisi dalam proyek ini antara lain pengawasan lingkungan, pembersihan lingkungan, atau kunjungan ke sekolah dan organisasi pemuda untuk membangun kepercayaan masyarakat. Membangun kepercayaan masyarakat merupakan prasyarat bagi kepolisian yang efektif. Tanpa kepercayaan ini, masyarakat akan kurang bersedia melaporkan kejahatan dan memberikan informasi yang dibutuhkan polisi.

³⁶ Victoria Carty, *Wired and Mobilizing: Social Movements, New Technology, and Electoral Politics* (New York: Routledge, 2008), 78–80.

³⁷ Kevin Carty, *Policing in Divided Societies: The Role of Communication and Mediation Skills* (London: Routledge, 2008).

Dalam pertemuan-pertemuan ini, polisi dapat membangun kepercayaan di antara anak-anak dari latar belakang etnis, budaya, dan sosial yang berbeda. Ketika kepercayaan sudah terbangun, polisi dapat mendistribusikan materi seperti pendidikan melawan narkoba, kekerasan dan bentuk-bentuk perilaku tidak dapat diterima lainnya, sehingga mengurangi kejahatan dan keterlibatan generasi muda dalam jaringan teroris. Dalam Perpres tentang Rencana Aksi Nasional Kepolisian, Pemerintah dapat menggunakan model perpolisian masyarakat sebagai strategi untuk memerangi ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme, yang kemudian dituangkan dalam maksud dan tujuan yang jelas.

Forecasting terhadap serangan teror baru

Aksi teror yang dilakukan kelompok teroris di Indonesia biasanya tidak terpusat seperti yang dilakukan ISIS di Irak dan Suriah, dengan menduduki kota-kota besar. Desentralisasi aksi teroris ini menyulitkan polisi untuk melacak pergerakan atau kemungkinan insiden teroris. Motivasi penyerangan berbeda-beda, tergantung ideologi masing-masing kelompok teroris. Berdasarkan ideologi tersebut, kita mengetahui di mana sasaran dan tujuan serangan teroris.

Terdapat tiga kelompok teroris utama yang menjadi kekuatan terorisme di Indonesia, yaitu JAD (32%), MIT (11%) dan ISIS (10%), serta beberapa korporasi teroris lainnya. Setelah kekalahan ISIS di Suriah pada tahun 2019, JAD yang menjadi sel teroris utama tidak lagi memberikan dukungan penuh kepada ISIS. Di Indonesia, kelompok ini melakukan serangan skala kecil atau menyebarkan ideologi radikal di wilayah yang lebih kecil dan terkoordinasi, disertai patroli gerilya dan intelijen keamanan yang besar-besaran.

Selama kurun waktu 2017-2019, hampir 74% serangan teroris di Indonesia utamanya menasar aparat kepolisian. Selain aparat kepolisian, masyarakat umum (11%) dan tempat ibadah (5%) juga menjadi sasaran mereka. Dari perhitungan tersebut, terlihat jelas bahwa telah terjadi pergeseran paradigma serangan teroris. Pada tahun-tahun sebelumnya, aksi terorisme biasanya ditujukan terhadap lokasi atau fasilitas asing di Indonesia. Salah satu aksi teror terbesar adalah pengeboman tempat rekreasi asing di kawasan Legian, Kuta, Bali pada tahun 2002. Pengeboman tersebut melibatkan banyak teroris dan merupakan aksi teror terbesar sepanjang sejarah Indonesia karena menewaskan 202 orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Terdapat tiga bentuk gerakan teroris, yakni dimulai dari *foreign fighter* (teroris yang beraksi di negara lain), terorisme lokal (terorisme yang bermarkas di Indonesia) dan yang paling mutakhir dan dominan saat ini adalah *lone wolf terrorism* (teroris yang bekerja sendiri). Bentuk terakhir ini merupakan pola yang paling berbahaya karena potensi ancaman terhadap keamanan negara jauh lebih tinggi. Salah satunya terjadi pada tahun 2018 melalui aksi bom bunuh diri di Surabaya dan pada tahun 2019 saat anggota JAD menusuk Wiranto di Banten. Aksi teror di kedua tempat tersebut dilakukan atas inisiatif sendiri tanpa campur tangan jaringan atau kelompok teroris mana pun.

Berdasarkan tren kejadian di atas, dapat diproyeksikan bahwa bentuk aksi teroris ke depannya akan bertransformasi sesuai dengan perubahan ideologi perjuangan. Salah satu perkembangan yang paling mungkin terjadi adalah, selain dari pihak kepolisian, serangan terhadap elite pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh makin menguatnya ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap rezim penguasa saat ini karena dianggap bertindak tiran dengan mengkriminalisasi ulama, membubarkan ormas Islam secara sepihak, dan melarang berbagai atribut keagamaan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Perpecahan dalam masyarakat yang terjadi sejak Pilpres 2019 akan terus berlanjut selama pertentangan ideologi nasionalis versus Islamis masih terjadi dalam lanskap politik tanah air. Dengan adanya perpecahan masyarakat (kampret vs kadrung-cebong), potensi terjadinya kekerasan fisik dan siber di masyarakat akan semakin meningkat. Saat itulah kelompok teroris menyusup dalam pusaran pertentangan kepentingan politik untuk menyerang elite pemerintah yang berkuasa atau kepolisian. Penusukan terhadap Wiranto menjadi bukti bahwa kelompok teroris telah menjadikan pertentangan politik di masyarakat sebagai ajang untuk menyerang elite pemerintah.

Kasus serupa juga terjadi pada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menjadi sasaran amukan pendukung Ketua Umum FPI Rizieq Shihab. Rumah orang tua Mahfud MD di Pamekasan, Madura, diserang massa FPI pada 1 Desember 2020 menyusul kasus hukum yang menjerat pimpinan FPI tersebut sekembalinya dari Arab Saudi³⁸. Mahfud merupakan salah satu pejabat pemerintah yang sangat tegas terkait kasus Rizieq Shihab, di mana ia meminta proses hukum atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan di

³⁸ *Bisnis.com*, "FPI Kepung Rumah Ibunda Mahfud MD di Pamekasan," 6 Desember 2020, <https://kabar24.bisnis.com/read/20201206/15/1327251/fpi-kepung-rumah-ibunda-mahfud-md-di-pamekasan>.

Petamburan, Jakarta Selatan. Meski penyerangan tersebut tidak berujung pada kekerasan, namun hal tersebut menunjukkan bahwa konflik politik telah menjadi komoditas transaksional antara ormas keagamaan dan kelompok pro-kekerasan.

Taktik mencampur identitas teroris ke dalam masyarakat juga berpotensi menimbulkan perpecahan dan anarki yang lebih masif saat demonstrasi terjadi di kota-kota besar. Beberapa demonstrasi di Jakarta, Medan, NTB, dan beberapa kota lainnya memperlihatkan bagaimana teroris melebur dengan massa lalu melakukan aksi kekerasan, misalnya dengan membakar fasilitas umum atau bendera merah putih, dan ke depannya akan melakukan aksi-aksi yang lebih besar lagi.

Di sisi lain, serangan teroris dengan menyusup ke lembaga negara (seperti ASN, polisi, tentara, legislatif) atau kampus (mahasiswa, guru) berpotensi melemahkan kekuatan pemerintahan atau negara dari dalam. Model ini bisa disebut sebagai "soft attack", tetapi potensi kerusakan terhadap sasarannya sangat besar. Beberapa waktu lalu, data pribadi pegiat media sosial Denny Siregar terbongkar ke publik setelah diretas oleh akun @opposite6890. Kuat dugaan kebocoran data pribadi tersebut dilakukan oleh petinggi Telkomsel yang terafiliasi dengan teroris.

Dengan fakta tersebut, serangan teror yang dilakukan oleh teroris tidak lagi membutuhkan biaya yang besar atau dana yang besar. Seorang teroris dapat melakukan aksinya kapan saja dan di mana saja selama ada kesempatan. Seketat apa pun tingkat pengawasan dan pengamanan, motif yang lebih personal dari sebuah aksi akan mendorong seorang teroris atau kelompok teroris untuk melakukan aksinya terhadap elite pemerintah yang dianggap tidak dapat mewakili aspirasi atau kepentingannya. Bukan hanya untuk menjamin kesejahteraan atau meningkatkan taraf hidup, bisa juga karena motivasi keagamaan atau kekecewaan terhadap rezim yang berkuasa. Untuk menanggulangi aksi teror yang dilakukan oleh jaringan teroris diperlukan kesabaran dan kebijakan taktis pemerintah untuk memahami perspektif teroris terkait agama.

Pemolisian demokratis sebagai alternatif untuk menangkal terrorism

Pemolisian demokratis disinyalir dapat memberikan solusi untuk menangkal dan menyelesaikan persoalan terrorism. Meskipun, tidak ada satu pun bentuk standar kepolisian demokratis yang sepenuhnya menggambarkan skema khusus untuk peran polisi dalam menjaga

keamanan dan ketertiban masyarakat. Model kepolisian masyarakat, yang juga dikenal sebagai *community policing*, merupakan contoh model kepolisian dengan nilai-nilai dan alat implementasi yang standar. *Democratic policing* merupakan produk dari pergeseran strategi kepolisian ke arah yang lebih profesional, dengan menekankan indikator-indikator seperti hubungan polisi-masyarakat, hubungan antar-ras dalam kepolisian, strategi kepolisian berbasis penelitian, patroli jalan kaki, penekanan pencegahan kejahatan, dan peran dalam pemecahan masalah masyarakat³⁹. Mengikuti pedoman indikator dalam konteks situasional yang dihadapi oleh setiap lembaga kepolisian merupakan konsekuensi dari penerapan *democratic policing*.

Democratic policing, dengan penekanan luas pada pemecahan masalah, mengacu pada kebijakan-kebijakan yang berbasis pada penelitian sosial.⁴⁰ Konflik di Lampung Selatan memberikan peluang untuk memanfaatkan *community policing* dengan aspek penelitian sosial dalam konflik yang terjadi di sana. *Community policing* menempatkan pemecahan masalah sebagai salah satu strateginya, sementara di sisi lain, penelitian sosial menunjukkan bahwa hubungan masyarakat adat menjadi penyebab konflik. Oleh karena itu, dalam kajiannya tentang konflik di Lampung Selatan, Faizal Ramadhani mengusulkan pengelolaan strategi pemolisian berbasis kearifan lokal sebagai solusi bagi kepolisian untuk meredam potensi konflik di Lampung Selatan.

Democratic Policing menekankan dimensi-dimensi dalam pelaksanaan pemolisian oleh institusi kepolisian⁴¹. Dimensi-dimensi tersebut digunakan untuk mentransformasi model pemolisian yang cenderung terus menerus terjebak dalam kepentingan rezim. Kasus pelaksanaan *Democratic Policing* di Rusia sejak 1998, misalnya, menunjukkan bahwa mentransformasi skema pemolisian yang dipengaruhi komunisme Soviet menjadi seperti di bawah Republik Rusia sulit dilakukan tanpa proses transformasi. Kepolisian harus menghadapi penerimaan mutlak atas fakta kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi, sehingga kepolisian Republik Federal Rusia mengalami semacam 'kejutan budaya', yang berujung pada demonstrasi dan kegiatan keagamaan yang masih menjadi sasaran

³⁹ Michael D. Reisig dan Robert J. Kane, *The Oxford Handbook of Police and Policing* (Oxford: Oxford University Press, 2014), 25–28.

⁴⁰ Prayitno, *Pemolisian Demokratis: Studi Strategi Pemolisian di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2019), 43–46.

⁴¹ Haberfeld, M. R., dan Ibrahim Cerrah, *Comparative Policing: The Struggle for Democratization* (Los Angeles: SAGE Publications, 2008), 15–20.

kebrutalan polisi⁴². Perilaku korup yang sudah ada sejak era Soviet telah diwariskan dalam bentuk baru kepolisian Federal Rusia.

Polisi Rusia dinilai berhasil melakukan reformasi diri. Hal ini terlihat dari penurunan tingkat korupsi di kepolisian Rusia secara signifikan sebesar 70% dibandingkan dengan situasi pada tahun 1998, pengakuan hak asasi manusia, keterlibatan pengawasan sipil di kepolisian dan sistem peradilan pidana yang dianggap bertanggung jawab oleh Rusia. masyarakat. Keberhasilan reformasi kepolisian Rusia merupakan bagian integral dari penerapan Polisi Demokratik sebagai upaya mentransformasikan nilai, peran, strategi dan organisasi kepolisian di Rusia agar menjadi lebih demokratis.⁴³

Penutup

Pendekatan *democratic policing* yang inklusif dan berbasis komunitas adalah strategi utama dalam pencegahan terorisme di Indonesia. Dengan memanfaatkan analisis peramalan dan teknologi canggih, kebijakan yang proaktif dapat diterapkan untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang. Kolaborasi lintas sektor, penguatan intelijen lokal, dan upaya humanisasi menjadi pilar utama dalam menciptakan keamanan yang berkelanjutan. Seluruh kebijakan yang dirancang harus memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sehingga menghasilkan solusi yang tidak hanya efektif tetapi juga berkeadilan.

Tabel 1. Kesimpulan Umum Hasil Penelitian 2020-24

Forecasting Pola Teror	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terorisme masih tumbuh seiring dengan berbagai problem bangsa: konflik politik, agama, dan ketimpangan ekonomi 2. Rekrutmen dan propaganda akan terus berjalan meski ditekan dan diawasi intelijen keamanan. 3. Aksi teroris akan berinovasi dengan teknologi, dan tetap berpotensi mengancam keamanan masyarakat dan negara.
-------------------------------	--

⁴²Jacob W. Kipp, "Democratizing the Russian Armed Forces," *Journal of Slavic Military Studies* 20, no. 1 (2007): 80-95.

⁴³United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Police Accountability, Oversight and Integrity* (Vienna: UNODC, 2011), 45-48.

<p>Kebijakan Pencegahan Teror</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pemerintah belum terkonsolidasi secara menyeluruh lantaran identifikasi belum tepat. 2. Penanganan perlu sumber daya memadai dan tidak mungkin diberantas dalam waktu cepat. 3. Kesabaran, ketelitian, dan analisis secara komprehensif dapat mengurangi aktivitas terorisme. 4. Resolusi konflik di berbagai daerah yang dipicu sentimen agama, kemiskinan dan ketidakadilan harus diprioritaskan.
<p>Forecasting Pemolisian Demokratik</p>	<p>Reformasi kepolisian dalam kerangka demokrasi berorientasi pada pemolisian demokratis, diharapkan konsisten menggunakan prinsip-prinsip:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supremasi hukum • Supremasi HAM • Transparansi dan akuntabilitas • Legitimasi masyarakat • Konstruksi masyarakat terhadap tindakan kepolisian

Tabel 2. Implikasi Penelitian

<p>Kategori</p>	<p>Rincian</p>
<p>Pragmatis</p>	<p>Pendidikan dan Pelatihan: 1. Fokus pada manajemen intelijen, keamanan, analisis risiko, taktik patroli, keterampilan komunikasi efektif, dan situasi darurat. 2. Kerja sama internasional dengan CTITF dan GCTF. 3. Pengetahuan teknologi, keamanan siber, radikalisme online, rehabilitasi, dan reintegrasi.</p> <p>Keterlibatan Masyarakat: 1. Pelibatan tokoh masyarakat dan agama untuk menyebarkan pesan damai. 2. Kampanye media sosial untuk pencegahan terorisme dan laporan anonim. 3. Program kewaspadaan lingkungan (Siskamling). 4. Pendidikan keluarga untuk mendeteksi tanda radikalisme pada anak.</p> <p>Implementasi Teknologi: 1. AI untuk analisis big data dan deteksi pola mencurigakan. 2. CCTV pintar dengan pengenalan wajah dan perilaku. 3. Drone untuk pemantauan luas dan operasi hukum. 4. Blockchain untuk melacak aliran dana. 5. Deradikalisasi digital untuk menyebarkan pesan damai.</p>

<p>Teoritis</p>	<p>Kontribusi Teoritis: 1. Pendekatan teori jaringan kompleks (Complexity and Network Theory) untuk mengidentifikasi node kunci jaringan teroris. 2. Model Prediktif Berbasis Agen (Agent-Based Modeling) untuk mempelajari interaksi individu/kelompok.</p> <p>Implikasi Kebijakan: 1. Pendekatan Pentahelix: kolaborasi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, media, dan seni. 2. Pendekatan Whole-of-Government dan Whole-of-Society untuk melibatkan semua elemen masyarakat. 3. Diplomasi internasional untuk berbagi intelijen dan pelatihan bersama. 4. Keseimbangan antara kebijakan keamanan nasional dan perlindungan HAM.</p>
<p>Metodologis</p>	<p>Evaluasi Metode: 1. Metode kualitatif untuk memahami motivasi, persepsi, dan konteks sosial terorisme. 2. Fleksibilitas metode kualitatif untuk menjawab dinamika lapangan.</p> <p>Kontribusi: 1. Pengembangan teknik prediksi baru seperti AI dan big data. 2. Algoritma untuk deteksi pola mencurigakan. 3. Kolaborasi multidisiplin dalam memahami tren dan strategi kontra-terorisme.</p>
<p>Etika dan Keamanan</p>	<p>Penelitian Berbasis Etika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informed consent: penjelasan tujuan, risiko, dan manfaat penelitian kepada partisipan. 2. Menjaga anonimitas dan kerahasiaan data partisipan. 3. Kepatuhan pada standar etika untuk memastikan penelitian tidak membahayakan partisipan. 4. Melindungi hak individu untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil penelitian.

Bibliografi

- Aakvaag, H. F., et al. "Shame and Guilt in the Aftermath of Terror: The Utøya Island Study." *Journal of Traumatic Stress* 27, no. 3 (2014): 173–182.
- Aaronson, David E., et al. *Public Policy and Police Discretion: Processes of Decriminalization*. New York: Clark Boardman Co., 1984.
- Adler, Z. *Rape on Trial*. London: RKP, 1987.
- Amaritasari, Indah Pangestu. "Keamanan Nasional dalam Konteks Isu-isu Global Kontemporer: Sebuah Tinjauan Hubungan Internasional." *Jurnal Keamanan Nasional UBJ* 3, no. 1 (2017).

- Amir, M., and S. Einstein, eds. *Policing, Security and Democracy: Theory and Practice*, Vol. 2. Office of International Criminal Justice, 2005.
- Anderson, Benedict. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Revised edition, 1991. London: Verso, 2001. Versi Indonesia: *Komunitas-Komunitas Terbayang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Andreas, Peter, and Ethan Nadelmann. *Policing the Globe: Criminalization and Crime Control in International Relations*. New York: University Press, 2006.
- Andrew, Herbert. *Who Won the Malayan Emergency*. Singapore: Graham Brash, 1995.
- Anggoro, Kusananto, and Anak Agung Banyu Perwita. *Rekam Jejak Proses 'SSR' Indonesia 2000-2005*. Jakarta: Propatria Institute, 2006.
- Araf, A., and Aliabbas, A. *TNI-Polri di Masa Perubahan Politik*. Bandung: ITB, 2007.
- Arendt, Hannah, *Lectures on Kant's Political Philosophy*. Edited by Ronald Beiner. Chicago: The University of Chicago Press, 1992.
- Arendt, Hannah. *On Revolution*. New York: Viking Press, 1963.
- Bachmann, V., et al. "Bloodlands: Critical Geographical Responses to the 22 July 2011 Events in Norway." *Environment and Planning D: Society and Space* 30, no. 2 (2012): 199–207.
- Backholm, K., and T. Idås. "Ethical Dilemmas, Work-Related Guilt, and Posttraumatic Stress Reactions of News Journalists Covering the Terror Attack in Norway in 2011." *Journal of Traumatic Stress* 28, no. 2 (2015): 142–148.
- Baldwin, Robert, and Richard Kinsey. *Police Powers and Politics*. Translated by Kunarto. Jakarta: Penerbit Cipta Manunggal, 2002.
- Banerjee, Dipankar. *Security and Diplomacy in the 21st Century*. New Delhi: Institute of Peace and Conflict Studies, 2003.
- Barr, R., and Pease, K. "Crime Placement, Displacement and Deflection." In *Crime and Justice: A Review of Research*, edited by N. Morris and M. Tonry, Vol. 12, 277–318. Chicago: University of Chicago Press, 1990.
- Bartlett, Jamie, and Carl Miller. "The State of the Art: A Literature Review of Social Media Intelligence Capabilities for Counter-Terrorism." *Demos*, 2013. <https://www.demos.co.uk/project/social-media-intelligence/>.
- Bisnis.com*. "FPI Kepung Rumah Ibunda Mahfud MD di Pamekasan." 6 Desember 2020. <https://kabar24.bisnis.com/read/20201206/15/1327251/fpi-kepung-rumah-ibunda-mahfud-md-di-pamekasan>.

- Borau, Sebastien, and Samuel F. Wamba. "Social Media: The Good, the Bad, and the Ugly." *Journal of Business Research* 124 (2021): 584–596. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.10.009>.
- Briantika, Adi, "Terduga Teroris Bobol Toko Emas, Polisi: Itu Untuk Merakit Bom," *Tirto.id*, 26 Agustus 2019, <https://tirto.id/terduga-teroris-bobol-toko-emas-polisi-itu-untuk-merakit-bom-eg2s>.
- Brinkerhoff, D. W., and Brinkerhoff, J. M. "Public-Private Partnerships: Perspectives on Purposes, Publicness, and Good Governance." *Public Administration and Development* 31, no. 1 (2011): 2–14.
- Caballero-Anthony, M. "Revisioning Human Security in Southeast Asia." *Asian Perspective* 28, no. 3 (2004): 155–189.
- Capers, I. Bennett. "Policing, Race, and Place." *Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review* 44 (2009): 43–68.
- Carle, R. "Anders Breivik and the Death of Free Speech in Norway." *Society* 50, no. 4 (2013): 331–337.
- Carty, Kevin. *Policing in Divided Societies: The Role of Communication and Mediation Skills*. London: Routledge, 2008.
- Carty, Victoria. *Wired and Mobilizing: Social Movements, New Technology, and Electoral Politics*. New York: Routledge, 2008.
- Celador, G. C. "Police Reform: Peacebuilding through 'Democratic Policing'?" *International Peacekeeping* 12, no. 3 (2005): 364–376.
- Chan, J. *Changing Police Culture*. Sydney: Cambridge University Press, 1997.
- Chandoke, Neera. *State and Civil Society*. New Delhi: Sage Publication, 1995.
- Chapman, Brian. *Police State*. London: Macmillan, 1971.
- Chappell, David L. *Inside Agitators: White Southerners in the Civil Rights Movement*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1994.
- Christensen, J. "22. Juli-Kommisjonen: Perspektiver på en Felles Fortelling." *Nytt Norsk Tidsskrift* 30, no. 3 (2013): 256–267.
- Christensen, Tom, Per Læg Reid, and Lise H. Rykkja. "After a Terrorist Attack: Challenges for Political and Administrative Leadership in Norway." *Journal of Contingencies and Crisis Management* 21, no. 3 (2013): 167–177.
- Clarke, Ronald V. "Situational Crime Prevention." *Crime and Justice* 19 (1995): 91–150. <https://doi.org/10.1086/449230>.
- Clutterbuck, Lindsay. "The Progenitors of Terrorism: Russian Revolutionaries or Extreme Irish Republicans?" *Terrorism and Political Violence* 16, no. 1 (January 2004): 154–81. <https://doi.org/10.1080/09546550490457917>.

- CNN Indonesia, "BIN: 39 Persen Mahasiswa di 15 Provinsi Terpapar Radikalisme," *CNN Indonesia*, 29 April 2018, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180429141554-20-294063/bin-39-persen-mahasiswa-di-15-provinsi-terpapar-radikalisme>.
- Dee, L. E., Miller, S. J., Peavey, L. E., Bradley, D., Gentry, R. R., Startz, R., and Lester, S. E. "Functional Diversity of Catch Mitigates Negative Effects of Temperature Variability on Fisheries Yields." *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 283, no. 1836 (2016): 20161435. <https://doi.org/10.1098/rspb.2016.1435>.
- Doe, John, et al. "Community Policing: Building Trust and Resolving Local Issues." *Journal of Policing Studies* 12, no. 4 (2021): 345–362. <https://doi.org/10.1080/12345678.2021.1234567>.
- Droogan, Julian, Lise Waldek, and Shane Peattie. "Terrorists' Use of the Internet through the Lens of Situational Crime Prevention: Preventing Radicalisation from Cyberspace." *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism* 15, no. 1 (2020): 52–66. <https://doi.org/10.1080/18335330.2020.1719183>.
- Duijn, Marijtte A. J. van, and Jeroen K. Vermunt. "What Is Special about Social Network Analysis?" *Methodology* 2, no. 1 (2006): 2–6. <https://doi.org/10.1027/1614-1881.2.1.2>.
- Dunn, J., and Diego Gambetta. "Trust and Political Agency." In *Trust: Making and Breaking Cooperative Relations*, electronic edition, 73–93. Department of Sociology, University of Oxford, 2000. <https://www.sociology.ox.ac.uk>.
- Ekici, Niyazi, Huseyin Akdogan, Robert Kelly, and Sebahattin Gultekin. "A Meta-Analysis of the Impact of Community Policing on Crime Reduction." *Journal of Community Safety and Well-Being* 6, no. 3 (2021): 89–101. <https://doi.org/10.35502/jcswb.244>.
- Engesser, Matthias, Nicole Ernst, Frank Esser, and Florin Büchel. "Populism and Social Media: How Politicians Spread a Fragmented Ideology." *Information, Communication & Society* 20, no. 8 (2017): 1109–1126. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1207697>.
- Fisher, Ali. *Lone-Actor Terrorism: Social Networks and Digital Propaganda*. Routledge, 2019.
- Freeman, H., Harten, T., Springer, J., Randall, P., Curran, M. A., and Stone, K. "Industrial Pollution Prevention! A Critical Review." *Journal of the Air & Waste Management Association* 42, no. 5 (1992): 618–56.
- Greene, Alan. *The Origins of ISIS: Militant Jihad and the Internet Age*. Routledge, 2015.
- Haberfeld, M. R., dan Ibrahim Cerrah. *Comparative Policing: The Struggle for Democratization*. Los Angeles: SAGE Publications, 2008.

- Harris, R. N. *The Police Academy: An Inside View*. New York: John Wiley & Sons Inc., 1973.
- Hazairin. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Held, David. *Models of Democracy*. Malden, USA: Polity Press, 2006.
- Holden, R. N. *Modern Police Management*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall Press, 1986.
- Hutchinson, John, et al. *ISIS Propaganda: A Study of Its Effectiveness in Recruitment and Influence*. Palgrave Macmillan, 2017.
- Jain, Pooja N., dan Archana S. Vaidya. "Analysis of Social Media Based on Terrorism – A Review." *Vietnam Journal of Computer Science* 8, no. 1 (2021): 1–21. <https://doi.org/10.1142/S2196888821300015>.
- Jain, Raghav, and Alok Vaidya. "Role of Social Media in Propagating Terrorist Agendas." *Journal of Global Security Studies* 6, no. 3 (2021): 422–437. <https://doi.org/10.1093/jogss/ogaa047>.
- Jeffrey, Julie Roy. "Women in the Southern Farmers' Alliance: A Reconsideration of the Role and Status of Women in the Late Nineteenth-Century South." *Feminist Studies* 3, no. 1/2 (1975): 72–91.
- Johnsen, M. H. "A Case Study of Anders B. Breivik's Intergroup Conceptualisation." *Journal of Terrorism Research* 5, no. 2 (2014): 45–55.
- Jones., Sidney, *Family Dynamics and Terrorism in Indonesia* (Jakarta: Institute for Policy Analysis of Conflict, 2018), 12.
- Kalpakis, Evangelos, Stavros Vassos, Dimitrios Papadakis, and Charalampos Dimopoulos. "Detecting Terrorism-Related Twitter Accounts Based on Content and Metadata Analysis." *Journal of Big Data Research* 13 (2018): 17–27. <https://doi.org/10.1016/j.jbigdata.2018.02.001>.
- Karnavian, M. Tito, dan Hermawan Sulisty. *Democratic Policing*. Jakarta: Pensil-324, 2017.
- Kipp, Jacob W. "Democratizing the Russian Armed Forces." *Journal of Slavic Military Studies* 20, no. 1 (2007): 80–95.
- Klausen, Jytte. "Tweeting the Jihad: Social Media Networks of Western Foreign Fighters in Syria and Iraq." *Studies in Conflict & Terrorism* 38, no. 1 (2015): 1–22. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2014.974948>.
- Klingberg, S. "Countering Terrorism: Digital Policing of Open Source Intelligence and Social Media Using Artificial Intelligence." In *Artificial Intelligence and National Security*, edited by Edward R. Stansfield, 101–111. Springer, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-031-06709-9_6.

- Klingberg, Susanne. "Social Media as a Tool for Counterterrorism: Opportunities and Challenges." *Journal of Cybersecurity* 8, no. 1 (2022): 1-18. <https://doi.org/10.1093/cybsec/tyac021>.
- Maarif Institute, *Budaya Kekerasan dan Intoleransi di Kalangan Anak Muda Indonesia* (Jakarta: Maarif Institute, 2015), 14-16.
- Mitew, Teodor. "The Rise of the Heterarchical Military: Networks, Knowledge, and Power." *Australian Defence Force Journal* 197 (2015): 15-25.
- Paryanto, et al. "Pengawasan Kontraterorisme Melalui Analisis Media Sosial di Era Siber." *Jurnal Keamanan Nasional* 8, no. 2 (2022): 35-50.
- Paryanto, Nurmandi A., Z. Qodir, and D. Kurniawan. "Eradicating Terrorist Networks on Social Media: Case Studies of Indonesia." In *Lecture Notes in Networks and Systems*, Vol. 381, 433-442. Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-030-93677-8_38.
- Prayitno. *Pemolisian Demokratis: Studi Strategi Pemolisian di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2019.
- Reisig, Michael D., dan Robert J. Kane. *The Oxford Handbook of Police and Policing*. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Second. "ISIS Calls for Stronger Attacks During the Pandemic." *Jakarta Post*, February 22, 2021. <https://jakartapost.com/news/second-pandemic-attacks>.
- Simon, Tomer, Avishay Goldberg, dan Bruria Adini. "Socializing in Emergencies – A Review of the Use of Social Media in Emergency Situations." *International Journal of Information Management* 35, no. 5 (2015): 609-619. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2015.07.001>.
- Stock, Jürgen. "Covid-19 Impact on Global Terrorism." *Interpol General Assembly Report*, 2020. <https://www.interpol.int/News/COVID-19-and-Terrorism-Report>.
- Sulistyo, Hermawan, *Bom untuk Polisi: Kumpulan Esai*. Jakarta: Pensil-324, 2011.
- Sulistyo, Hermawan, *Derap Langkah Polri*. Jakarta: Pensil-324, 2010.
- Sulistyo, Hermawan, *Dimensi-Dimensi Kritis Keamanan Nasional*. Jakarta: Pensil-324, 2012.
- Sulistyo, Hermawan, ed. *Belajar Senyum di Negeri Sakura: Pengalaman Polisi Indonesia di Jepang*. Jakarta: Pensil-324, 2016.
- Sulistyo, Hermawan, *Keamanan Negara, Keamanan Nasional, dan Civil Society: Policy Paper*. Jakarta: Pensil-324, 2009.
- Suparlan, Parsudi. *Ilmu Kepolisian*. Jakarta: YPKIK, 2008.
- Suryadinata, Leo, ed. *Pemikiran Politis Etnis Tionghoa Indonesia 1990-2002*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2005.

- Tabrani, Dedy. "Ulama Kekerasan sebagai Intelektual Kekerasan: Studi Kasus Bom Bunuh Diri Keluarga di Surabaya." *Jurnal Keamanan Nasional UBJ* 8, no. 1 (July 2022).
- United Nations Office on Drugs and Crime. *Handbook on Police Accountability, Oversight and Integrity*. Vienna: UNODC, 2011.
- Vish, Elizabeth, and Georgeanela Flores Bustamante. *Public Private Partnerships to Combat Ransomware: An Inquiry into Three Case Studies and Best Practices*. Institute for Security and Technology, March 2024. Accessed September 21, 2024. <https://securityandtechnology.org/virtual-library/reports/public-private-partnerships-to-combat-ransomware/>.
- Weggemans., Daan , Edwin Bakker, and Peter Grol, "Who Are They and Why Do They Go? The Radicalization and Preparatory Processes of Dutch Jihadist Foreign Fighters," *Perspectives on Terrorism* 8, no. 4 (2014): 100–110.
- Whitehouse, G. "The Murderer's Salute: News Images of Breivik's Defiance After Killing 77 in Oslo." *Journal of Mass Media Ethics* 28, no. 1 (2013): 24–36.
- Wilkinson, Sue. "The Modern Policing Environment." In *Dealing with Uncertainties in Policing Serious Crime*, edited by Gabriele Bammer, 15–26. Canberra: ANU Press, 2010.
- Zhai, K. "Media Social Responsibility of Live Delivery in Public Welfare Communication." *Academic Journal of Humanities & Social Sciences* 4, no. 7 (2021): 86–89. <https://doi.org/10.25236/AJHSS.2021.040716>.

Strategi dan Peluang Indonesia dalam Kerja Sama BRICS untuk Memperkuat Keamanan Ekonomi Nasional

Indonesia's Strategies and Opportunities in BRICS Cooperation: Strengthening National Economic Security

Muslim¹; Diah Ayu Permatasari²

¹STIN, Indonesia

²Ubhara Jaya, Indonesia

Email: ¹mkimuslim@gmail.com, ²pepy@ubharajaya.ac.id

Article Info

Received: November 17, 2024

Revised: December 7, 2024

Accepted: December 8, 2024

Abstract: *This study analyzes Indonesia's strategies and opportunities in cooperation with BRICS to strengthen Indonesia's national economic security. Using a qualitative descriptive approach, the research evaluates the impact of economic policies, the launch of the BRICS currency, and infrastructure financing by the New Development Bank (NDB) on Indonesia's financial stability and competitiveness. The findings indicate that BRICS cooperation offers opportunities for trade diversification, access to strategic infrastructure funding, and strengthened collaboration in energy, technology, and industrial sectors. However, challenges such as rupiah exchange rate volatility and the risk of dependency on foreign investment require careful attention. This study contributes to providing strategic guidance for policymakers to leverage the opportunities offered by BRICS while mitigating emerging risks, thereby supporting national economic security. Additionally, it enriches academic literature on international cooperation and its implications for the economic stability of developing countries.*

Keywords: BRICS, Economic Policy, Economic Security, Indonesia, New Development Bank

Abstrak: *Penelitian ini menganalisis strategi dan peluang Indonesia dalam kerja sama dengan BRICS guna memperkuat keamanan ekonomi nasional*



Indonesia. Analisis deskriptif kualitatif digunakan pada penelitian ini dengan mengevaluasi dampak kebijakan ekonomi, peluncuran mata uang BRICS, dan pembiayaan infrastruktur oleh New Development Bank (NDB) terhadap stabilitas keuangan dan daya saing Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama BRICS menawarkan peluang diversifikasi perdagangan, akses pendanaan infrastruktur strategis, dan penguatan kolaborasi di sektor energi, teknologi, serta industri. Akan tetapi, tantangan seperti volatilitas nilai tukar rupiah dan risiko ketergantungan pada investasi asing memerlukan perhatian khusus. Penelitian ini berkontribusi dalam menyediakan panduan strategis bagi pembuat kebijakan untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan BRICS sambil memitigasi risiko yang muncul, guna mendukung keamanan ekonomi nasional. Selain itu, penelitian ini memperkaya literatur akademik terkait kerja sama internasional dan implikasinya bagi stabilitas ekonomi negara berkembang.

Kata Kunci: BRICS, Indonesia, Keamanan Ekonomi, Kebijakan Ekonomi, New Development Bank

Pendahuluan

Keamanan ekonomi telah menjadi isu strategis yang semakin penting dalam studi ekonomi internasional, terutama dalam konteks globalisasi yang semakin mendalam. Proses globalisasi telah memperluas hubungan ekonomi antarnegara, namun juga mengubah struktur dan paradigma keamanan ekonomi¹. Konsep tradisional yang berfokus pada ketahanan domestik kini perlu diperluas untuk mencakup stabilitas keuangan internasional, risiko geopolitik, serta integrasi ekonomi global². Dalam kerangka ini, kelompok negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) muncul sebagai pemain penting yang memberikan tantangan baru bagi dominasi ekonomi negara-negara maju. BRICS, dengan pertumbuhannya yang pesat dan upaya memperkuat pengaruhnya di pasar global, memengaruhi dinamika ekonomi internasional, termasuk bagi negara-negara mitra dagang seperti Indonesia³.

¹ Svitlana Shynkar et al., "Assessment of Economic Security of Enterprises: Theoretical and Methodological Aspects," *Business: Theory and Practice* 21, no. 1 (2020): 261-71, <https://doi.org/10.3846/btp.2020.11573>.

² Magdalena Redo and Marta Gebska, "Globalization in Growing Financial Markets as a Threat to the Financial Security of the Global Economy," *European Research Studies Journal* XXIII, no. Special Issue 1 (2020): 335-55, <https://doi.org/10.35808/ersj/1764>.

³ Evgeny Sergeevich Streltsov et al., "The Economic Potential of the Brics Countries as a Challenge to Modern World Realities," *Propósitos y Representaciones* 9, no. SPE3 (2021), <https://doi.org/10.20511/pyr2021.v9nspe3.1143>.

BRICS telah menjadi salah satu aktor utama dalam merancang ulang tatanan ekonomi global melalui berbagai inisiatif strategis, termasuk pembentukan *New Development Bank* (NDB) dan diskusi mengenai penggunaan mata uang alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS⁴. Meskipun masih dalam tahap awal, inisiatif ini berpotensi besar dalam memengaruhi stabilitas keuangan global, termasuk negara-negara mitra dagang seperti Indonesia⁵. Sebagai salah satu mitra dagang utama BRICS, Indonesia mendapatkan peluang besar dalam meningkatkan ekspor dan investasi, namun juga terpapar pada tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan struktur keuangan global yang dipelopori oleh BRICS, seperti pergeseran nilai tukar rupiah dan ketergantungan terhadap pendanaan luar negeri⁶.

Hubungan ekonomi antara Indonesia dan BRICS memiliki dampak geopolitik yang signifikan. Indonesia, dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, memiliki kebebasan untuk menjalin hubungan strategis dengan BRICS tanpa terjebak dalam persaingan antara kekuatan besar⁷. Akan tetapi perbedaan kepentingan antar anggota BRICS serta tantangan internal seperti ketergantungan pada ekspor komoditas dapat menghambat efektivitas kerja sama dan memengaruhi Indonesia sebagai mitra dagang⁸. Oleh karena itu Indonesia perlu merumuskan strategi yang adaptif untuk mengoptimalkan manfaat kerja sama ekonomi dengan BRICS sambil memitigasi potensi risiko yang muncul⁹.

Penelitian sebelumnya telah mengkaji dinamika BRICS dalam konteks ekonomi global, namun belum banyak yang mengelaborasi

⁴ Laura Trajber Waisbich and Caio Borges, "The BRICS' New Development Bank at the Crossroads: Challenges for Building Development Cooperation in the Twenty-First Century," in *Governing China in the 21st Century*, 2020, 149-87, https://doi.org/10.1007/978-981-32-9644-2_7.

⁵ Casandra Aleksia and Arief Rizky Bakhtiar, "BRICS as New Alternatives in Reforming International Financial Institutions and Economic Partnerships," *Insignia: Journal of International Relations* 10, no. 2 (2023): 128, <https://doi.org/10.20884/1.ins.2023.10.2.9135>.

⁶ Marina Larionova and Andrey Shelepov, "BRICS, G20 and Global Economic Governance Reform," *International Political Science Review* 43, no. 4 (August 26, 2021): 512-30, <https://doi.org/10.1177/01925121211035122>.

⁷ Penny Radjendra et al., "Indonesia's Vision As Global Maritime Fulcrum: A Geopolitical Strategy To Address Geopolitical Shifts In Indo-Pacific," *Journal of Positive School Psychology* 6, no. 5 (2022): 8621-34, <http://journalppw.com>.

⁸ Bas Hooijmaaijers, "The Internal and External Institutionalization of the BRICS Countries: The Case of the New Development Bank," *International Political Science Review* 43, no. 4 (July 15, 2021): 481-94, <https://doi.org/10.1177/01925121211024159>.

⁹ Chanif Ainun Naim and Fitriatul Hasanah, "Deconstructing the Empire: BRICS and the Rise of a Multipolar World," *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 13, no. 1 (2024): 80, <https://doi.org/10.25077/ajis.13.1.80-90.2024>.

secara mendalam dampak strategisnya terhadap kebijakan ekonomi Indonesia¹⁰. Kesenjangan penelitian ini terletak pada kurangnya analisis spesifik terkait implikasi kebijakan BRICS terhadap stabilitas keuangan dan keamanan ekonomi Indonesia, terutama terkait potensi mata uang baru BRICS dan peran NDB dalam pendanaan proyek infrastruktur di negara berkembang¹¹. Penelitian ini fokus pada dampak kebijakan dan dinamika BRICS terhadap keamanan ekonomi Indonesia, terutama dalam aspek stabilitas nilai tukar rupiah, peran NDB dalam pendanaan proyek infrastruktur, serta dampak geopolitik yang muncul. Penelitian ini juga memberikan wawasan baru mengenai bagaimana Indonesia dapat merumuskan kebijakan yang adaptif dalam menghadapi perubahan besar dalam tatanan ekonomi global yang dipelopori BRICS.

Dinamika BRICS menciptakan peluang dan ancaman bagi keamanan ekonomi Indonesia, baik dalam aspek perdagangan, investasi, maupun stabilitas keuangan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana BRICS, dengan berbagai inisiatif dan kebijakan strategisnya, memengaruhi keamanan ekonomi Indonesia, terutama dalam hal fluktuasi nilai tukar rupiah, ketergantungan pada sumber pendanaan eksternal, serta potensi ketidakseimbangan dalam hubungan perdagangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan BRICS terhadap keamanan ekonomi Indonesia dan memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan.

Tinjauan Teoretis

BRICS

BRICS (Brazil, Russia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) telah muncul sebagai kekuatan ekonomi dan politik yang penting di kancah internasional. Awalnya disebut BRIC, akronim ini diperkenalkan oleh ekonom Goldman Sachs Jim O'Neill pada 2001 untuk menggambarkan empat negara dengan pertumbuhan PDB yang signifikan: Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok. Pada 2011, Afrika Selatan bergabung, memperluas akronim menjadi BRICS dan menambahkan dimensi lintas benua pada

¹⁰ Badar Alam Iqbal, "BRICS as a Driver of Global Economic Growth and Development," *Global Journal of Emerging Market Economies* 14, no. 1 (December 21, 2021): 7-8, <https://doi.org/10.1177/09749101211067096>.

¹¹ Suresh Nanwani, "The New Development Bank: Directions on Strategic Partnerships," *Global Policy* 15, no. 2 (2024): 434-42, <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13268>.

kelompok tersebut¹². Jumlah penduduk negara-negara BRICS sekitar 3,24 miliar orang, mewakili lebih dari 40% populasi dunia. Diperkirakan, pada 2026, populasi BRICS akan bertambah 625 juta orang, terutama di Tiongkok dan India. Proyeksi menunjukkan bahwa pada 2030, BRICS bisa menghasilkan lebih dari 50% PDB global¹³.

BRICS secara teratur mengadakan pertemuan tingkat tinggi yang menghasilkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kerja sama di bidang ekonomi, energi, keamanan pangan, dan ketahanan terhadap ancaman seperti kejahatan dunia maya dan narkoba. Salah satu capaian utama adalah pendirian *New Development Bank* (NDB) dan *Pool of Conditional Currency Reserves* pada 2015 untuk mengurangi ketergantungan pada dolar dalam transaksi antaranggota¹⁴. Secara bertahap, transaksi dalam BRICS kini 65% dilakukan dengan mata uang lokal, sebuah langkah menuju stabilitas finansial global yang lebih inklusif. NDB, sebagai bank pembangunan internasional, turut memainkan peran dalam mendukung negara-negara anggota, misalnya selama pandemi COVID-19 dengan menyediakan dukungan dana senilai 10 miliar dolar¹⁵.

Selain lima anggota inti, BRICS telah menarik minat negara lain. Tahun 2023, organisasi ini memperluas keanggotaannya dengan mengundang negara-negara seperti Mesir, Uni Emirat Arab, Iran, dan Ethiopia. Arab Saudi dan Argentina juga mempertimbangkan keanggotaan, meskipun Argentina akhirnya menarik diri karena alasan keuangan. Diskusi tentang calon anggota baru terus berlanjut, dan BRICS mempertimbangkan konsep keanggotaan bertingkat bagi negara-negara mitra yang berbagi visi serupa, termasuk Turki dan Serbia yang tertarik untuk bergabung.¹⁶

Semenjak pembentukannya, BRICS memiliki beberapa tujuan utama yang tercantum dalam pernyataan bersama para pemimpin: mendorong reformasi arsitektur keuangan global yang lebih adil, menghindari politik kekuasaan yang mengabaikan kedaulatan negara,

¹² Maria L. Lagutina, "BRICS in a World of Regions," *Third World Thematics: A TWQ Journal* 4, no. 6 (2019): 442–58, <https://doi.org/10.1080/23802014.2019.1643781>.

¹³ Iqbal, "BRICS as a Driver of Global Economic Growth and Development."

¹⁴ Hooijmaaijers, "The Internal and External Institutionalization of the BRICS Countries: The Case of the New Development Bank."

¹⁵ Roberto Luiz Silva and Thiago Ferreira Almeida, "The COVID-19 Response of BRICS and Multilateral Development Banks," *BRICS Law Journal* 10, no. 4 (December 6, 2023): 98–120, <https://doi.org/10.21684/2412-2343-2023-10-4-98-120>.

¹⁶ G. Rached and R. M. Rodrigues de Sá, "BRICS 15 Years On: Challenges and Opportunities for Emerging Countries in the Shifting Global Institutional Landscape," *Vestnik MGIMO-Universiteta* 17, no. 1 (2024): 26–45, <https://doi.org/10.24833/2071-8160-2024-1-94-26-45>.

dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan global¹⁷. Meskipun beberapa pihak mencoba membandingkan atau bahkan mengadu BRICS dengan NATO, BRICS tidak dirancang sebagai aliansi militer dan tidak memiliki angkatan bersenjata bersama. Sebaliknya, BRICS berfokus pada kerja sama ekonomi dan menjaga dialog politik yang konstruktif antara negara berkembang.¹⁸

Dinamika politik internal BRICS juga memengaruhi arah dan masa depannya. Misalnya, pergantian kepemimpinan di Brasil dan Afrika Selatan menunjukkan variasi komitmen terhadap BRICS. Brasil, di bawah Presiden Jair Bolsonaro, mengadopsi pendekatan yang lebih pro-Amerika dan mengkritisi pengaruh Tiongkok, meskipun Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Brasil. Di Afrika Selatan, setelah era Presiden Jacob Zuma yang sangat mendukung BRICS, komitmen negara tersebut terhadap proyek BRICS mulai berkurang. Di tengah perbedaan ini, Rusia, Tiongkok, dan India tetap menjadi pilar utama yang memperkuat interaksi lintas kawasan.¹⁹

Pertemuan BRICS+ dan BRICS *Outreach*, format tambahan yang melibatkan negara-negara non-anggota, merupakan bagian dari upaya BRICS untuk memperluas pengaruh dan menjalin kolaborasi dengan negara-negara yang memiliki visi serupa. Pada pertemuan tingkat tinggi di Kazan, Rusia pada Oktober 2024, negara-negara anggota BRICS akan bertemu dengan negara-negara mitra dalam format BRICS+ dan *Outreach* untuk membahas isu-isu penting kerja sama regional dan internasional yang saling menguntungkan. Dengan kepemimpinan bergilir yang mengatur agenda dan menyelenggarakan pertemuan, BRICS mengedepankan kesetaraan di antara anggotanya, tanpa struktur hierarkis yang kaku seperti sekretariat atau sekjen.²⁰

Sebagai sebuah platform yang tidak memiliki basis institusional formal, BRICS mengandalkan protokol dan keputusan hasil pertemuan tingkat tinggi untuk mengatur langkah-langkah integrasi. Perkembangan

¹⁷ Matthias Vom Hau, James Scott, and David Hulme, "Beyond the BRICs: Alternative Strategies of Influence in the Global Politics of Development," *European Journal of Development Research* 24, no. 2 (2012): 187–204, <https://doi.org/10.1057/ejdr.2012.6>.

¹⁸ Mikhail Troitskiy, "BRICS Approaches to Security Multilateralism," *ASPJ Africa & Francophonie*, 2015, 76–88, http://www.au.af.mil/au/afri/aspj/apjinternational/aspj_f/digital/pdf/articles/2015_2/troitskiy_e.pdf.

¹⁹ Mihika Chatterjee and Ikuno Naka, "Twenty Years of BRICS: Political and Economic Transformations through the Lens of Land," *Oxford Development Studies* 50, no. 1 (January 2, 2022): 2–13, <https://doi.org/10.1080/13600818.2022.2033191>.

²⁰ H. Zhao and D. Lesage, "Explaining BRICS Outreach: Motivations and Institutionalization," *International Organisations Research Journal* 15, no. 2 (2020): 68–91, <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2020-02-05>.

BRICS menunjukkan pentingnya struktur kerjasama yang fleksibel namun terkoordinasi dalam mengatasi tantangan global tanpa dominasi satu negara²¹. BRICS tetap berpegang pada prinsip multipolaritas, di mana negara-negara anggotanya mempertahankan kedaulatan dan bekerja sama dengan tidak berorientasi pada konfrontasi.²²

BRICS juga memiliki peran dalam menciptakan tatanan dunia multipolar yang menentang monopoli “barat” atau negara-negara “miliar emas”. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa negara-negara BRICS menolak sistem dunia unipolar yang berbasis pada “aturan” yang tidak jelas dan hanya menguntungkan kepentingan tertentu. Melalui BRICS, negara-negara berkembang berusaha membentuk sistem yang lebih adil, di mana semua negara, besar maupun kecil, memiliki hak dan peran yang sama.²³

Dampak Geopolitik terhadap Perekonomian Negara

Dampak geopolitik atau *geopolitical risk* (GPR) merupakan fenomena yang memengaruhi perekonomian global, khususnya di negara-negara berkembang seperti anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan). Negara-negara BRICS memiliki karakteristik ekonomi yang beragam, yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian mereka dalam menghadapi ketidakpastian geopolitik²⁴. Ketegangan politik, konflik internasional, serta kebijakan ekonomi yang berubah-ubah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor perbankan, pasar obligasi sovereign, konsumsi energi, dan bahkan sektor pariwisata. Penelitian mengenai dampak GPR terhadap ekonomi BRICS semakin penting karena ketidakpastian politik dan kebijakan ekonomi yang muncul akibat ketegangan geopolitik dapat memperburuk ketidakstabilan ekonomi. Meskipun di sisi lain dapat

²¹ Francesco Petrone, “BRICS and Civil Society: Challenges and Future Perspectives in a Multipolar World,” *International Organisations Research Journal* 16, no. 4 (December 27, 2021): 171-90, <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2021-04-08>.

²² Ogbajie Mercy Uzoma et al., “Beyond Economic Growth : BRICS as an Emerging Power and the Search for a Multipolar World Order” 4, no. 5 (2024): 153-57.

²³ Michael A. Peters, “The Emerging Multipolar World Order: A Preliminary Analysis,” *Educational Philosophy and Theory* 55, no. 14 (2023): 1653-63, <https://doi.org/10.1080/00131857.2022.2151896>.

²⁴ Oluwaseyi Ebenezer Olalere and Janine Mukuddem-Petersen, “Geopolitical Risk, Economic Policy Uncertainty, and Bank Stability in BRICS Countries,” *Cogent Economics and Finance* 12, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2290368>.

mendorong perubahan menuju strategi-strategi yang lebih adaptif, seperti diversifikasi energi dan kebijakan ekonomi yang lebih proaktif.²⁵

Salah satu dampak terbesar dari GPR adalah pengaruhnya terhadap stabilitas sektor perbankan di negara-negara BRICS. Penelitian yang melibatkan data 105 bank komersial dari lima negara BRICS antara 2009 hingga 2021 menunjukkan bahwa meningkatnya GPR dan ketidakpastian kebijakan ekonomi (EPU) dapat menurunkan stabilitas sektor perbankan. GPR, seperti ketegangan politik atau konflik internasional, cenderung menciptakan ketidakpastian ekonomi yang meningkatkan volatilitas pasar finansial dan risiko kredit. Dalam kondisi seperti itu, perbankan sering kali menghadapi kesulitan dalam menjaga kestabilan karena investor cenderung menarik dananya dari pasar yang berisiko tinggi. Ketidakpastian ini, pada gilirannya, menyebabkan peningkatan spread kredit dan penurunan rasio pinjaman terhadap simpanan di bank-bank komersial. Hal ini memberikan dampak negatif terhadap perekonomian secara keseluruhan karena perbankan adalah salah satu pilar utama dalam mendukung sektor riil²⁶.

Lebih lanjut, interaksi antara GPR dan ketidakpastian kebijakan ekonomi dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa kedua faktor ini memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap stabilitas perbankan. Ketidakpastian yang disebabkan oleh perubahan kebijakan ekonomi atau ketegangan geopolitik dapat memengaruhi keputusan investasi dan kebijakan moneter, yang pada akhirnya berdampak pada biaya modal dan likuiditas bank. Oleh karena itu kebijakan yang bertujuan mengurangi ketidakpastian geopolitik dan kebijakan ekonomi menjadi sangat penting dalam memperkuat sektor perbankan di negara-negara BRICS²⁷.

Selain sektor perbankan, GPR juga memengaruhi pasar obligasi *sovereign* yang merupakan indikator penting dalam menilai kesehatan fiskal dan kebijakan moneter suatu negara. Penelitian yang mengkaji hubungan antara GPR dan *sovereign bond yield* di BRICS menunjukkan bahwa ketidakpastian geopolitik dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam imbal hasil obligasi pemerintah, baik pada jangka pendek maupun jangka panjang. GPR, seperti perang atau ketegangan

²⁵ Umer Shahzad et al., "Connectedness between Geopolitical Risk, Financial Instability Indices and Precious Metals Markets: Novel Findings from Russia Ukraine Conflict Perspective," *Resources Policy* 80 (2023): 103190, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.103190>.

²⁶ Olalere and Mukuddem-Petersen, "Geopolitical Risk, Economic Policy Uncertainty, and Bank Stability in BRICS Countries."

²⁷ Olalere and Mukuddem-Petersen.

politik internasional, memicu lonjakan permintaan terhadap imbal hasil yang lebih tinggi dari investor yang cemas akan meningkatnya risiko²⁸.

Di kondisi yang lebih ekstrem, yaitu ketika tingkat suku bunga rendah dan terjadi penurunan aktivitas ekonomi global, ketidakpastian geopolitik justru menyebabkan penurunan imbal hasil obligasi pada jangka pendek dan menengah. Hal ini karena bank sentral cenderung menurunkan suku bunga untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di masa resesi. Di sisi lain, imbal hasil obligasi jangka panjang yang lebih dipengaruhi oleh preferensi investor global, cenderung meningkat saat ada ketegangan geopolitik besar. Investor lebih memilih obligasi pemerintah yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi sebagai kompensasi atas risiko politik yang lebih besar. Oleh karena itu, GPR berperan penting dalam menentukan keputusan investasi dan strategi perdagangan obligasi, baik dari perspektif domestik maupun global.

Dalam konteks energi, GPR juga berperan dalam menentukan kebijakan konsumsi energi di negara-negara BRICS. Penelitian yang menggunakan data 25 tahun dari negara-negara BRICS ini menunjukkan adanya pengaruh negatif GPR terhadap konsumsi energi fosil (FEC) dan total konsumsi energi (TEC). Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya ketidakpastian geopolitik cenderung mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan ketertarikan terhadap energi terbarukan. Ketegangan geopolitik, seperti konflik di Timur Tengah atau ketegangan antara negara besar, dapat memengaruhi pasokan energi global dan meningkatkan harga energi, yang pada gilirannya mendorong negara-negara BRICS untuk mencari alternatif energi yang lebih stabil dan ramah lingkungan²⁹.

Sebaliknya, penelitian juga menunjukkan adanya hubungan positif antara GPR dan konsumsi energi terbarukan (REC). Hal ini mengindikasikan bahwa, meskipun ketidakpastian geopolitik dapat mengganggu pasokan energi fosil, negara-negara BRICS mulai beralih ke sumber energi yang lebih terbarukan dan berkelanjutan. Investasi dalam energi terbarukan ini menjadi strategi mitigasi yang penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan energi yang rentan terhadap gangguan politik internasional. Negara-negara BRICS, dengan

²⁸ Sowmya Subramaniam, "Geopolitical Uncertainty and Sovereign Bond Yields of BRICS Economies," *Studies in Economics and Finance* 39, no. 2 (January 1, 2022): 311-30, <https://doi.org/10.1108/SEF-05-2021-0214>.

²⁹ Hua Li et al., "Analysing the Impact of Geopolitical Risk and Economic Policy Uncertainty on the Environmental Sustainability: Evidence from BRICS Countries," *Environmental Science and Pollution Research* 31, no. 34 (2024): 46148-62, <https://doi.org/10.1007/s11356-023-26553-w>.

dukungan kebijakan yang lebih proaktif terhadap energi terbarukan, dapat memperkuat ketahanan energi mereka dan meminimalkan dampak negatif dari ketegangan geopolitik³⁰.

Sektor pariwisata yang merupakan salah satu andalan perekonomian negara-negara BRICS, juga tidak luput dari dampak GPR. Penelitian yang mengkaji hubungan antara GPR dan kedatangan wisatawan menunjukkan bahwa ketidakpastian politik dan ekonomi dapat menurunkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke negara-negara BRICS. Ketegangan geopolitik, seperti perang atau ancaman terorisme menyebabkan penurunan kepercayaan wisatawan untuk mengunjungi suatu negara, yang berujung pada penurunan pendapatan dari sektor pariwisata. Dampak ini cenderung lebih terasa dalam jangka pendek, di mana perubahan tiba-tiba dalam keadaan politik dapat memengaruhi keputusan wisatawan secara langsung³¹.

Kebijakan ekonomi yang stabil dan mendukung sektor pariwisata dapat memperkuat daya tarik negara-negara BRICS sebagai destinasi wisata. Pemerintah BRICS perlu memerhatikan dampak dari GPR terhadap sektor ini dengan merumuskan kebijakan yang menjaga stabilitas politik dan menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi investasi di sektor pariwisata. Dengan mengurangi ketidakpastian dan menciptakan kebijakan yang mendukung keberlanjutan sektor pariwisata, negara-negara BRICS dapat memitigasi dampak negatif dari GPR dan memperkuat kontribusi sektor ini terhadap perekonomian mereka³².

Keamanan Ekonomi

Keamanan ekonomi adalah elemen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat modern, terutama dalam konteks kebutuhan dasar dan perlindungan di tempat kerja. Konsep ini mencakup jaminan dasar sosial berupa akses terhadap infrastruktur kebutuhan pokok seperti kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, informasi, serta perlindungan sosial, dan keamanan terkait pekerjaan. Keamanan ekonomi memungkinkan masyarakat untuk mengatasi ketidakpastian dan risiko dalam kehidupan sehari-hari, menyediakan kesempatan yang

³⁰ Li et al.

³¹ Geovanny Genaro Reivan-Ortiz et al., "Role of Geopolitical Risk, Currency Fluctuation, and Economic Policy on Tourist Arrivals: Temporal Analysis of BRICS Economies," *Environmental Science and Pollution Research* 30, no. 32 (2023): 78339–52, <https://doi.org/10.1007/s11356-023-27736-1>.

³² Reivan-Ortiz et al.

adil untuk mengembangkan keterampilan dan kapasitas mereka melalui pekerjaan yang layak³³.

Keamanan pendapatan menjadi salah satu fondasi utama dalam keamanan ekonomi. Konsep ini memastikan individu memiliki pendapatan yang mencukupi dan berkelanjutan, baik dari penghasilan langsung maupun dari jaminan sosial, dengan perlindungan terhadap risiko kehilangan penghasilan. Bentuk perlindungan seperti upah minimum, indeksasi upah, jaminan sosial yang komprehensif, dan sistem pajak progresif membantu menjamin stabilitas keuangan individu dan memungkinkan mereka untuk merencanakan masa depan yang lebih baik³⁴.

Keamanan representasi melibatkan hak individu dan kolektif untuk memiliki perwakilan yang bisa melindungi hak-hak pekerja dalam negosiasi dan pengambilan keputusan di tempat kerja. Dengan adanya perwakilan yang kuat, pekerja memiliki mekanisme untuk menyalurkan aspirasi mereka dan melindungi kepentingan mereka di lingkungan kerja³⁵. Keamanan pasar kerja adalah aspek lain yang mendukung keberlanjutan ekonomi. Hal ini mencakup tersedianya peluang kerja yang memadai dan beragam untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak. Melalui kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, pemerintah dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi³⁶.

Di samping itu, keamanan pekerjaan menyediakan perlindungan bagi pekerja dari risiko kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba, baik karena pemutusan hubungan kerja yang tidak adil maupun kegagalan usaha bagi pekerja mandiri. Regulasi yang ketat mengenai proses pemutusan hubungan kerja serta perlindungan terhadap karyawan yang dipecat

³³ Yaroslav Pushak et al., "Formation the System for Assessing the Economic Security of Enterprise in the Agricultural Sector," *Business: Theory and Practice* 22, no. 1 (2021): 80–90, <https://doi.org/10.3846/btp.2021.13013>.

³⁴ H. Xavier Jara and Maria Gabriela Palacio Ludeña, "Rethinking Social Assistance amid the COVID-19 Pandemic: Guaranteeing the Right to Income Security in Ecuador," *Journal of International Development* 36, no. 3 (2024): 1738–64, <https://doi.org/10.1002/jid.3878>.

³⁵ Olena Arefieva et al., "The Economic Security System in the Conditions of the Powers Transformation," *IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security* 21, no. 7 (2021): 35, <https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.7.4>.

³⁶ Oleksii Prokopenko et al., "Models of State Clusterisation Management, Marketing and Labour Market Management in Conditions of Globalization, Risk of Bankruptcy and Services Market Development," *International Journal of Computer Science & Network Security* 21, no. 12 (2021): 228–34, <https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.12.34>.

secara tidak adil membantu menjaga stabilitas pekerjaan dan memberi kepercayaan bagi pekerja dalam berkarier³⁷. Aspek lain dari keamanan ekonomi adalah keamanan kerja, yang memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Ini termasuk perlindungan terhadap kecelakaan, penyakit, stres, dan pelecehan di tempat kerja. Dengan adanya lingkungan kerja yang aman, pekerja dapat meningkatkan produktivitas tanpa takut akan risiko kesehatan jangka panjang³⁸.

Terakhir, keamanan reproduksi keterampilan memungkinkan pekerja untuk mengakses pelatihan dan pendidikan yang diperlukan untuk tetap relevan dalam pasar kerja yang terus berkembang. Hal ini mencakup akses ke pendidikan dasar dan pelatihan kejuruan, yang penting dalam membangun kapasitas tenaga kerja dan memungkinkan mereka untuk terus berkontribusi secara efektif dalam perekonomian.³⁹

Perkembangan dan Kebijakan Ekonomi di Indonesia

Ekonomi Indonesia telah mengalami dinamika yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Sebagai negara dengan populasi keempat terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar, didukung oleh sumber daya alam yang melimpah seperti batu bara, nikel, tembaga, gas alam, minyak bumi, besi, dan emas⁴⁰. Keberlimpahan sumber daya ini menjadikan Indonesia sebagai mitra penting bagi negara-negara besar, seperti Cina, yang merupakan importir terbesar batu bara Indonesia, diikuti oleh Jepang dan Korea Selatan. Akan tetapi, ketergantungan pada sektor sumber daya alam juga membawa tantangan tersendiri, terutama

³⁷ Fernando Almeida and José Duarte Santos, "The Effects of COVID-19 on Job Security and Unemployment in Portugal," *International Journal of Sociology and Social Policy* 40, no. 9–10 (2020): 995–1003, <https://doi.org/10.1108/IJSSP-07-2020-0291>.

³⁸ Aleksandra Webb, Ronald McQuaid, and Sigrid Rand, "Employment in the Informal Economy: Implications of the COVID-19 Pandemic," *International Journal of Sociology and Social Policy* 40, no. 9–10 (2020): 1005–19, <https://doi.org/10.1108/IJSSP-08-2020-0371>.

³⁹ Sara R. Farris and Mark Bergfeld, "Low-Skill No More! Essential Workers, Social Reproduction and the Legitimacy-Crisis of the Division of Labour," *Distinktion* 23, no. 2–3 (2022): 342–58, <https://doi.org/10.1080/1600910X.2022.2077400>.

⁴⁰ Haeruddin Saleh et al., "The Role of Natural and Human Resources on Economic Growth and Regional Development: With Discussion of Open Innovation Dynamics," *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 6, no. 4 (2020): 1–23, <https://doi.org/10.3390/joitmc6040103>.

dalam menghadapi fluktuasi harga komoditas global yang dapat berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional⁴¹.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -5,32% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi secara luas, termasuk peningkatan tingkat pengangguran, penurunan kesejahteraan masyarakat, dan penurunan daya beli akibat kesulitan mendapatkan pendapatan⁴². Data PDB Indonesia pada kuartal tersebut menunjukkan penurunan dari Rp 3.687,7 triliun pada harga saat ini menjadi Rp 2.589,6 triliun pada harga konstan dengan tahun dasar 2010. Penurunan ini menyoroti pentingnya kebijakan ekonomi yang adaptif dan responsif terhadap krisis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial⁴³.

Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi memainkan peran krusial sebagai modal untuk memulihkan dan mengembangkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Peningkatan investasi, baik dari dalam negeri maupun asing, dapat mempercepat implementasi pertumbuhan ekonomi⁴⁴. Selain itu, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya menyumbang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung pertumbuhan UMKM, seperti akses pembiayaan, pelatihan keterampilan, dan pemasaran, sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing dan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian nasional⁴⁵.

⁴¹ Mahjus Ekananda, "Role of Macroeconomic Determinants on the Natural Resource Commodity Prices: Indonesia Futures Volatility," *Resources Policy* 78 (2022): 102815, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102815>.

⁴² Susilawati Susilawati, Reinpal Falefi, and Agus Purwoko, "Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia," *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 3, no. 2 (2020): 1147-56, <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.954>.

⁴³ Marissa Malahayati, Toshihiko Masui, and Lukytawati Anggraeni, "An Assessment of the Short-Term Impact of COVID-19 on Economics and the Environment: A Case Study of Indonesia," *Economia* 22, no. 3 (2021): 291-313, <https://doi.org/10.1016/j.econ.2021.12.003>.

⁴⁴ Irfan Ridwan Maksum, Amy Yayuk Sri Rahayu, and Dhian Kusumawardhani, "A Social Enterprise Approach to Empowering Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia," *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 6, no. 3 (2020): 50, <https://doi.org/10.3390/JOITMC6030050>.

⁴⁵ Tulus Tambunan, "Micro, Small and Medium Enterprises in Times of Crisis:

Pemerintah Indonesia telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan fokus utama pada pengembangan infrastruktur. Tujuan utama dari pengembangan infrastruktur ini adalah untuk mengurangi kesenjangan pembangunan regional, terutama antara Pulau Jawa dan wilayah timur Indonesia seperti Papua⁴⁶. Meskipun wilayah timur Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar dan sumber daya alam yang melimpah, keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan utama dalam merealisasikan potensi tersebut. Pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti Trans Papua Toll Road, Pembangunan PLBN di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Mandalika International Circuit di Zona Ekonomi Khusus Lombok merupakan langkah strategis untuk mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan konektivitas antarwilayah⁴⁷.

Aspek hukum ekonomi juga memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan ekonomi Indonesia. Sistem hukum yang responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi diperlukan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan. Reformasi hukum ekonomi, yang mencakup pengembangan legislatif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, menjadi kebutuhan mendesak. Prinsip ekonomi rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang demokratis dan inklusif, yang tidak hanya fokus pada akumulasi modal tetapi juga pada redistribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial⁴⁸.

Negara kesejahteraan merupakan model pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan melalui peran negara yang lebih aktif dalam penyediaan layanan sosial universal dan komprehensif. Di Indonesia, konsep negara kesejahteraan tercermin dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui berbagai kebijakan dan inisiatif yang bertujuan untuk mengatasi masalah

Evidence from Indonesia," *Journal of the International Council for Small Business* 2, no. 4 (October 2, 2021): 278-302, <https://doi.org/10.1080/26437015.2021.1934754>.

⁴⁶ A. Jatayu et al., "Measuring Levels of Infrastructure Development and Its Impact on Regional Growth - Insights from Indonesia," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1353, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1353/1/012011>.

⁴⁷ Rodhatul Nasikhin, Muhammad Akib, and Agus Triono, "Sustainable Development Goals and Environmentally Sound Infrastructure Development in Indonesia," *Asian Journal of Legal Studies* 1, no. 1 (2022): 7-13, <https://doi.org/10.53402/ajls.v1i1.68>.

⁴⁸ Fajar Sugianto, Stevinell Mildova, and Felicia Christina Simeon, "Increasing Economic Performance Through the Rule of Law in Indonesia: Law and Economics Perspective" 140, no. 1 (2020): 92-99, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.019>.

sosial dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pengembangan kesejahteraan sosial ini melibatkan redistribusi sumber daya ekonomi, pengurangan kemiskinan, penyediaan asuransi sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat⁴⁹.

Pentingnya investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi tidak dapat diabaikan. Pemerintah Indonesia berusaha menciptakan iklim bisnis yang kondusif untuk menarik investasi, baik domestik maupun asing. Meskipun demikian, terdapat tantangan terkait ketergantungan pada investasi asing yang dapat mengikis kedaulatan ekonomi nasional⁵⁰. Pembatasan terhadap kepemilikan modal asing dalam sektor perbankan, misalnya, bertujuan untuk mencegah dominasi asing dan memastikan bahwa manfaat ekonomi lebih banyak dirasakan oleh rakyat Indonesia. Namun, kebijakan ini juga harus diimbangi dengan strategi yang mendorong investasi domestik untuk mengurangi ketergantungan pada modal asing dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional⁵¹.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yang mengandalkan data sekunder yang valid dan telah melalui kajian literatur. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan dengan topik BRICS dan keamanan ekonomi Indonesia. Pemilihan literatur dilakukan dengan kriteria relevansi, kredibilitas sumber, dan keterbaruan informasi, memastikan bahwa data yang digunakan dapat menggambarkan dinamika terkini dalam hubungan ekonomi Indonesia dengan BRICS. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Proses ini melibatkan pencarian, seleksi, dan analisis sumber-sumber yang dianggap paling relevan dan terpercaya untuk mendalami dampak BRICS terhadap ekonomi Indonesia. Literatur yang digunakan tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga kebijakan dan

⁴⁹ Rian Saputra and Silaas Oghenemaro Emovwodo, "Indonesia as Legal Welfare State: The Policy of Indonesian National Economic Law," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 1 (2022): 1-13, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i1.21>.

⁵⁰ Ali Sahab et al., "Indonesian Foreign Investment Policy under Oligarchic Economy: Striking Balance between Economic Nationalism and Liberalization," *Journal of the Asia Pacific Economy*, June 25, 2024, 1-19, <https://doi.org/10.1080/13547860.2024.2361575>.

⁵¹ Septiana Sari and Joko Setiyono, "The Development of Green Investment and Its Policies in The Regulation of The Indonesian Government," *Lambung Mangkurat Law Journal* 7, no. 2 (2022): 118-31, <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v7i2.349>.

geopolitik terkait hubungan internasional antara Indonesia dan negara-negara BRICS. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan pengorganisasian informasi, identifikasi pola-pola utama, dan penarikan kesimpulan yang menggambarkan implikasi dari dinamika BRICS terhadap ekonomi Indonesia. Keahlian penulis dalam menginterpretasikan teori dan data dari berbagai sumber berperan penting dalam memastikan validitas temuan.

Hasil Dan Pembahasan

Dalam beberapa dekade terakhir, BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang signifikan di dunia, dengan pengaruh yang semakin besar terhadap ekonomi global. Negara-negara anggota BRICS memiliki peran penting dalam perubahan peta ekonomi dunia, yang dapat memengaruhi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan memiliki ketergantungan besar terhadap perdagangan internasional. Oleh karena itu, dinamika ekonomi global, khususnya yang melibatkan BRICS, sangat memengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia.

Dampak Kerja Sama Ekonomi BRICS terhadap Keamanan Ekonomi Indonesia

Kerja sama ekonomi antar negara-negara BRICS semakin memperlihatkan peran penting dalam stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia. Negara-negara anggota BRICS memiliki potensi ekonomi yang besar dengan populasi yang terus berkembang, sumber daya alam yang melimpah, dan sektor industri yang semakin kuat. Dalam hal ini, Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan posisi ekonomi melalui kerja sama dengan negara-negara BRICS, baik dalam bentuk perdagangan maupun investasi.

Salah satu dampak positif yang dapat diperoleh Indonesia dari kerja sama ekonomi BRICS adalah peningkatan peluang ekspor⁵². Negara-negara BRICS, terutama China dan India, merupakan pasar yang sangat besar bagi komoditas utama Indonesia, seperti batu bara,

⁵² Chandrashekar Raghutla and Krishna Reddy Chittedi, "Is There an Export- or Import-Led Growth in Emerging Countries? A Case of BRICS Countries," *Journal of Public Affairs* 20, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.1002/pa.2074>.

minyak kelapa sawit, kopi, karet, dan produk pertanian lainnya. Dalam hal ini, Indonesia memiliki kesempatan untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan volume ekspor ke negara-negara BRICS. Akan tetapi, tantangan yang muncul adalah meningkatnya persaingan yang ketat dalam sektor perdagangan. Negara-negara BRICS, terutama China, tidak hanya menjadi pasar bagi komoditas Indonesia, tetapi juga merupakan produsen besar dalam berbagai sektor, seperti manufaktur, elektronik, dan barang-barang konsumen lainnya⁵³. Persaingan ini dapat menekan daya saing Indonesia dalam beberapa sektor, yang memerlukan langkah-langkah strategis untuk menjaga posisi Indonesia di pasar global.

Kerja sama ekonomi dengan negara-negara BRICS juga memberikan peluang bagi Indonesia untuk mendiversifikasi sumber-sumber pendapatan negara. Selain perdagangan, Indonesia juga dapat mengakses sumber pembiayaan dari institusi keuangan internasional yang didirikan oleh BRICS, seperti *New Development Bank* (NDB)⁵⁴. Dengan akses pembiayaan ini, Indonesia dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, yang pada gilirannya akan memperbaiki konektivitas antar wilayah dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Indonesia perlu berhati-hati dalam mengelola potensi ketergantungan pada pembiayaan luar negeri karena pengelolaan utang yang tidak hati-hati dapat berisiko terhadap stabilitas ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, Indonesia harus memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai oleh BRICS memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi perekonomian domestik.

Dampak Peluncuran Mata Uang Baru BRICS terhadap Nilai Tukar Rupiah

Salah satu aspek yang semakin menarik perhatian dalam dinamika BRICS adalah rencana untuk meluncurkan mata uang baru yang akan digunakan untuk transaksi antar negara-negara anggota BRICS. Mata uang ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS, yang selama ini mendominasi sistem perdagangan internasional. Peluncuran mata uang baru BRICS ini memiliki potensi dampak yang

⁵³ Yuki Fukuoka and Kiki Verico, "Indonesia-China Economic Relations in the Twenty-First Century: Opportunities and Challenges BT - Chinese Global Production Networks in ASEAN," ed. Young-Chan Kim (Cham: Springer International Publishing, 2016), 53-75, https://doi.org/10.1007/978-3-319-24232-3_4.

⁵⁴ Nanwani, "The New Development Bank: Directions on Strategic Partnerships."

signifikan terhadap nilai tukar rupiah dan stabilitas ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Indonesia sebagai negara berkembang sangat bergantung pada dolar AS dalam kegiatan perdagangan internasional dan transaksi ekonomi lainnya. Ketergantungan ini menyebabkan Indonesia rentan terhadap fluktuasi nilai tukar yang dipengaruhi oleh kebijakan moneter negara-negara besar, terutama kebijakan suku bunga dan kebijakan fiskal di Amerika Serikat⁵⁵. Dalam konteks ini, peluncuran mata uang baru BRICS dapat menambah ketidakpastian bagi Indonesia dalam hal stabilitas nilai tukar rupiah.

Meskipun demikian, dalam jangka panjang, peluncuran mata uang BRICS dapat menawarkan peluang bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS⁵⁶. Penggunaan mata uang BRICS untuk transaksi internasional antara negara-negara BRICS dan negara-negara mitra dapat membantu Indonesia untuk memperluas diversifikasi cadangan devisa dan mengurangi dampak volatilitas nilai tukar yang disebabkan oleh perubahan kebijakan AS. Untuk itu, Indonesia perlu mempersiapkan diri dengan melakukan kebijakan yang tepat dalam menghadapi transisi sistem keuangan ini, seperti memperkuat sistem moneter domestik dan meningkatkan kapasitas ekonomi untuk menangani perubahan global.

Penggunaan mata uang BRICS juga dapat mengurangi biaya transaksi internasional bagi Indonesia⁵⁷. Dalam transaksi perdagangan internasional, Indonesia seringkali harus melalui konversi mata uang yang melibatkan biaya tambahan dan risiko nilai tukar. Dengan adanya mata uang baru yang digunakan dalam perdagangan dengan negara-negara BRICS, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan mengurangi biaya transaksi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di pasar internasional.

⁵⁵ Siswanto Adil, Muhammad Irfan Fatoni, and Shivam Kakati, "The Effect of Dollar Exchange Rate of The Finance Performance in Indonesia: The Effect of Dollar Exchange Rate of The Finance Performance in Indonesia: The Effect of Dollar Exchange. Jo," *Journal of Islamic Economics Perspectives* 6, no. 2 (2024): 1–24.

⁵⁶ Aleksia and Bakhtiar, "BRICS as New Alternatives in Reforming International Financial Institutions and Economic Partnerships."

⁵⁷ Célestin Coquidé, José Lages, and Dima L. Shepelyansky, "Prospects of BRICS Currency Dominance in International Trade," *Applied Network Science* 8, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.1007/s41109-023-00590-3>.

Dampak Investasi Infrastruktur yang Didanai oleh *New Development Bank* (NDB)

Salah satu kontribusi besar yang dapat diberikan oleh BRICS terhadap perekonomian Indonesia adalah investasi dalam pembangunan infrastruktur. *New Development Bank* (NDB), yang didirikan oleh negara-negara BRICS telah berfokus pada pembiayaan proyek-proyek infrastruktur di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Indonesia memiliki kebutuhan yang sangat besar dalam hal pembangunan infrastruktur, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang, seperti Papua dan wilayah Indonesia timur.

Investasi infrastruktur yang didanai oleh NDB berpotensi memperbaiki konektivitas antar daerah yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan menurunkan biaya logistik⁵⁸. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang lebih baik, seperti jalan raya, pelabuhan, dan jaringan energi, Indonesia dapat mengakses pasar lebih mudah dan memperkuat daya saing produknya di pasar global. Infrastruktur yang lebih baik juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta membuka peluang baru dalam bidang perdagangan, industri, dan pariwisata.

Di sisi lain, Indonesia perlu berhati-hati dalam mengelola utang yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur. Meskipun investasi infrastruktur dapat memberikan manfaat jangka panjang, ketergantungan pada pinjaman luar negeri, terutama dari NDB dapat meningkatkan risiko utang luar negeri yang dapat membebani anggaran negara⁵⁹. Oleh karena itu, Indonesia harus memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur yang didanai oleh NDB memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian, serta memastikan pengelolaan utang yang transparan dan berkelanjutan.

Potensi Kerja Sama Strategis dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Global

Dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin

⁵⁸ Christopher Humphrey, "From Drawing Board to Reality Asian Infrastructure Investment Bank and New," 2020.

⁵⁹ João Pedro Braga, Bruno De Conti, and Guilherme Magacho, "The New Development Bank (Ndb) as a Mission-Oriented Institution for Just Ecological Transitions : A Case Study Approach to BRICS Sustainable Infrastructure Investment," *Revista Tempo Do Mundo*, no. n. 29 (2022): 139-64, <https://doi.org/10.38116/rtm29art5>.

kompleks, kerja sama strategis dengan negara-negara BRICS dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi Indonesia. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah ketidakpastian pasar global yang dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas, perubahan kebijakan ekonomi negara besar, dan ketegangan geopolitik yang terjadi di berbagai belahan dunia. Dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia dapat memperkuat kemitraannya dengan negara-negara BRICS untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan menghadapi ketidakpastian pasar global.

Negara-negara BRICS, terutama China dan India, memiliki pengalaman dan teknologi yang sangat dibutuhkan Indonesia dalam sektor energi terbarukan dan pembangunan teknologi ⁶⁰. Mengingat tantangan perubahan iklim yang dihadapi oleh dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk bekerja sama dengan negara-negara BRICS dalam mempercepat transisi menuju energi bersih dan terbarukan. Kerja sama ini tidak hanya akan membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga dapat membuka peluang baru dalam sektor teknologi dan pengembangan industri yang ramah lingkungan. Selain itu, kerja sama dengan negara-negara BRICS dalam sektor teknologi dan inovasi dapat mempercepat transformasi digital di Indonesia ⁶¹. Negara-negara BRICS, terutama China, telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengembangkan teknologi digital, kecerdasan buatan, dan *e-commerce*. Indonesia dapat memanfaatkan pengalaman dan teknologi ini untuk meningkatkan daya saing di sektor teknologi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis digital.

Strategi Indonesia Menghadapi Tantangan Geopolitik dan Ketidakpastian Ekonomi Global

Dalam beberapa dekade terakhir, tantangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global semakin meningkat yang memengaruhi kestabilan ekonomi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketidakpastian ini ditandai dengan fluktuasi harga komoditas, ketegangan

⁶⁰ Qinghua Fu et al., "Impact of Renewable Energy on Economic Growth and CO2 Emissions – Evidence from Brics Countries," *Processes* 9, no. 8 (2021), <https://doi.org/10.3390/pr9081281>.

⁶¹ Chi Wei Su et al., "Towards Achieving Sustainable Development: Role of Technology Innovation, Technology Adoption and Co2 Emission for Brics," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18, no. 1 (2021): 1–14, <https://doi.org/10.3390/ijerph18010277>.

antara kekuatan besar dunia, serta perubahan kebijakan ekonomi yang sering kali tidak dapat diprediksi. Di tengah dinamika ini, negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) muncul sebagai kelompok ekonomi yang memiliki pengaruh besar dalam merancang kebijakan global. Kerja sama ekonomi dengan BRICS dapat menawarkan peluang besar bagi Indonesia, tetapi juga membawa tantangan tersendiri yang harus dihadapi dengan strategi yang hati-hati.

1. Pentingnya Kerja Sama dengan BRICS di Tengah Ketidakpastian Global

Indonesia sebagai negara berkembang yang bergantung pada ekspor komoditas dan investasi asing, menghadapi ketidakpastian yang dihadirkan oleh ketegangan geopolitik serta volatilitas ekonomi global. Sebagai contoh, perang dagang antara Amerika Serikat dan China, perubahan kebijakan fiskal dan moneter di negara-negara maju, serta ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah dan Ukraina telah menciptakan dampak negatif terhadap perekonomian global yang merembet ke negara-negara berkembang. Dalam konteks ini, BRICS menawarkan sebuah peluang bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap kekuatan ekonomi tradisional, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.

BRICS, dengan populasi gabungan yang lebih dari 40% dari total penduduk dunia dan kontribusi lebih dari 25% terhadap PDB global, memiliki kapasitas untuk memberikan stabilitas bagi negara-negara anggotanya di tengah ketidakpastian global. Kerja sama Indonesia dengan BRICS membuka akses terhadap pasar yang lebih besar, serta peluang untuk menarik investasi dan teknologi dari negara-negara anggota, terutama China dan India. Akan tetapi, untuk memaksimalkan potensi tersebut, Indonesia perlu memiliki strategi yang matang dalam mengelola hubungan dengan negara-negara BRICS agar dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional.

2. Strategi Diversifikasi Ekonomi dan Penguatan Sumber Daya Manusia

Indonesia harus fokus pada diversifikasi ekonomi untuk mengurangi dampak ketergantungan pada negara-negara ekonomi maju dan menjaga ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Salah satu strategi yang dapat ditempuh adalah memperkuat sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk berkembang, seperti teknologi, energi

terbarukan, dan manufaktur berbasis teknologi tinggi. Negara-negara BRICS, khususnya China dan India, memiliki kapasitas teknologi dan modal yang dapat digunakan untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia. Misalnya, Indonesia dapat meningkatkan kerja sama dengan China dalam pengembangan infrastruktur digital dan energi terbarukan, serta memanfaatkan potensi pasar India yang besar untuk produk-produk manufaktur yang lebih bernilai tambah.

Diversifikasi ekonomi juga melibatkan pengembangan sektor-sektor baru yang tidak bergantung sepenuhnya pada komoditas tradisional seperti batu bara, kelapa sawit, dan karet. Indonesia harus berfokus pada inovasi dan pengembangan produk yang dapat bersaing di pasar global. Dalam hal ini, kerja sama dengan negara-negara BRICS bisa membuka jalan untuk memperkenalkan produk-produk Indonesia ke pasar internasional yang lebih luas, terutama di negara-negara yang merupakan anggota BRICS. Salah satunya adalah memperluas akses pasar Indonesia untuk produk-produk agribisnis dan manufaktur yang diproduksi dengan teknologi ramah lingkungan, yang sesuai dengan tren konsumsi berkelanjutan di dunia.

Penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor kunci dalam menghadapi tantangan ketidakpastian ekonomi global. Indonesia perlu meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja untuk mengimbangi kemajuan teknologi yang dimiliki oleh negara-negara BRICS. Negara-negara seperti China dan India memiliki sumber daya manusia yang unggul di bidang teknologi, dan Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan. Kerja sama dalam bidang pendidikan dan pelatihan tenaga kerja sangat penting agar Indonesia memiliki SDM yang kompeten dan mampu bersaing dalam ekonomi digital dan industri 4.0.

3. Mengelola Ketegangan Geopolitik dan Meningkatkan Diplomasi Ekonomi

Tantangan geopolitik global yang seringkali menimbulkan ketegangan antar negara besar juga memengaruhi kestabilan ekonomi Indonesia. Ketegangan antara Amerika Serikat dan China, misalnya, dapat memengaruhi perdagangan internasional dan arus investasi global. Di sisi lain, ketegangan geopolitik di kawasan Eropa Timur, Timur Tengah, dan Laut China Selatan juga memiliki dampak yang tidak kecil terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai negara yang memiliki posisi strategis di kawasan Asia Tenggara, Indonesia perlu memainkan peran diplomatik yang aktif untuk mengurangi dampak dari ketegangan ini.

Indonesia harus memperkuat diplomasi ekonomi dengan negara-negara BRICS yang bisa menjadi buffer terhadap gejolak geopolitik. Indonesia perlu menjaga hubungan baik dengan China yang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia, serta memperkuat hubungan dengan India dan Rusia. Hal ini akan membuka peluang untuk memperoleh investasi, akses pasar, dan kolaborasi teknologi yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Selain itu, Indonesia perlu memperkuat hubungan dengan negara-negara BRICS di luar aspek ekonomi dengan berfokus pada kerja sama politik dan keamanan yang saling menguntungkan.

Dengan menjaga hubungan baik dengan negara-negara BRICS, Indonesia dapat memanfaatkan kekuatan kolektif negara-negara tersebut untuk mengurangi ketergantungan pada negara-negara besar lain yang mungkin memiliki agenda politik dan ekonomi yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan Indonesia. Kerja sama yang baik dengan BRICS juga akan meningkatkan posisi Indonesia dalam organisasi internasional, seperti G20, serta memperkuat suara Indonesia dalam pembahasan isu-isu global yang berpengaruh pada keamanan dan stabilitas ekonomi internasional.

4. Meningkatkan Ketahanan Keuangan dan Mengurangi Ketergantungan pada Dolar AS

Salah satu dampak besar dari ketidakpastian ekonomi global adalah fluktuasi nilai tukar mata uang yang sering dipicu oleh perubahan kebijakan moneter di negara-negara besar, terutama Amerika Serikat. Ketergantungan Indonesia pada dolar AS dalam perdagangan internasional dan pembiayaan utang luar negeri meningkatkan kerentanannya terhadap gejolak nilai tukar. Dalam hal ini, kerja sama dengan negara-negara BRICS yang sedang mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional dapat membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada dolar AS.

Indonesia dapat memanfaatkan kerja sama ini untuk memperkuat ketahanan keuangan dengan mengurangi risiko terkait fluktuasi nilai tukar. Misalnya, Indonesia bisa bekerja sama dengan BRICS dalam mengembangkan sistem pembayaran alternatif yang mengurangi penggunaan dolar dalam transaksi perdagangan, baik antar negara anggota BRICS maupun dengan negara-negara lain. Selain itu, Indonesia juga bisa memperkuat cadangan devisanya dengan berinvestasi di mata uang negara-negara BRICS yang dapat membantu menstabilkan nilai tukar rupiah dan mengurangi kerentanannya terhadap tekanan eksternal.

Penutup

Dinamika ekonomi BRICS memiliki dampak kompleks terhadap keamanan ekonomi Indonesia. Kerja sama dengan negara-negara BRICS menawarkan peluang signifikan, seperti peningkatan perdagangan, diversifikasi pendapatan, dan akses pembiayaan infrastruktur melalui *New Development Bank* (NDB). Akan tetapi, tantangan seperti persaingan perdagangan, volatilitas nilai tukar rupiah akibat peluncuran mata uang baru BRICS, serta risiko ketergantungan pada pembiayaan asing memerlukan mitigasi yang cermat.

Untuk itu, pemerintah Indonesia perlu mengadopsi strategi yang terarah, seperti memperkuat fundamental ekonomi domestik guna menghadapi volatilitas nilai tukar, serta mendorong diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional. Skala prioritas kebijakan harus mencakup peningkatan kapasitas industri berbasis teknologi dan energi terbarukan, mengingat sektor ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing global sekaligus mendukung keamanan ekonomi nasional. Selain itu, kerangka kerja sama dengan BRICS harus difokuskan pada pembiayaan infrastruktur strategis yang berdampak langsung pada peningkatan produktivitas nasional.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting pada literatur dengan menawarkan analisis empiris tentang implikasi kerja sama internasional terhadap stabilitas ekonomi negara berkembang. Secara praktis, penelitian ini menyarankan pendekatan kebijakan berbasis risiko untuk memanfaatkan peluang BRICS sembari mengelola dampaknya. Studi lanjutan tentang terkait strategi mitigasi risiko volatilitas nilai tukar akibat peluncuran mata uang baru BRICS, serta potensi kerja sama strategis dalam sektor teknologi dan energi perlu dilakukan untuk penelitian lebih lanjut.

Penelitian lainnya juga diperlukan untuk mengkaji dampak sosial dari investasi infrastruktur yang didanai oleh NDB terhadap keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Solusi aplikatif, seperti penguatan kerangka kebijakan fiskal dan moneter dalam menghadapi dinamika BRICS dapat menjadi langkah berikutnya dalam memahami dan mengelola dampak hubungan ini secara lebih menyeluruh.

Daftar Pustaka

- Adil, Siswanto, Muhammad Irfan Fatoni, and Shivam Kakati. "The Effect of Dollar Exchange Rate of The Finance Performance in Indonesia: The Effect of Dollar ExcAdil, S., Fatoni, M. I., & Kakati, S. (2024). The Effect of Dollar Exchange Rate of The Finance Performance in Indonesia: The Effect of Dollar Exchange. Jo." *Journal of Islamic Economics Perspectives* 6, no. 2 (2024): 1-24.
- Aleksia, Casandra, and Arief Rizky Bakhtiar. "BRICS as New Alternatives in Reforming International Financial Institutions and Economic Partnerships." *Insignia: Journal of International Relations* 10, no. 2 (2023): 128. <https://doi.org/10.20884/1.ins.2023.10.2.9135>.
- Almeida, Fernando, and José Duarte Santos. "The Effects of COVID-19 on Job Security and Unemployment in Portugal." *International Journal of Sociology and Social Policy* 40, no. 9-10 (2020): 995-1003. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-07-2020-0291>.
- Arefieva, Olena, Svitlana Tulchynska, Olha Popelo, Serhii Arefiev, and Tetiana Tkachenko. "The Economic Security System in the Conditions of the Powers Transformation." *IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security* 21, no. 7 (2021): 35. <https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.7.4>.
- Braga, João Pedro, Bruno De Conti, and Guilherme Magacho. "The New Development Bank (Ndb) as a Mission-Oriented Institution for Just Ecological Transitions : A Case Study Approach to BRICS Sustainable Infrastructure Investment." *Revista Tempo Do Mundo*, no. n. 29 (2022): 139-64. <https://doi.org/10.38116/rtm29art5>.
- Chatterjee, Mihika, and Ikuno Naka. "Twenty Years of BRICS: Political and Economic Transformations through the Lens of Land." *Oxford Development Studies* 50, no. 1 (January 2, 2022): 2-13. <https://doi.org/10.1080/13600818.2022.2033191>.
- Coquidé, Célestin, José Lages, and Dima L. Shepelyansky. "Prospects of BRICS Currency Dominance in International Trade." *Applied Network Science* 8, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.1007/s41109-023-00590-3>.
- Ekananda, Mahjus. "Role of Macroeconomic Determinants on the Natural Resource Commodity Prices: Indonesia Futures Volatility." *Resources Policy* 78 (2022): 102815. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102815>.
- Farris, Sara R., and Mark Bergfeld. "Low-Skill No More! Essential Workers, Social Reproduction and the Legitimacy-Crisis of the Division of

- Labour." *Distinktion* 23, no. 2-3 (2022): 342-58. <https://doi.org/10.1080/1600910X.2022.2077400>.
- Fu, Qinghua, Susana Álvarez-Otero, Muhammad Safdar Sial, Ubaldo Comite, Pengfei Zheng, Sarminah Samad, and Judit Oláh. "Impact of Renewable Energy on Economic Growth and CO2 Emissions – Evidence from Brics Countries." *Processes* 9, no. 8 (2021). <https://doi.org/10.3390/pr9081281>.
- Fukuoka, Yuki, and Kiki Verico. "Indonesia–China Economic Relations in the Twenty-First Century: Opportunities and Challenges BT - Chinese Global Production Networks in ASEAN." edited by Young-Chan Kim, 53-75. Cham: Springer International Publishing, 2016. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24232-3_4.
- Hau, Matthias Vom, James Scott, and David Hulme. "Beyond the BRICs: Alternative Strategies of Influence in the Global Politics of Development." *European Journal of Development Research* 24, no. 2 (2012): 187-204. <https://doi.org/10.1057/ejdr.2012.6>.
- Hooijmaaijers, Bas. "The Internal and External Institutionalization of the BRICS Countries: The Case of the New Development Bank." *International Political Science Review* 43, no. 4 (July 15, 2021): 481-94. <https://doi.org/10.1177/01925121211024159>.
- Humphrey, Christopher. "From Drawing Board to Reality Asian Infrastructure Investment Bank and New," 2020.
- Iqbal, Badar Alam. "BRICS as a Driver of Global Economic Growth and Development." *Global Journal of Emerging Market Economies* 14, no. 1 (December 21, 2021): 7-8. <https://doi.org/10.1177/09749101211067096>.
- Jara, H. Xavier, and María Gabriela Palacio Ludeña. "Rethinking Social Assistance amid the COVID-19 Pandemic: Guaranteeing the Right to Income Security in Ecuador." *Journal of International Development* 36, no. 3 (2024): 1738-64. <https://doi.org/10.1002/jid.3878>.
- Jatayu, A., S. Zahara, R. A.W.D. Syafitri, S. Dafadhilah, D. R. Roosyanindhita, M. I. Sidiq, and M. S. Priambodo. "Measuring Levels of Infrastructure Development and Its Impact on Regional Growth - Insights from Indonesia." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1353, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1353/1/012011>.
- Lagutina, Maria L. "BRICS in a World of Regions." *Third World Thematics: A TWQ Journal* 4, no. 6 (2019): 442-58. <https://doi.org/10.1080/23802014.2019.1643781>.
- Larionova, Marina, and Andrey Shelepov. "BRICS, G20 and Global Economic Governance Reform." *International Political Science*

- Review* 43, no. 4 (August 26, 2021): 512-30. <https://doi.org/10.1177/01925121211035122>.
- Li, Hua, Muhammad Sibte Ali, Bakhtawer Ayub, and Irfan Ullah. "Analysing the Impact of Geopolitical Risk and Economic Policy Uncertainty on the Environmental Sustainability: Evidence from BRICS Countries." *Environmental Science and Pollution Research* 31, no. 34 (2024): 46148-62. <https://doi.org/10.1007/s11356-023-26553-w>.
- Maksum, Irfan Ridwan, Amy Yayuk Sri Rahayu, and Dhian Kusumawardhani. "A Social Enterprise Approach to Empowering Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia." *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 6, no. 3 (2020): 50. <https://doi.org/10.3390/JOITMC6030050>.
- Malahayati, Marissa, Toshihiko Masui, and Lukyutawati Anggraeni. "An Assessment of the Short-Term Impact of COVID-19 on Economics and the Environment: A Case Study of Indonesia." *Economia* 22, no. 3 (2021): 291-313. <https://doi.org/10.1016/j.econ.2021.12.003>.
- Naim, Chanif Ainun, and Fitriatul Hasanah. "Deconstructing the Empire: BRICS and the Rise of a Multipolar World." *Andalas Journal of International Studies (AJIS)* 13, no. 1 (2024): 80. <https://doi.org/10.25077/ajis.13.1.80-90.2024>.
- Nanwani, Suresh. "The New Development Bank: Directions on Strategic Partnerships." *Global Policy* 15, no. 2 (2024): 434-42. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13268>.
- Nasikhin, Rodhatul, Muhammad Akib, and Agus Triono. "Sustainable Development Goals and Environmentally Sound Infrastructure Development in Indonesia." *Asian Journal of Legal Studies* 1, no. 1 (2022): 7-13. <https://doi.org/10.53402/ajls.v1i1.68>.
- Olalere, Oluwaseyi Ebenezer, and Janine Mukuddem-Petersen. "Geopolitical Risk, Economic Policy Uncertainty, and Bank Stability in BRICS Countries." *Cogent Economics and Finance* 12, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.1080/23322039.2023.2290368>.
- Peters, Michael A. "The Emerging Multipolar World Order: A Preliminary Analysis." *Educational Philosophy and Theory* 55, no. 14 (2023): 1653-63. <https://doi.org/10.1080/00131857.2022.2151896>.
- Petrone, Francesco. "BRICS and Civil Society: Challenges and Future Perspectives in a Multipolar World." *International Organisations Research Journal* 16, no. 4 (December 27, 2021): 171-90. <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2021-04-08>.
- Prokopenko, Oleksii, Olga Martyn, Olha Bilyk, Olga Vivcharuk, and Mykola Zos-Kior. "Models of State Clusterisation Management,

- Marketing and Labour Market Management in Conditions of Globalization, Risk of Bankruptcy and Services Market Development." *International Journal of Computer Science & Network Security* 21, no. 12 (2021): 228-34. <https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.12.34>.
- Pushak, Yaroslav, Volodymyr Lagodiienko, Nataliya Basiurkina, Valerii Nemchenko, and Nataliia Lagodiienko. "Formation the System for Assessing the Economic Security of Enterprise in the Agricultural Sector." *Business: Theory and Practice* 22, no. 1 (2021): 80-90. <https://doi.org/10.3846/btp.2021.13013>.
- Rached, G., and R. M. Rodrigues de Sá. "BRICS 15 Years On: Challenges and Opportunities for Emerging Countries in the Shifting Global Institutional Landscape." *Vestnik MGIMO-Universiteta* 17, no. 1 (2024): 26-45. <https://doi.org/10.24833/2071-8160-2024-1-94-26-45>.
- Radjendra, Penny, Makarim Wibisono, Joni Mahroza, and Zainal Abidin Shabuddin. "Indonesia's Vision As Global Maritime Fulcrum: A Geopolitical Strategy To Address Geopolitical Shifts In Indo-Pacific." *Journal of Positive School Psychology* 6, no. 5 (2022): 8621-34. <http://journalppw.com>.
- Raghutla, Chandrashekar, and Krishna Reddy Chittedi. "Is There an Export- or Import-Led Growth in Emerging Countries? A Case of BRICS Countries." *Journal of Public Affairs* 20, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.1002/pa.2074>.
- Redo, Magdalena, and Marta Gebaska. "Globalization in Growing Financial Markets as a Threat to the Financial Security of the Global Economy." *European Research Studies Journal* XXIII, no. Special Issue 1 (2020): 335-55. <https://doi.org/10.35808/ersj/1764>.
- Reivan-Ortiz, Geovanny Genaro, Phan The Cong, Wing Keung Wong, Anis Ali, Huong Tran Thi Thu, and Shamim Akhter. "Role of Geopolitical Risk, Currency Fluctuation, and Economic Policy on Tourist Arrivals: Temporal Analysis of BRICS Economies." *Environmental Science and Pollution Research* 30, no. 32 (2023): 78339-52. <https://doi.org/10.1007/s11356-023-27736-1>.
- Sahab, Ali, Demas Nauvarian, Naomi Devi Larasati, and Citra Hennida. "Indonesian Foreign Investment Policy under Oligarchic Economy: Striking Balance between Economic Nationalism and Liberalization." *Journal of the Asia Pacific Economy*, June 25, 2024, 1-19. <https://doi.org/10.1080/13547860.2024.2361575>.
- Saleh, Haeruddin, Batara Surya, Despry Nur Annisa Ahmad, and Darmawati Manda. "The Role of Natural and Human Resources on

- Economic Growth and Regional Development: With Discussion of Open Innovation Dynamics." *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* 6, no. 4 (2020): 1–23. <https://doi.org/10.3390/joitmc6040103>.
- Saputra, Rian, and Silaas Oghenemaro Emovwodo. "Indonesia as Legal Welfare State: The Policy of Indonesian National Economic Law." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 1 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i1.21>.
- Sari, Septiana, and Joko Setiyono. "The Development of Green Investment and Its Policies in The Regulation of The Indonesian Government." *Lambung Mangkurat Law Journal* 7, no. 2 (2022): 118–31. <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v7i2.349>.
- Shahzad, Umer, Kamel Si Mohammed, Sunil Tiwari, Joanna Nakonieczny, and Renata Nesterowicz. "Connectedness between Geopolitical Risk, Financial Instability Indices and Precious Metals Markets: Novel Findings from Russia Ukraine Conflict Perspective." *Resources Policy* 80 (2023): 103190. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.103190>.
- Shynkar, Svitlana, Zoriana Gontar, Mariya Dubyna, Daria Nasypaiko, and Mariya Fleychuk. "Assessment of Economic Security of Enterprises: Theoretical and Methodological Aspects." *Business: Theory and Practice* 21, no. 1 (2020): 261–71. <https://doi.org/10.3846/btp.2020.11573>.
- Silva, Roberto Luiz, and Thiago Ferreira Almeida. "The COVID-19 Response of BRICS and Multilateral Development Banks." *BRICS Law Journal* 10, no. 4 (December 6, 2023): 98–120. <https://doi.org/10.21684/2412-2343-2023-10-4-98-120>.
- Streltsov, Evgeny Sergeevich, Aleksandr Aleksandrovich Rozhin, Sh. S. Vosiev, and Sergey Nikolaevich Kosnikov. "The Economic Potential of the Brics Countries as a Challenge to Modern World Realities." *Propósitos y Representaciones* 9, no. SPE3 (2021). <https://doi.org/10.20511/pyr2021.v9nspe3.1143>.
- Su, Chi Wei, Yannong Xie, Sadaf Shahab, Ch Muhammad Nadeem Faisal, Muhammad Hafeez, and Ghulam Muhammad Qamri. "Towards Achieving Sustainable Development: Role of Technology Innovation, Technology Adoption and Co2 Emission for Brics." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 18, no. 1 (2021): 1–14. <https://doi.org/10.3390/ijerph18010277>.
- Subramaniam, Sowmya. "Geopolitical Uncertainty and Sovereign Bond Yields of BRICS Economies." *Studies in Economics and Finance* 39, no.

- 2 (January 1, 2022): 311–30. <https://doi.org/10.1108/SEF-05-2021-0214>.
- Sugianto, Fajar, Stevinell Mildova, and Felicia Christina Simeon. "Increasing Economic Performance Through the Rule of Law in Indonesia: Law and Economics Perspective" 140, no. Icleh (2020): 92–99. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.019>.
- Susilawati, Susilawati, Reinpal Falefi, and Agus Purwoko. "Impact of COVID-19's Pandemic on the Economy of Indonesia." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 3, no. 2 (2020): 1147–56. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.954>.
- Tambunan, Tulus. "Micro, Small and Medium Enterprises in Times of Crisis: Evidence from Indonesia." *Journal of the International Council for Small Business* 2, no. 4 (October 2, 2021): 278–302. <https://doi.org/10.1080/26437015.2021.1934754>.
- Troitskiy, Mikhail. "BRICS Approaches to Security Multilateralism." *ASPJ Africa & Francophonie*, 2015, 76–88. http://www.au.af.mil/au/afri/aspj/apjinternational/aspj_f/digital/pdf/articles/2015_2/troitskiy_e.pdf.
- Uzoma, Ogbajie Mercy, Ogbajie Delight Chibuzor, Rosemary Eberechi Obi, Bello Kehinde Oluwafemi, Chukwujama Ginika Mary-cynthia, Chinyere Blessing Offorah, Odubiyi Michael Adams, et al. "Beyond Economic Growth : BRICS as an Emerging Power and the Search for a Multipolar World Order" 4, no. 5 (2024): 153–57.
- Waisbich, Laura Trajber, and Caio Borges. "The BRICS' New Development Bank at the Crossroads: Challenges for Building Development Cooperation in the Twenty-First Century." In *Governing China in the 21st Century*, 149–87, 2020. https://doi.org/10.1007/978-981-32-9644-2_7.
- Webb, Aleksandra, Ronald McQuaid, and Sigrid Rand. "Employment in the Informal Economy: Implications of the COVID-19 Pandemic." *International Journal of Sociology and Social Policy* 40, no. 9–10 (2020): 1005–19. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-08-2020-0371>.
- Zhao, H., and D. Lesage. "Explaining BRICS Outreach: Motivations and Institutionalization." *International Organisations Research Journal* 15, no. 2 (2020): 68–91. <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2020-02-05>.

Faktor Penentu Ketahanan Ekonomi UMKM Jakarta dalam Menembus Pasar Global

Key Determinants of Jakarta MSMEs' Economic Resilience in Entering the Global Market

Elisabeth Ratu Rante Allo¹, Ruslan Prijadi², Chotib³

School of Strategic and Global Studies Universitas Indonesia^{1,3}

Faculty of Economics and Business Universitas Indonesia²

Email: elisabethratuukm@gmail.com, ruslan.prijadi@ui.ac.id,
chotib@hotmail.com

Article Info

Received: September 18, 2024

Revised: November 6, 2024

Accepted: December 4, 2024

Abstrak: *This study aims to analyze the key factors that contribute to the economic resilience of MSMEs, enabling them to enter the global market. A qualitative approach was employed, using in-depth interviews with three representatives of MSMEs from the Jakarta Entrepreneur program who have successfully entered international markets. The narrative interview data were analyzed using Dedoose software. The findings reveal several factors that support MSMEs ability to penetrate international markets and strengthen their economic resilience, including collaboration, training, registration, marketing, financial reporting, coaching, and learning from entrepreneurial experiences. Additionally, broad insights and knowledge transfer processes were significant contributors to their resilience.*

Keywords: *Economic Resilience; MSMEs; Jakarta Entrepreneur; Go International; Dedoose*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kunci yang berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi UMKM, sehingga memungkinkan mereka memasuki pasar global. Pendekatan kualitatif digunakan, dengan menggunakan wawancara mendalam dengan tiga perwakilan UMKM dari program Wirausaha Jakarta yang telah berhasil memasuki pasar internasional. Data wawancara naratif dianalisis menggunakan perangkat lunak Dedoose. Temuan penelitian mengungkapkan beberapa faktor yang mendukung kemampuan UMKM untuk menembus pasar internasional dan memperkuat ketahanan ekonomi mereka, termasuk kolaborasi,*



pelatihan, pendaftaran, pemasaran, pelaporan keuangan, pembinaan, dan pembelajaran dari pengalaman kewirausahaan. Selain itu, wawasan luas dan proses transfer pengetahuan ditemukan sebagai kontributor signifikan terhadap ketahanan mereka.

Kata kunci: *Ketahanan Ekonomi; UMKM; Jakarta Entrepreneur; Go International; Dedoose.*

Pendahuluan

Kajian tentang UMKM di Indonesia telah banyak dilakukan dari berbagai perspektif. Tambunan¹ mengungkapkan bahwa UMKM di Indonesia menghadapi tantangan dalam hal akses pembiayaan, teknologi, dan pasar. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hanya 30% UMKM yang memiliki akses ke pembiayaan formal. Sejalan dengan itu, Irjayanti dan Azis² mengidentifikasi bahwa kendala utama pengembangan UMKM di Jakarta meliputi keterbatasan modal kerja, kesulitan pemasaran, dan rendahnya adopsi teknologi digital.

Dalam konteks digitalisasi, Setyowati dan Kurniawan³ menemukan bahwa hanya 22% UMKM di Jakarta yang telah mengadopsi platform digital dalam operasional bisnisnya. Transformasi digital UMKM terhambat oleh kurangnya literasi digital dan keterbatasan infrastruktur. Namun demikian, UMKM yang berhasil bertransformasi digital menunjukkan peningkatan pendapatan rata-rata sebesar 35% (Prasetyo & Kistanti, 2020).

Dari sisi kebijakan, Nugroho dan Susilo⁴ menganalisis efektivitas regulasi UMKM di Indonesia dan menemukan bahwa implementasi kebijakan masih belum optimal karena koordinasi antar lembaga yang lemah. Studi ini diperkuat oleh temuan Winarno dan Wijijayanti⁵ yang mengungkapkan bahwa orientasi kewirausahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM, namun dukungan kebijakan pemerintah belum sepenuhnya efektif.

¹ T. Tambunan, "Recent Evidence of the Development of Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia," *Journal of Global Entrepreneurship Research* 9, no. 1 (2019): 1-15.

² M. Irjayanti and A. M. Azis, "Barrier Factors and Potential Solutions for Indonesian SMEs," *Procedia Economics and Finance* 4 (2021): 3-12.

³ R. Setyowati and B. Kurniawan, "Digital Transformation of MSMEs in Jakarta: Challenges and Opportunities," *Journal of Economics and Business* 3, no. 2 (2020): 636-44.

⁴ M. A. Nugroho and Y. S. Susilo, "Policy Analysis of SME Development in Indonesia: A Study of Government Regulations," *International Journal of Economics and Business Administration* 7, no. 4 (2019): 50-63.

⁵ B. Winarno and T. Wijijayanti, "The Influence of Entrepreneurial Orientation on SME Business Performance in Indonesia," *ASEAN Marketing Journal* 10, no. 2 (2018): 89-102.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap UMKM. Rosita (2020) melaporkan bahwa 87% UMKM di Jakarta mengalami penurunan pendapatan selama pandemi. Pakpahan⁶ menambahkan bahwa sektor UMKM yang paling terdampak adalah sektor makanan dan minuman, dengan penurunan omset hingga 70%.

Dalam hal akses pembiayaan, Susilo⁷ mengidentifikasi bahwa hanya 25% UMKM di Jakarta yang memiliki akses ke kredit perbankan. Hakim dan Oktaviani⁸ menemukan korelasi positif antara inklusi keuangan dan keberlanjutan UMKM, dengan tingkat survival rate mencapai 65% pada UMKM yang memiliki akses pembiayaan formal.

Terkait daya saing, Tambunan⁹ menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas SDM dan adopsi teknologi untuk meningkatkan competitiveness UMKM. Hermanto dan Suryanto¹⁰ mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing UMKM di Jakarta, meliputi inovasi produk (40%), efisiensi operasional (30%), dan akses pasar (30%).

Jakarta Entrepreneur merupakan program yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Khusus Jakarta melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPPK UKM) Jakarta, untuk memajukan UMKM yang terdaftar di dalamnya. Tujuan dari program tersebut adalah agar UMKM mampu menjalankan bisnisnya dengan baik, dapat naik kelas secara bertahap dari pemula, menjadi kelas menengah, hingga kelas maju bahkan masuk ke pasar global (*go international*). Dari 345.000 lebih UMKM yang terdaftar di web *Jakarta Entrepreneur*, baru sedikit yang mampu naik kelas masuk ke pasar global. Meski semua UMKM Jakarta *Entrepreneur* memiliki kesempatan dan fasilitas yang sama, namun belum semua memanfaatkan fasilitas tersebut karena berbagai hal.

Ketahanan ekonomi pelaku Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) sangat dipengaruhi berbagai aspek penting diantaranya bantuan

⁶ A. K. Pakpahan, "COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 16, no. 1 (2020): 59–64.

⁷ Y. S. Susilo, "Strategi Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 10, no. 1 (2019): 91–103.

⁸ L. Hakim and F. Oktaviani, "Financial Inclusion and MSMEs Sustainability: Evidence from Indonesia," *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 8, no. 3 (2021): 1249–59.

⁹ T. T. H. Tambunan, "Development and Some Constraints of SME in Indonesia," *Indonesian Journal of Economics and Development** 1, no. 2 (2021): 36–57.

¹⁰ B. Hermanto and S. Suryanto, "Determinants of SME Competitiveness in Indonesia: An Empirical Study," *International Journal of Scientific and Technology Research* 9, no. 3 (2020): 1830–36.

dan fasilitas yang diberikan dinas terkait yang meliputi : pendampingan, pelatihan, perizinan, dan pemasaran. UMKM juga melakukan kolaborasi dalam meningkatkan keuntungan penjualannya dengan berbagai pihak. Aspek penting tersebut sudah difasilitasi oleh DPPK UKM Jakarta sejak 2019, dengan berbagai kemudahan seperti diberikan tenaga pendamping, pelatihan sesuai jenis usaha, perizinan mulai dari NIB, PIRT, hingga sertifikasi halal, bahkan bazar di dalam dan luar negeri secara gratis.

Namun demikian, tidak semua pelaku UMKM berada pada level ketahanan ekonomi yang sama, terutama pasca pandemi Covid-19, meski diberikan fasilitas dan kemudahan yang sama dari DPPK UKM. Oleh karena itu, saya ingin meneliti faktor-faktor kunci yang menentukan ketahanan ekonomi UMKM agar mereka bisa naik kelas. Untuk itu, saya melakukan penelitian secara kualitatif dengan teknik *indepth interview*, mengambil 3 orang perwakilan UMKM yang sudah masuk pasar internasional, untuk menjawab pertanyaan : “Mengapa hanya sedikit UMKM yang berhasil memasuki pasar global sekalipun mereka mendapatkan dukungan yang sama dari program Jakarta Entrepreneur?” dengan tujuan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mendukung ketahanan ekonomi UMKM Jakarta Entrepreneur dan kontribusi mereka terhadap peningkatan keberhasilan di pasar internasional.

Tinjauan Pustaka

1. Ketahanan Ekonomi

Ketahanan ekonomi adalah kondisi dinamik kehidupan perekonomian individu yang berisi keuletan dan ketangguhan. Dalam hal ini, individu yang bersangkutan mampu mengembangkan kekuatan dirinya dalam menghadapi serta mengatasi segala ancaman, rintangan, gangguan, hambatan serta tantangan yang berasal dari dalam dirinya maupun dari lingkungan sekitarnya. Ketahanan ekonomi yang diukur dalam empat dimensi: (1) kondisi kehidupan keluarga, (2) pendapatan keluarga (penghasilan suami dan/atau istri bersifat tetap dan memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan), (3) biaya pendidikan anak, serta (4) jaminan keuangan keluarga¹¹.

Individu yang terbilang memiliki kesejahteraan yakni finansial yang tinggi apabila dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara tepat dan berkelanjutan. Individu dengan ketahanan ekonomi baik dapat dilihat

¹¹ REACH. *Household Economic Resilience Assessment (HERA)*. REACH Economic Resilience Report, 2021.

dari kondisi bangunan rumah, pendapatan per kapita keluarga dan kecukupan pendapatan keluarga di atas garis kemiskinan. Ketahanan ekonomi individu dikatakan tangguh jika mampu menempuh pendidikan menengah ke atas serta akses peningkatan keterampilan yang layak. Selain itu, mereka yang memiliki ketahanan ekonomi cukup baik juga memiliki jaminan resiko kesehatan keluarga. Jaminan resiko tersebut diukur dengan dua indikator yaitu tabungan dan keluarga dan asuransi keluarga¹².

Ketahanan ekonomi rendah ditandai dengan pendapatan rendah, kesehatan buruk, tingkat pendidikan dan keterampilan rendah/terbatas, akses terbatas pada tanah dan modal, kerentanan terhadap gejolak ekonomi, partisipasi rendah dalam pembuatan kebijakan. Kondisi ketahanan ekonomi yang rendah juga sangat berpengaruh terhadap produktivitas individu di keseharian dengan segala profesinya¹³.

2. Kolaborasi.

Secara luas, kolaborasi berarti terjadinya kerja sama di antara dua atau lebih orang atau institusi yang saling mengerti permasalahan satu sama lain dan berusaha memecahkan masalah secara bersama. Spesifiknya, kolaborasi adalah kerja sama yang intensif untuk mengatasi permasalahan kedua pihak secara bersamaan. kolaborasi adalah pola dan hubungan yang dilakukan antar individu atau organisasi tertentu yang memiliki keinginan untuk saling berbagi, berpartisipasi, dan bersepakat untuk bertindak bersama dalam berbagi informasi, sumber daya, manfaat, hingga tanggung jawab dalam pengambilan keputusan bersama untuk meraih cita-cita, tujuan, ataupun menyelesaikan masalah yang dihadapi kedua belah pihak. UMKM perlu berkolaborasi baik domestik maupun internasional untuk sukses dan go internasional¹⁴ Menurut penelitian yang dilakukan¹⁵ perbedaan kondisi antar negara seperti aspek budaya dalam

¹² Cahyaningtyas, A., A. A. Tenrisana, D. Triana, D. A. Prastiwi, E. H. Nurcahyo, Jamilah, N. Aminiah, and V. D. Tiwa. *Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. 201

¹³ L. Amalia, and P. Lindiasari Samputra. "Strategi Ketahanan Ekonomi Keluarga Miskin Penerima Dana Bantuan Sosial di Kelurahan Tanah Tinggi Jakarta Pusat." *Sosio Konsepsia* 9, no. 2 (2020): 113–31.

¹⁴ C. Lu, Y. Qi, and B. Yu. "Effects of Domestic and International External Collaboration on New Product Development Performance in SMEs: Evidence from China." *Sustainability* (Switzerland) 16, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.3390/Su16010400>.

¹⁵ D.L.J Bjelica, M. Mihić, K. Kavčič, and D. Gošnik. "Relationship Between Project Success Factors, Project Success Criteria, and Project Success in SME: Evidence from Selected European Transitional Economies." *International Journal of Industrial Engineering and Management* 14, no. 4 (2023): 297–310. <https://doi.org/10.24867/IJIEEM-2023-4-340>.

hal ini kolaborasi, etos kerja, serta penguasaan teknologi digital, berperan penting dalam keberhasilan UMKM naik kelas. Namun demikian, teknologi tidak mampu menggantikan tenaga manusia, terutama pada jenis UMKM kerajinan tangan/craft.

Keberhasilan UKM dipengaruhi oleh rantai pasok bahan baku dan setengah jadi, berkolaborasi dengan pemasok dan pelanggan. Inovasi dan adaptasi teknologi berkelanjutan sangat penting, termasuk konektivitas serta pertukaran informasi, yang mendukung pemasaran, produksi, distribusi produk serta jasa. Hubungan dan kolaborasi yang baik mempermudah saluran pemasaran UMKM, mengurangi biaya, mempertahankan pasar, memperkuat kepercayaan antar mitra dan menciptakan nilai. Keberhasilan UMKM bergantung pada kerjasama yang efektif dan produktif.

Penelitian yang dilakukan¹⁶ menunjukkan bahwa kolaborasi dapat meningkatkan peningkatan produktivitas UMKM. Sebagian besar memiliki keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, kurangnya sarana yang sesuai teknologi terkini, sehingga dengan melakukan kolaborasi dapat meningkatkan kinerja usaha UMKM sehingga memiliki ketahanan ekonomi yang baik.

3. Pelatihan.

Menurut Demirkan¹⁷, program pelatihan UMKM meningkatkan penjualan, keuntungan, dan jumlah karyawan. Program perlu disesuaikan dengan jenis UMKM, didukung oleh pemangku kebijakan, serta mencakup pelatihan tambahan seperti rencana bisnis dan studi kelayakan. Pelatihan harus berkelanjutan dan sesuai dengan tingkat pendidikan peserta. Menurut Dladla¹⁸, pelatihan UMKM meningkatkan inovasi produk. Dukungan dari R&D dan pemangku kebijakan lokal sangat penting untuk efisiensi biaya. Tantangan dari pelatihan ini adalah menyusun modul sesuai dengan pendidikan dan kapasitas UMKM. Program pelatihan

¹⁶ L. Mtshali, "Enhancing Small-Scale Sugarcane Growers' Productivity at Felixton Mill through Agriculture Value Chains Collaboration," *African Journal of Business and Economic Research** 19, no. 1 (2024): 331-49. <https://doi.org/10.31920/1750-4562/2024/V19n1a15>.

¹⁷ Irem Demirkan, Ravi Srinivasan, and Alka Nand, "Innovation in SMEs: The Role of Employee Training in German SMEs," *Journal of Small Business and Enterprise Development* 29, no. 3 (2022): 421-40. <https://doi.org/10.1108/JSBED-07-2020-0246>.

¹⁸ Lungisani Dladla and Emmanuel Mutambara, "The Impact of Training and Support Interventions on Small Businesses in the Expanded Public Works Programme-Pretoria Region," *Social Sciences* 7, no. 12 (2018). <https://doi.org/10.3390/socsci7120248>.

berkelanjutan dan R&D terbukti positif bagi inovasi UMKM. Berdasarkan penelitian Aqeel¹⁹, efektivitas program UMKM terlihat pada peningkatan inovasi dan ukuran bisnis dari waktu ke waktu. Untuk memastikan kualitas, diperlukan program lanjutan berupa monitoring dan evaluasi, yang mencakup audit terhadap kualitas pelatih, modul, sarana pelatihan, dan layanan konsultasi dari tutor bersertifikat.

Pelatihan UMKM harus sesuai kebutuhan dan kondisi spesifik. Kinerja UMKM meningkat dengan pelatih yang kompeten dan bersertifikat, serta kualifikasi dan pengalaman pelatih yang memadai²⁰. Pelatihan digitalisasi UMKM penting untuk bersaing di era globalisasi. Dukungan dari pemerintah dan sektor swasta diperlukan untuk memanfaatkan teknologi digital, yang dapat meningkatkan pendapatan, jangkauan pasar, dan efisiensi pembayaran cashless, terutama selama pandemi COVID-19²¹. Untuk hasil pelatihan UMKM yang efektif, perlu dilakukan pra survey kebutuhan dan hambatan UMKM. Pelatihan sering kurang efektif karena pemangku kebijakan tidak tepat sasaran dalam memilih peserta, materi, dan sarana prasarana²². Merujuk penelitian Idris²³, program pelatihan UMKM harus mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan akses modal kerja untuk meningkatkan efektivitasnya. Data sosial ekonomi UMKM, seperti usia, pendidikan, dan struktur rumah tangga, mempengaruhi keberhasilan pelatihan. Menurut Lehmann²⁴, program pelatihan yang

¹⁹ Aqeel Israr, Muzaffar Asad, Naveed Altaf, and Surjit Victor, "Training Effectiveness and Performance of Micro, Small, and Medium-Sized Enterprises," *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)* 12, no. 9 (2021): 3289-95. <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i9.5480>.

²⁰ Calvin Mukata, Watson Ladzani, and Thea Visser, "The Effectiveness of Business Management and Entrepreneurship Training Offered by SME Service Providers in Namibia," *African Journal of Business and Economic Research* 13, no. 2 (2018): 81-98. <https://doi.org/10.31920/1750-4562/2018/v13n2a4>.

²¹ Denisa Stet, Levente Czumbil, Andrei Ceclan, Stefan Cirstea, Alexandru Muresan, Dacian Jurj, Claudia Muresan, et al., "Educational and Training Program to Increase SMEs' Energy Efficiency Skills," in *2021 56th International Universities Power Engineering Conference: Powering Net Zero Emissions, UPEC 2021 - Proceedings*. <https://doi.org/10.1109/UPEC50034.2021.9548263>.

²² Maria Hulla, Patrick Herstätter, Matthias Wolf, and Christian Ramsauer, "Towards Digitalization in Production in SMEs - A Qualitative Study of Challenges, Competencies, and Requirements for Trainings," *Procedia CIRP* 104 (2021): 887-92. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2021.11.149>.

²³ Bochra Idris, George Saridakis, and Stewart Johnstone, "Training and Performance in SMEs: Empirical Evidence from Large-Scale Data from the UK," *Journal of Small Business Management* 61, no. 2 (2023): 769-801. <https://doi.org/10.1080/00472778.2020.1816431>.

²⁴ J. A. M. Lehmann, E. Schwarz, Z. Rahmani Azad, S. Gritzka, T. Seifried-Dübon, M. Diebig, M. Gast, et al., "Effectiveness and Cost Effectiveness of a Stress Management

tepat sasaran dan dukungan dalam keterampilan, perizinan, dan akses pasar penting untuk memaksimalkan potensi UMKM.

Menurut Millan²⁵, UMKM perlu pelatihan tentang energi efisien dan ramah lingkungan. Dukungan pemerintah, termasuk subsidi untuk energi terbarukan, penting untuk mendukung praktik ramah lingkungan dalam UMKM. Menurut Mustapa²⁶, UMKM perlu pelatihan efisiensi energi untuk mengurangi ketergantungan impor dan memastikan pasokan energi yang aman.

4. Pemasaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Falahat²⁷, membangun jejaring yang baik dan memasuki pasar baru sangat penting untuk keberhasilan UMKM. Globalisasi dan wawasan pasar ekspor juga meningkatkan efisiensi pasar UMKM. Untuk UMKM ekspor, intelijen pasar internasional, inovasi produk, kemampuan menetapkan harga, dan keterampilan komunikasi pemasaran berhubungan positif dengan keunggulan kompetitif²⁸. Menurut Gilmore²⁹, R&D penting bagi UMKM untuk meningkatkan kinerja dengan mendukung inovasi produk, desain, dan pemahaman konsumen sehingga memperluas pangsa pasar. UMKM perlu teknik

Training for Leaders of Small and Medium Sized Enterprises - Study Protocol for a Randomized Controlled Trial," *BMC Public Health* 21, no. 1 (2021): 468. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-10398-4>.

²⁵ Gema Millán, Yassine Rqiq, Erudino Llano, Víctor Ballestín, Lisa Neusel, Antoine Durand, Josephine Tröger, et al., "Energy Efficiency Engagement Training in SMEs: A Case Study in the Automotive Sector," *Sustainability (Switzerland)* 14, no. 17 (2022): 1-16. <https://doi.org/10.3390/su141710504>.

²⁶ Wan Nurulasiah Binti Wan Mustapa, Abdullah Al Mamun, and Mohamed Dahlan Ibrahim, "Evaluating the Effectiveness of Development Initiatives on Enterprise Income, Growth, and Assets in Peninsular Malaysia," *Economics and Sociology* 12, no. 1 (2019): 39-60. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-1/2>.

²⁷ Mohammad Falahat, T. Ramayah, Pedro Soto-Acosta, and Yan Yin Lee, "SMEs Internationalization: The Role of Product Innovation, Market Intelligence, Pricing and Marketing Communication Capabilities as Drivers of SMEs' International Performance," *Technological Forecasting and Social Change* 152 (June 2019): 119908. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.119908>.

²⁸ Nebojsa S. Davcik, Silvio Cardinali, Piyush Sharma, and Elena Cedrola, "Exploring the Role of International R&D Activities in the Impact of Technological and Marketing Capabilities on SMEs' Performance," *Journal of Business Research* 128 (April 2020): 650-60. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.04.042>.

²⁹ Audrey Gilmore and David Carson, "SME Marketing: Efficiency in Practice," *Small Enterprise Research* 25, no. 3 (2018): 213-26. <https://doi.org/10.1080/13215906.2018.1521740>.

pemasaran efisien dan pemahaman pasar yang baik untuk sukses di pasar kompetitif. Pelatihan dalam kewirausahaan, teori pemasaran, dan manajemen penting bagi pendamping UMKM. Kegagalan UMKM sering disebabkan oleh kurangnya pemahaman pasar dan pemasaran yang terbatas. Oleh karena itu, UMKM harus memanfaatkan media sosial dan teknologi modern untuk efisiensi bisnis dan adaptasi yang efektif³⁰.

Menurut Patma³¹, Integrated Marketing Communications (IMC) efektif untuk UMKM dalam membangun hubungan jangka panjang dan meningkatkan kinerja pemasaran. IMC meningkatkan pengetahuan konsumen, edukasi merek, dan dialog dengan konsumen, serta mendukung inovasi dalam pemasaran. Menurut Joensuu³², E-commerce meningkatkan transaksi, pemasaran, dan jejaring, tetapi banyak UMKM masih belum memanfaatkannya, sehingga pelatihan e-commerce sangat penting. Strategi pemasaran digital, termasuk media sosial dan kampanye online, sangat penting bagi UMKM untuk menjual produk, meningkatkan kesadaran merek, dan mengatasi hambatan pasar. Pengembangan strategi digital yang efektif adalah kunci untuk kesuksesan UMKM di ekosistem digital³³.

Menurut Saura³⁴, UMKM perlu memanfaatkan teknologi informasi dan pemasaran online untuk beradaptasi dengan globalisasi. Pemasaran digital dan kehadiran online yang strategis, termasuk konten viral dan media sosial, penting untuk meningkatkan efisiensi dan daya guna produk UMKM di pasar global. Rantai bisnis UMKM di industri pariwisata melalui pasar online penting untuk mendapatkan peluang bisnis dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. E-commerce menurunkan biaya operasi, meningkatkan margin komersial, dan memperkuat daya saing

³⁰ Nuryakin and Elia Ardyan, "SMEs' Marketing Performance: The Mediating Role of Market Entry Capability," *Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship* 20, no. 2 (2018): 122–46. <https://doi.org/10.1108/JRME-03-2016-0005>.

³¹ Tundung Subali Patma, Ludi Wishnu Wardana, Agus Wibowo, Bagus Shandy Narmaditya, and Farida Akbarina, "The Impact of Social Media Marketing for Indonesian SMEs Sustainability: Lesson from Covid-19 Pandemic," *Cogent Business and Management* 8, No. 1 (2021): 1–17. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1953679>.

³² Sanna Joensuu-Salo, Anmari Viljamaa, and Emilia Kangas, "Marketing First? The Role of Marketing Capability in SME Growth," *Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship* 25, no. 2 (2023): 185–202. <https://doi.org/10.1108/JRME-05-2021-0070>.

³³ Dedi S. Sulistiyo, "Sales and Marketing Models of SMEs Products through Online Marketing," *Journal of Physics: Conference Series* 1179, no. 1 (2019): 1–7. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1179/1/012029>.

³⁴ Jose Ramon Saura, Daniel Palacios-Marqués, and Domingo Ribeiro-Soriano, "Digital Marketing in SMEs via Data-Driven Strategies: Reviewing the Current State of Research," *Journal of Small Business Management* 61, no. 3 (2023): 1278–1313. <https://doi.org/10.1080/00472778.2021.1955127>.

UMKM dengan meningkatkan jumlah pelanggan melalui toko online yang aman dan interaktif^{35,36}.

5. Pendampingan.

Penelitian yang dilakukan oleh Xia³⁷, Pendampingan penting bagi UMKM untuk memastikan kelangsungan bisnis, terutama dalam hal akses pasar internasional dan bersaing dengan produk asing. Hal ini juga diungkapkan pada penelitian Barra & Rodrigo³⁸, dimana UMKM membutuhkan pendampingan, bukan hanya dukungan keuangan, tetapi juga pendidikan dan pelatihan terkait ekspor-impor. Pendampingan ini membantu UMKM mengatasi tantangan ekspor, impor, dan administrasi, serta berkontribusi positif pada ekonomi domestik melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan inovasi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Panmaung³⁹, UMKM yang memasuki pasar ekspor memerlukan pendampingan untuk perencanaan ekspor strategis, partisipasi dalam pameran dagang, dan studi banding dengan UMKM lain. Pendampingan ini meningkatkan peluang keberhasilan dan membantu UMKM menjalankan bisnis secara berkelanjutan.

UMKM perlu pelatihan terutama menghadapi persaingan global yang meningkat dalam ekspor dan memerlukan pendampingan dalam penggunaan sumber daya relasional dan manajerial. Pendampingan yang efektif mengurangi kekhawatiran UMKM terhadap risiko dan biaya ekspor, serta memfasilitasi peluang pasar internasional⁴⁰. UMKM

³⁵ Antonio C. Pisicchio and Ana Maria Machado Toaldo, "Integrated Marketing Communication in Hospitality SMEs: Analyzing the Antecedent Role of Innovation Orientation and the Effect on Market Performance," *Journal of Marketing Communications* 27, no. 7 (2021): 742–61. <https://doi.org/10.1080/13527266.2020.1759121>.

³⁶ E. S. Soegoto and H. Septiawan, "Improving SME Marketing in Belitung District through Online Market," *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* 407, no. 1 (2018): 1–5. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/407/1/012043>.

³⁷ Hui Xia, Emil Milevoj, and Marcus Goncalves, "Local Response to Global Crisis – The Effect of COVID-19 Pandemic on SMEs and Government Export Assistance Programs in Central California," *Journal of Transnational Management* 26, no. 4 (2021): 204–32. <https://doi.org/10.1080/15475778.2021.1989566>.

³⁸ Barra Novoa, Rodrigo. 2021. "Economic impact of SMEs in the desert of Arica-Chile: an early evaluation of the business assistance provided by Sercotec's Arica Business Center program." *International journal of business, economics & management* 4(1):135–48. doi: 10.31295/ijbem.v4n1.1227.

³⁹ Kamol Panmaung, Rath Pichyangura, and Pakpachong Vadhanasindhu, "Success Factors of Technology Transfer Process of Entrepreneurial Food SMEs in Thailand," *Academy of Entrepreneurship Journal* 26, no. 1 (2020): 1–9.

⁴⁰ Adriana Grigorescu and Amalia-Elena Ion, "An Empirical Review of Public

harus melibatkan program pengembangan usaha yang komprehensif dari pemerintah, mencakup dukungan material dan non-material seperti inkubator bisnis, akses pembiayaan, teknologi, administrasi, manajemen, serta peningkatan daya saing⁴¹. Pendampingan UMKM penting untuk mempermudah akses ke sumber daya keuangan dan mendukung pelatihan seperti desain kemasan, pemanfaatan barang bekas, serta aspek legalitas dan permodalan⁴².

Pendampingan UMKM harus fokus pada alih teknologi, pemanfaatan teknologi sesuai kebutuhan pasar, dan penilaian pesaing. Kemampuan positioning dan transfer teknologi, melibatkan universitas dan sponsor, penting untuk inovasi dan efektivitas. UMKM juga perlu meningkatkan hard skill dan soft skill untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat^{43,44}. Pendampingan dalam pemanfaatan teknologi, sistem siber, dan pengembangan produk akan memperbaiki siklus produk UMKM agar target mereka dapat tercapai^{45,46}.

6. Perizinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Branan⁴⁷ menunjukkan bahwa UMKM memerlukan lisensi merek untuk memperlancar usaha dan

Policies on the Sector of SMEs in the European Union," *Management* 24, no. 1 (2020): 1-22. <https://doi.org/10.2478/manment-2019-0033>.

⁴¹ Jan Phillip Herrmann, Sebastian Imort, Christoph Trojanowski, and Andreas Deuter, "Requirements Elicitation for an Assistance System for Complexity Management in Product Development of SMEs during COVID-19: A Case Study," *Computers* 10, no. 11 (2021). <https://doi.org/10.3390/computers10110149>.

⁴² Mio Kato and Teerawat Charoenrat, "Business Continuity Management of Small and Medium Sized Enterprises: Evidence from Thailand," *International Journal of Disaster Risk Reduction* 27 (June 2017): 577-87. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2017.10.002>.

⁴³ Katarina Njegić, Jelena Damnjanović, and Biserka Komnenić, "Mediated Effect of Export Assistance on Export Performance of Serbian Manufacturing SMEs," *Baltic Journal of Management* 15, no. 5 (2020): 649-67. <https://doi.org/10.1108/BJM-03-2020-0084>.

⁴⁴ Sanudin and E. Fauziyah, "The Effect of Extension on Community Knowledge in Peatland Management: Case Study in Rasau Jaya Village, Kubu Raya, West Kalimantan," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 648, no. 1 (2021): 1-12. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/648/1/012170>.

⁴⁵ Priit Tinitis and Carl F. Fey, *The Effects of Timing and Order of Government Support Mechanisms for SME Exports*, vol. 62, 2022.

⁴⁶ Alfred Suci, Sri Maryanti, Hardi Hardi, and Nining Sudiar, "Embedding Design Thinking Paradigm in a University's Business Assistance to Small Business," *Systemic Practice and Action Research* 35, no. 2 (2022): 177-201. <https://doi.org/10.1007/s11213-021-09565-w>.

⁴⁷ Kenyon Branan, *Licensing with Case: Evidence from Kikuyu*, vol. 40. The Author(s), under exclusive license to Springer Nature B.V., 2022.

membangun keunggulan kompetitif. Hal tersebut penting untuk mengatasi kendala seperti keterbatasan keuangan dan keterampilan, serta mempermudah akses ke pasar domestik dan internasional. Lisensi merek sangat penting bagi UMKM, baik untuk toko fisik maupun e-commerce, karena meningkatkan pengakuan konsumen⁴⁸. Lisensi merek berfungsi untuk mengontrol perkembangan usaha dan minat pasar terhadap produk atau jasa UMKM. Memiliki lisensi merek dan sertifikat izin uji makanan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM⁴⁹. Menurut Jiang⁵⁰, lisensi berperan penting dalam transfer teknologi dan meningkatkan produktivitas UMKM. Penetapan harga dan lisensi teknologi UMKM akan meningkatkan daya saing di pasar. Pemanfaatan teknologi akan meningkatkan inovasi UMKM di sektor industri yang digelutinya, sehingga mampu memiliki kapasitas inovasi yang tinggi didukung lisensi teknologi yang mendorong ketahanan ekonomi⁵¹. Lisensi teknologi di platform media e-commerce UMKM telah berkembang pesat, diperlukan untuk memenuhi karakteristik pasar seperti persaingan dan keamanan⁵².

Menurut Huang⁵³, lisensi dan hak paten meningkatkan daya saing UMKM di pasar global. Produk dengan lisensi dan paten, hasil dari R&D yang baik, lebih menarik dan kompetitif, baik di pasar domestik maupun internasional. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cardinali⁵⁴ lisensi teknologi penting bagi UMKM sebagai inovator

⁴⁸ Xu Chen, Xiaojun Wang, and Haojie Jing, "Technology Licensing Strategies for Three Cost-Differential Manufacturers," *European Journal of Operational Research* 308, no. 2 (2023): 622-35. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2022.11.027>.

⁴⁹ Joachim Henkel, "Licensing Standard-Essential Patents in the IoT - A Value Chain Perspective on the Markets for Technology," *Research Policy* 51, no. 10 (2022). <https://doi.org/10.1016/j.respol.2022.104600>.

⁵⁰ Baojun Jiang and Hongyan Shi, "Intercompetitor Licensing and Product Innovation," *Journal of Marketing Research* 55, no. 5 (2018): 738-51. <https://doi.org/10.1177/0022243718802846>.

⁵¹ You Na Lee, "Customizing Licensing Strategies to Inventions: Comparing Business Unit and R&D Inventions," *IEEE Transactions on Engineering Management* 65, no. 2 (2018): 204-15. <https://doi.org/10.1109/TEM.2017.2778110>.

⁵² Huaige Zhang, Xuejun Wang, Xianpei Hong, and Qiang Steven Lu, "Technology Licensing in a Network Product Market: Fixed-Fee versus Royalty Licensing," *Economic Record* 94, no. 305 (2018): 168-85. <https://doi.org/10.1111/1475-4932.12385>.

⁵³ Yanting Huang and Zongjun Wang, "Pricing and Production Decisions in a Closed-Loop Supply Chain Considering Strategic Consumers and Technology Licensing," *International Journal of Production Research* 57, no. 9 (2019): 2847-66. <https://doi.org/10.1080/00207543.2018.1530470>.

⁵⁴ Silvio Cardinali, Meri Travaglini, and Marta Giovannetti, "Increasing Brand Orientation and Brand Capabilities Using Licensing: An Opportunity for SMEs in International Markets," *Journal of the Knowledge Economy* 10, no. 4 (2019): 1808-30. <https://doi.org/10.1007/s12129-019-0908-8>.

karena dapat menciptakan keunggulan dalam persaingan pasar. Lisensi mempengaruhi keuntungan ekonomi, biaya produksi, dan keseimbangan pasar. Kerjasama lisensi dapat membuat UMKM yang tidak berlisensi terpaksa keluar dari pasar. Branding yang kuat menjadi kunci untuk bertahan dan bersaing dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil dan inflasi. Canavire⁵⁵, menyatakan bahwa Inovasi UMKM dapat ditingkatkan melalui pengembangan teknologi efisien seperti aplikasi IoT berbasis Android. Dukungan pemangku kebijakan untuk mendorong UMKM mengembangkan dan mendaftarkan web usaha mereka sangat penting di era digitalisasi.

Menurut Siegel dan Ron⁵⁶, lisensi dan kualitas produk UMKM mempengaruhi perilaku konsumen. Meskipun UMKM yang memiliki lisensi menghadapi biaya awal yang tinggi, mereka dapat memperoleh keuntungan jangka panjang berupa loyalitas konsumen dan permintaan pasar yang positif, terutama jika produk inovatif mereka memenuhi kebutuhan pasar.

7. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Ketahanan Ekonomi UMKM

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap berbagai sektor ekonomi, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian yang dilakukan oleh Thaha⁵⁷ mengungkapkan bahwa pemberlakuan pembatasan sosial dan karantina wilayah telah mengakibatkan penurunan drastis pada pendapatan UMKM hingga mencapai 80% di beberapa daerah. Hal ini diperkuat oleh temuan Rosita⁵⁸ yang menunjukkan bahwa 87,5% UMKM di Indonesia mengalami dampak negatif akibat pandemi ini.

doi.org/10.1007/s13132-019-00616-1.

⁵⁵ Gustavo Canavire-Bacarreza and Luis Castro Peñarrieta, "Can Licensing Induce Productivity? Exploring the IPR Effect," *Empirical Economics* 61, no. 2 (2021): 549–86. <https://doi.org/10.1007/s00181-020-01880-w>.

⁵⁶ Ron Siegel, "Licensing with Skill Acquisition," *Economics Letters* 195 (2020): 109456. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2020.109456>.

⁵⁷ A. F. Thaha, "Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia," *Jurnal Brand* 2, no. 1 (2020): 147–53.

⁵⁸ R. Rosita, "Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia," *Jurnal Lentera Bisnis* 9, no. 2 (2020): 109–20.

Dalam studi komprehensif yang dilakukan oleh Setyawan dan Lestari⁵⁹, teridentifikasi beberapa dampak utama pandemi terhadap UMKM, meliputi penurunan signifikan dalam penjualan, kesulitan dalam hal permodalan, serta berbagai hambatan dalam proses distribusi produk. Kondisi ini memaksa pelaku UMKM untuk mencari strategi adaptasi yang efektif guna mempertahankan kelangsungan usaha mereka. Hardilawati⁶⁰ dalam penelitiannya menemukan bahwa UMKM yang mampu bertahan selama masa pandemi adalah mereka yang berhasil melakukan transformasi digital, dengan data menunjukkan bahwa 64% UMKM yang mengadopsi platform digital justru mengalami peningkatan penjualan di tengah kondisi pandemi.

Terkait dengan upaya pemulihan, penelitian terbaru yang dilakukan oleh Wijaya et al⁶¹. mengidentifikasi beberapa strategi ketahanan yang terbukti efektif, termasuk diversifikasi produk, optimalisasi penggunaan media sosial, penguatan kemitraan, serta peningkatan efisiensi operasional. Sejalan dengan hal tersebut, Pakpahan⁶² menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendukung UMKM selama pandemi dan menemukan bahwa program-program seperti restrukturisasi kredit dan bantuan modal kerja terbukti membantu 60% UMKM dalam mempertahankan operasional mereka.

Studi komprehensif yang dilakukan oleh Nurwati dan Rahman mengenai dampak program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terhadap UMKM menunjukkan hasil yang menggembirakan. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa 73% UMKM penerima bantuan berhasil mempertahankan karyawan mereka, 45% mencatat peningkatan omset setelah menerima bantuan, dan 65% mampu beradaptasi dengan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.

Aspek transformasi digital menjadi sorotan utama dalam penelitian Rahman⁶³ dan Soesilo⁶⁴, yang mengungkapkan bahwa pandemi telah

⁵⁹ A. A. Setyawan and S. Lestari, "Analisis Dampak Covid-19 terhadap Keberlangsungan UMKM di Jawa Tengah," *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (2021): 46-55.

⁶⁰ O. Wijaya, H. Santoso, and A. Putra, "Strategi Adaptasi UMKM dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19," *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 25, no. 1 (2023): 11-28.

⁶¹ Wijaya, O., Santoso, H., & Putra, A. (2023). Strategi Adaptasi UMKM dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 25(1), 11-28.

⁶² A. K. Pakpahan, "COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 16, no. 1 (2020): 59-64.

⁶³ S. Rahman and P. Soesilo, "Akselerasi Digital UMKM Pasca Pandemi: Peluang dan Tantangan," *Jurnal Inovasi Ekonomi* 8, no. 1 (2023): 78-93.

⁶⁴ Soesilo, P. (2023).

mempercepat proses digitalisasi UMKM secara signifikan. Hasil penelitian mereka menunjukkan adanya peningkatan hingga 300% dalam adopsi platform e-commerce, di mana 78% UMKM mulai menggunakan pembayaran digital, dan 55% aktif mengembangkan kehadiran online mereka melalui berbagai platform media sosial.

Dalam konteks prospek masa depan, analisis terbaru yang dilakukan oleh Kusuma et al⁶⁵ mengidentifikasi beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi UMKM dalam era pemulihan. Tantangan tersebut meliputi kebutuhan akan peningkatan literasi digital di kalangan pelaku UMKM, pentingnya adaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen yang semakin dinamis, urgensi penguatan rantai pasok lokal, serta kebutuhan untuk mengembangkan model bisnis hybrid yang menggabungkan pendekatan konvensional dan digital.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor UMKM, berbagai strategi adaptasi dan dukungan kebijakan yang tepat telah membantu banyak pelaku usaha untuk bertahan dan bahkan berkembang dalam situasi yang penuh tantangan ini. Transformasi digital menjadi kunci utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi UMKM, sementara dukungan pemerintah melalui berbagai program bantuan terbukti efektif dalam membantu pemulihan sektor ini.

Metodologi

Metodologi yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan indepth interview. Metode ini dilakukan dengan cara memakai pertanyaan secara lisan kepada informan sesuai yang tertulis dalam panduan. Wawancara mendalam dilakukan hanya pada 3 orang orang responden saja sebagai informan terpilih, dari pelaku UMKM *Jakarta Entrepreneur*. Tiga informan dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu pemilik atau pengelola UMKM yang telah beroperasi minimal 3 tahun di Jakarta, memiliki omset tahunan antara Rp 300 juta hingga Rp 2,5 miliar, telah menggunakan platform digital dalam operasional bisnis, memiliki minimal 5 karyawan, dan bersedia memberikan informasi secara terbuka tentang pengalaman bisnisnya⁶⁶.

⁶⁵ A. Kusuma, B. Pratama, and S. Wijaya, "Transformasi UMKM dalam Era Pemulihan: Studi Kasus di Indonesia," *Jurnal Manajemen Bisnis* 15, no. 1 (2024): 45–62.

⁶⁶ John W. Creswell dan Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2018).

Bapak Thio Siujinata selaku pemilik galery craft dari bahan bambu, Ibu Patricia selaku pemilik tas dari bahan baku alami, serta Ibu Surya sebagai pemilik usaha kuliner keripik. Wawancara mendalam bertujuan untuk: (1) membahas setiap permasalahan yang akan ditanyakan memiliki sifat lebih detail atau perluasan dari pertanyaan kuesioner; (2) menggali informasi sesuai pengalaman, pengetahuan serta pandangan informan terkait topik penelitian; (3) informan dan pewawancara lebih fleksibel dan leluasa dalam tanya jawab tanpa ada tekanan/ intervensi pihak luar; serta (4) baik pewawancara maupun informan merasa saling bebas, saling menghargai satu sama lain. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam melalui penggalian fenomena di lapangan. Analisis kualitatif lebih difokuskan pada elaborasi lebih lanjut melalui observasi, fenomenologi serta temuan penting di lapangan⁶⁷.

Ketiga informan yang berpartisipasi dalam penelitian ini memiliki latar belakang usaha yang berbeda. Informan pertama merupakan pemilik UMKM di bidang kuliner dengan pengalaman mengelola usaha selama 5 tahun. Informan kedua adalah pengelola UMKM fashion retail yang telah berkecimpung di industri ini selama 7 tahun. Sementara informan ketiga merupakan pemilik UMKM jasa digital printing dengan pengalaman 4 tahun dalam industri tersebut.

Analisis kualitatif meliputi narasi dengan *software Dedoose* yang mengolah dan mengekstraksi narasi hasil wawancara mendalam dari seluruh informan. Dedoose merupakan suatu alternatif dari perangkat lunak analisis data kualitatif lainnya yang bertujuan untuk memudahkan penelitian metode campuran yang kompleks. Dedoose sudah digunakan dalam berbagai penelitian di berbagai industri seperti medis, riset pasar, penelitian kebijakan sosial, dan penelitian ilmu sosial akademis lainnya. Hasil dari olah data Dedoose berupa coding dari ekstraksi narasi yang diinput berdasarkan wawancara mendalam terhadap seluruh informan terpilih⁶⁸.

Hasil dan Pembahasan.

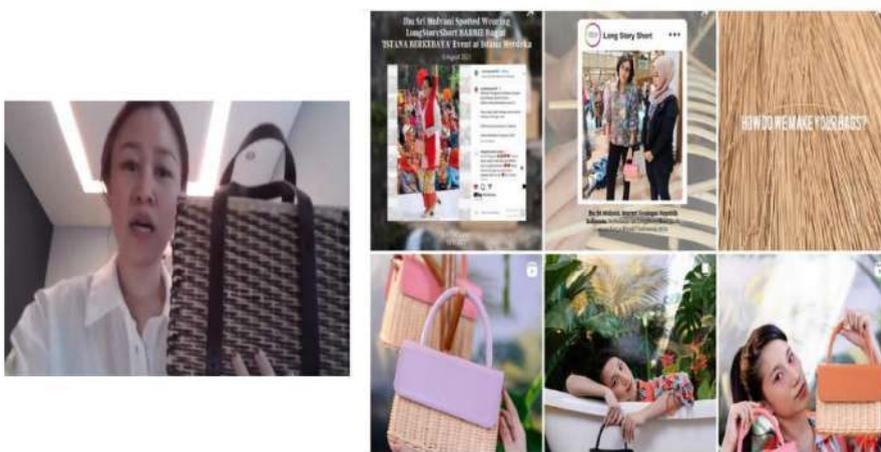
Profil dari 3 orang informan adalah sebagai berikut:

⁶⁷ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

⁶⁸ I. Dey, *Qualitative Data Analysis: A User Friendly Guide for Social Scientists* (London: Routledge, 2003).



Gambar 1. Pemilik Galeri Crafttote, Bapak Thio Siujinata



Gambar 2. Pemilik Koleksi Tas Long Story Short, Ibu Patricia Adriani



Gambar 3. Pemilik PT Kultiva Co, Aneka Kripik Chips, Ibu Suryaningsih

Berdasarkan hasil olah data berupa narasi/text dengan software Dedoose, maka diperoleh output penilaian aspek penting/coding sebagai berikut :

	Code	harapan yang akan datang	kolaborasi	memperluas wawasan	menambah pengetahuan	pelaporan keuangan	pelatihan	pemasaran	pendaftaran	pendampingan	pengalaman menjadi binaan	perizinan	permodalan	proses pembelajaran	suka duka menjadi entrepreneur	transfer knowledge	Total
Responden																	
Ibu "S" Chips Cemilan		1	4	1	1	2	2	3	2	1	1	1	1		1	1	22
Ibu "P" Tas Long Story		1	6	1	1	3	5	4	4	1	3	1	1	2	3		36
Bapak "T" Crafttote		1	1	1	1	2	4	1	3	1	2	1	1		1	1	21
Total		3	11	3	3	7	11	8	9	3	6	3	3	2	5	2	

Gambar 4. Hasil Output Olah Narasi Teks dengan Software Dedoose

Tabel 1. Penjelasan Hasil Olah Data Kualitatif dengan Dedoose

1	Aspek pertama	Kolaborasi dan pelatihan; menurut para informan bantuan berupa kolaborasi dan pelatihan yang diterima selama menjadi anggota <i>Jakarta Entrepreneur</i> merupakan aspek terpenting yang berdampak pada kemampuan mereka menjalankan bisnis/usahanya.
2	Aspek kedua	Pendaftaran; hal ini terlihat dari hasil wawancara bahwa anggota <i>Jakarta Entrepreneur</i> menilai penting informasi terkait cara pendaftaran.
3	Aspek ketiga	Pemasaran; aspek tersebut menjadi faktor penentu anggota <i>Jakarta Entrepreneur</i> dalam mempertahankan keberlangsungan hidup sehari-hari melalui pemasaran produk.
4	Aspek keempat	Pelaporan Keuangan; menjadi aspek pendukung kesuksesan mereka dalam menjalankan bisnis/usahanya.
5	Aspek kelima	Pengalaman menjadi binaan; menjadi data pelengkap hasil wawancara dengan anggota <i>Jakarta Entrepreneur</i> .
6	Aspek keenam	Suka duka menjadi entrepreneur; merupakan manfaat yang mereka rasakan menjadi anggota <i>Jakarta Entrepreneur</i> , serta harapan yang akan datang.
7	Aspek ketujuh	Harapan yang akan datang, memperluas wawasan, menambah pengetahuan, pendampingan, perizinan dan permodalan; merupakan aspek tambahan yang menjadi sasaran anggota <i>Jakarta Entrepreneur</i> dalam menjalankan bisnis mereka
8	Aspek Kedelapan	Proses pembelajaran dan transfer knowledge; aspek tersebut sangat membantu sekali untuk anggota <i>Jakarta Entrepreneur</i>

Sumber: Diolah Penulis dengan Software Dedoose (2024)

Dari uraian tersebut di atas, dapat dilihat urutan aspek yang paling banyak dipilih/penting berdasarkan skor hasil olah data software Dedoose, yaitu : Kolaborasi, pelatihan, pendaftaran, pemasaran, pelaporan keuangan dan pengalaman binaan menjadi 5 aspek dengan skor tertinggi. Selain itu, pengalaman dalam mengelola dinamika kewirausahaan-dengan berbagai suka duka menjadi entrepreneur, wawasan yang luas, serta proses pembelajaran dan transfer ilmu pengetahuan juga penting dalam mempertahankan bisnis, yang berdampak positif pada ketahanan

ekonomi pelaku UMKM. Ketahanan ekonomi pelaku UMKM dapat tercapai jika bisnis yang dijalankan berjalan lancar, memiliki pendapatan yang baik, dan diperoleh dari pangsa pasar yang baik/potensial, baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh REACH⁶⁹, dimana individu yang memiliki ketahanan ekonomi dapat terlihat dari pendapatan yang stabil dan mampu memenuhi kebutuhan primer, sekunder bahkan tersier. Pelaku UMKM ini tidak semulus yang dibayangkan dalam menjalankan bisnis hingga mampu menembus pasar global. Mereka juga memiliki hambatan yang cukup banyak, mulai dari mencari bahan baku, pekerja yang sesuai, pelanggan dan pasar, perizinan ekspor, termasuk *shipping* barang pesanan hingga tujuan pembeli di luar negeri. Dengan melakukan kolaborasi, para pelaku UMKM dapat memiliki informasi penting seperti pasokan dan jasa distribusi yang lebih murah, bahkan pasokan bahan baku juga tenaga kerja berkualitas. Selain itu, para pelaku UMKM dapat bertukar pikiran dan pengalaman / *sharing, learning* dan *transfer knowledge* menjadi eksportir dengan segala suka dukanya saat melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Kolaborasi dapat meningkatkan peningkatan produktivitas UMKM. Sebagian besar memiliki keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, kurangnya sarana yang sesuai teknologi terkini, sehingga dengan melakukan kolaborasi dapat meningkatkan kinerja usaha UMKM sehingga memiliki ketahanan ekonomi yang baik. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Made dan Mtshali⁷⁰.

Keberhasilan pelaku UMKM juga tidak lepas dari keberhasilan program DPPK UKM Jakarta dalam memberikan peluang usaha melalui web *Jakarta Entrepreneur*. Melalui web tersebut, mereka mudah untuk bergabung dari link pendaftaran, mendapatkan fasilitas pendampingan, pelatihan yang sesuai dengan jenis usaha, hingga cara membuat laporan keuangan. Semua informasi penting ada di web *Jakarta Entrepreneur*. Temuan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Joensuu⁷¹,

⁶⁹ REACH. Household Economic Resilience Assessment (HERA). *REACH Economic Resilience Report*, 2021.

⁷⁰ L. Mtshali, "Enhancing Small-Scale Sugarcane Growers' Productivity at Felixton Mill through Agriculture Value Chains Collaboration." *African Journal of Business and Economic Research* Vol. 19, no. 1 (2024): 331-49. <https://doi.org/10.31920/1750-4562/2024/V19n1a15>.

⁷¹ Sonna Joensuu-Salo, Anmari Viljamaa, and Emilia Kangas. "Marketing First? The Role of Marketing Capability in SME Growth." *Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship* Vol. 25, no. 2 (2023): 185- 202. <https://doi.org/10.1108/JRME-05-2021-0070>.

Nuryakin⁷², dan Grigorescu⁷³. Pelatihan digitalisasi untuk memasarkan secara online sudah menjadi keharusan agar mereka mampu memasarkan produknya secara luas. Banyak pelaku UMKM yang belum menguasai pemasaran digital menjadi kehilangan pelanggan, dan berdampak pada keuntungan usahanya, terutama untuk pasar luar negeri. Fenomena tersebut juga ditemui dari penelitian yang dilakukan oleh Cardinali⁷⁴, dan Siegel dan Ron⁷⁵. Jika pemasukan berkurang, maka ketahanan ekonomi pelaku UMKM juga mengalami hal serupa. Program pelatihan disesuaikan dengan jenis UMKM dengan berbagai modul yang dikembangkan sesuai perkembangan kebutuhan pasar, secara berkesinambungan, dan ini tidak lepas dari peran pendamping. Tenaga pendamping yang disiapkan oleh DPPK UKM Jakarta akan memfasilitasi pelaku UMKM untuk mendapatkan informasi penting terkait kemajuan usahanya, termasuk jadwal pelatihan, bazar dan cara mengurus izin usaha/lisensi. Hal serupa dijumpai dari penelitian yang dilakukan oleh Herrmann⁷⁶ dan Kato⁷⁷.

Daftar Pustaka

- Amalia, L., and Lindiasari Samputra, P. "Strategi Ketahanan Ekonomi Keluarga Miskin Penerima Dana Bantuan Sosial di Kelurahan Tanah Tinggi Jakarta Pusat." *Sosio Konsepsia* 9, no. 2 (2020): 113–131.
- Aqeel Israr, Muzaffar Asad, Naveed Altaf, and Surjit Victor. "Training Effectiveness and Performance of Micro, Small and Medium-Sized Enterprises." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)* 12, no. 9 (2021): 3289–95. <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i9.5480>.

⁷² Nuryakin, and Elia Ardyan. "SMEs' Marketing Performance: The Mediating Role of Market Entry Capability." *Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship* Vol. 20, no. 2 (2018): 122–46. <https://doi.org/10.1108/JRME-03-2016-0005>.

⁷³ Adriana Grigorescu, and Amalia-Elena Ion. "An Empirical Review of Public Policies on the Sector of SMEs in the European Union." *Management* 24, no. 1 (2020): 1–22. <https://doi.org/10.2478/manment-2019-0033>.

⁷⁴ Silvio Cardinali, Meri Travaglini, and Marta Giovannetti. "Increasing Brand Orientation and Brand Capabilities Using Licensing: An Opportunity for SMEs in International Markets." *Journal of the Knowledge Economy* 10, no. 4 (2019): 1808–30. <https://doi.org/10.1007/s13132-019-00616-1>.

⁷⁵ Ron Siegel. "Licensing with Skill Acquisition." *Economics Letters* 195 (2020): 109456. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2020.109456>.

⁷⁶ Herrmann, Jan Phillip, Sebastian Imort, Christoph Trojanowski, dan Andreas Deuter.

⁷⁷ Kato, Mio, and Teerawat Charoenrat. "Business Continuity Management of Small and Medium Sized Enterprises: Evidence from Thailand." *International Journal of Disaster Risk Reduction* 27 (June 2017): 577–87. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2017.10.002>.

- Barra Novoa, Rodrigo. "Economic Impact of SMEs in the Desert of Arica-Chile: An Early Evaluation of the Business Assistance Provided by Sercotec's Arica Business Center Program." *International Journal of Business, Economics & Management* 4, no. 1 (2021): 135-48. <https://doi.org/10.31295/ijbem.v4n1.1227>.
- Bjelica, D. L. J., M. Mihić, K. Kavčič, and D. Gošnik. "Relationship Between Project Success Factors, Project Success Criteria, and Project Success in SME: Evidence from Selected European Transitional Economies." *International Journal of Industrial Engineering and Management* 14, no. 4 (2023): 297-310. <https://doi.org/10.24867/IJIEM-2023-4-340>.
- Branan, Kenyon. *Licensing with Case: Evidence from Kikuyu*. Vol. 40. Springer Nature B.V., 2022.
- Cahyaningtyas, A., A. A. Tenrisana, D. Triana, D. A. Prastiwi, E. H. Nurcahyo, Jamilah, Aminiah, N., and V. D. Tiwa. *Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. 2016.
- Canavire-Bacarreza, Gustavo, and Luis Castro Peñarrieta. "Can Licensing Induce Productivity? Exploring the IPR Effect." *Empirical Economics* 61, no. 2 (2021): 549-86. <https://doi.org/10.1007/s00181-020-01880-w>.
- Cardinali, Silvio, Meri Travaglini, and Marta Giovannetti. "Increasing Brand Orientation and Brand Capabilities Using Licensing: An Opportunity for SMEs in International Markets." *Journal of the Knowledge Economy* 10, no. 4 (2019): 1808-30. <https://doi.org/10.1007/s13132-019-00616-1>.
- Chen, Xu, Xiaojun Wang, and Haojie Jing. "Technology Licensing Strategies for Three Cost-Differential Manufacturers." *European Journal of Operational Research* 308, no. 2 (2023): 622-35. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2022.11.027>.
- Creswell, J. W. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Davcik, Nebojsa S., Silvio Cardinali, Piyush Sharma, and Elena Cedrola. "Exploring the Role of International R&D Activities in the Impact of Technological and Marketing Capabilities on SMEs' Performance." *Journal of Business Research* 128 (2020): 650-60. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.04.042>.
- Demirkan, Irem, Ravi Srinivasan, and Alka Nand. "Innovation in SMEs: The Role of Employee Training in German SMEs." *Journal of Small Business and Enterprise Development* 29, no. 3 (2022): 421-40. <https://doi.org/10.1108/JSBED-07-2020-0246>.

- Dey, I. *Qualitative Data Analysis: A User Friendly Guide for Social Scientists*. Routledge, 2003.
- Dladla, Lungisani, and Emmanuel Mutambara. "The Impact of Training and Support Interventions on Small Businesses in the Expanded Public Works Programme-Pretoria Region." *Social Sciences* Vol. 7, No. 12 (2018). <https://doi.org/10.3390/socsci7120248>.
- Falahat, Mohammad, T. Ramayah, Pedro Soto-Acosta, and Yan Yin Lee. "SMEs Internationalization: The Role of Product Innovation, Market Intelligence, Pricing and Marketing Communication Capabilities as Drivers of SMEs' International Performance." *Technological Forecasting and Social Change* 152 (2020): 119908. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.119908>.
- Gilmore, Audrey, and David Carson. "SME Marketing: Efficiency in Practice." *Small Enterprise Research* 25, no. 3 (2018): 213–26. <https://doi.org/10.1080/13215906.2018.1521740>.
- Grigorescu, Adriana, and Amalia-Elena Ion. "An Empirical Review of Public Policies on the Sector of SMEs in the European Union." *Management* 24, no. 1 (2020): 1–22. <https://doi.org/10.2478/manment-2019-0033>.
- Hakim, L., and F. Oktaviani. "Financial Inclusion and MSMEs Sustainability: Evidence from Indonesia." *Journal of Asian Finance, Economics and Business* Vol. 8, no. 3 (2021): 1249–59.
- Hardilawati, W. L. "Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19." *Jurnal Akuntansi & Ekonomika* Vol. 10, no. 1 (2020): 89–98.
- Hartono, H., and D. D. Hartomo. "Factors Affecting the Adoption of Digital Marketing among Indonesian SMEs." *Management Science Letters* 10, no. 5 (2020): 1061–70.
- Henkel, Joachim. "Licensing Standard-Essential Patents in the IoT – A Value Chain Perspective on the Markets for Technology." *Research Policy* Vol. 51, no. 10 (2022). <https://doi.org/10.1016/j.respol.2022.104600>.
- Hermanto, B., and S. Suryanto. "Determinants of SME Competitiveness in Indonesia: An Empirical Study." *International Journal of Scientific and Technology Research* Vol. 9, no. 3 (2020): 1830–36.
- Herrmann, Jan Phillip, Sebastian Imort, Christoph Trojanowski, and Andreas Deuter. "Requirements Elicitation for an Assistance System for Complexity Management in Product Development of SMEs during Covid-19: A Case Study." *Computers* 10, no. 11 (2021). <https://doi.org/10.3390/computers10110149>.
- Huang, Yanting, and Zongjun Wang. "Pricing and Production Decisions in a Closed-Loop Supply Chain Considering Strategic Consumers and Technology Licensing." *International Journal of Production Research*

- 57, no. 9 (2019): 2847–66. <https://doi.org/10.1080/00207543.2018.1530470>.
- Hulla, Maria, Patrick Herstätter, Matthias Wolf, and Christian Ramsauer. “Towards Digitalization in Production in SMEs - A Qualitative Study of Challenges, Competencies, and Requirements for Trainings.” *Procedia CIRP* 104 (2021): 887–92. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2021.11.149>.
- Idris, Bochra, George Saridakis, and Stewart Johnstone. “Training and Performance in SMEs: Empirical Evidence from Large-Scale Data from the UK.” *Journal of Small Business Management* Vol. 61, no. 2 (2023): 769–801. <https://doi.org/10.1080/00472778.2020.1816431>.
- Irijayanti, M., and A. M. Azis. “Barrier Factors and Potential Solutions for Indonesian SMEs.” *Procedia Economics and Finance* 4 (2021): 3–12.
- Jiang, Baojun, and Hongyan Shi. “Intercompetitor Licensing and Product Innovation.” *Journal of Marketing Research* Vol. 55, no. 5 (2018): 738–51. <https://doi.org/10.1177/0022243718802846>.
- Joensuu-Salo, Sanna, Anmari Viljamaa, and Emilia Kangas. “Marketing First? The Role of Marketing Capability in SME Growth.” *Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship* Vol. 25, no. 2 (2023): 185–202. <https://doi.org/10.1108/JRME-05-2021-0070>.
- Kato, Mio, and Teerawat Charoenrat. “Business Continuity Management of Small and Medium Sized Enterprises: Evidence from Thailand.” *International Journal of Disaster Risk Reduction* 27 (June 2017): 577–87. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2017.10.002>.
- Kusuma, A., B. Pratama, and S. Wijaya. “Transformasi UMKM dalam Era Pemulihan: Studi Kasus di Indonesia.” *Jurnal Manajemen Bisnis* Vol. 15, no. 1 (2024): 45–62.
- Lee, You Na. “Customizing Licensing Strategies to Inventions: Comparing Business Unit and R&D Inventions.” *IEEE Transactions on Engineering Management* Vol. 65, no. 2 (2018): 204–15. <https://doi.org/10.1109/TEM.2017.2778110>.
- Lehmann, J. A. M., E. Schwarz, Z. Rahmani Azad, S. Gritzka, T. Seifried-Dübon, M. Diebig, M. Gast, et al. “Effectiveness and Cost Effectiveness of a Stress Management Training for Leaders of Small and Medium Sized Enterprises - Study Protocol for a Randomized Controlled Trial.” *BMC Public Health* Vol. 21, no. 1 (2021): 468. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-10398-4>.
- Lu, C., Y. Qi, and B. Yu. “Effects of Domestic and International External Collaboration on New Product Development Performance in SMEs: Evidence from China.” *Sustainability (Switzerland)* Vol. 16, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.3390/Su16010400>.

- Millán, Gema, Yassine Rqiq, Erudino Llano, Víctor Ballestín, Lisa Neusel, Antoine Durand, Josephine Tröger, et al. "Energy Efficiency Engagement Training in SMEs: A Case Study in the Automotive Sector." *Sustainability (Switzerland)* Vol. 14, no. 17 (2022): 1–16. <https://doi.org/10.3390/su141710504>.
- Mtshali, L. "Enhancing Small-Scale Sugarcane Growers' Productivity at Felixton Mill through Agriculture Value Chains Collaboration." *African Journal of Business and Economic Research* Vol. 19, no. 1 (2024): 331–49. <https://doi.org/10.31920/1750-4562/2024/V19n1a15>.
- Mukata, Calvin Mukata, Watson Ladzani, and Thea Visser. "The Effectiveness of Business Management and Entrepreneurship Training Offered by SME Service Providers in Namibia." *African Journal of Business and Economic Research* 13, no. 2 (2018): 81–98. <https://doi.org/10.31920/1750-4562/2018/v13n2a4>.
- Mustapa, Wan Nurulashia Binti Wan, Abdullah Al Mamun, and Mohamed Dahlan Ibrahim. "Evaluating the Effectiveness of Development Initiatives on Enterprise Income, Growth, and Assets in Peninsular Malaysia." *Economics and Sociology* Vol. 12, no. 1 (2019): 39–60. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2019/12-1/2>.
- Njegić, Katarina, Jelena Damjanović, and Biserka Komnenić. "Mediated Effect of Export Assistance on Export Performance of Serbian Manufacturing SMEs." *Baltic Journal of Management* Vol. 15, no. 5 (2020): 649–67. <https://doi.org/10.1108/BJM-03-2020-0084>.
- Nugroho, M. A., and Y. S. Susilo. "Policy Analysis of SME Development in Indonesia: A Study of Government Regulations." *International Journal of Economics and Business Administration* Vol. 7, no. 4 (2019): 50–63.
- Nurwati, N., and F. Rahman. "Evaluasi Program PEN untuk UMKM: Analisis Dampak dan Efektivitas." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 12, no. 2 (2022): 156–71.
- Nuryakin, and Elia Ardyan. "SMEs' Marketing Performance: The Mediating Role of Market Entry Capability." *Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship* Vol. 20, no. 2 (2018): 122–46. <https://doi.org/10.1108/JRME-03-2016-0005>.
- Pakpahan, A. K. "COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* Vol. 16, no. 1 (2020): 59–64.
- Panmaung, Kamol, Rath Pichyangura, and Pakpachong Vadhanasindhu. "Success Factors of Technology Transfer Process of Entrepreneurial Food SMEs in Thailand." *Academy of Entrepreneurship Journal* 26, no. 1 (2020): 1–9.

- Patma, Tundung Subali, Ludi Wishnu Wardana, Agus Wibowo, Bagus Shandy Narmaditya, and Farida Akbarina. "The Impact of Social Media Marketing for Indonesian SMEs Sustainability: Lesson from Covid-19 Pandemic." *Cogent Business and Management* Vol. 8, no. 1 (2021): 1-17. <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1953679>.
- Pisicchio, Antonio C., and Ana Maria Machado Toaldo. "Integrated Marketing Communication in Hospitality SMEs: Analyzing the Antecedent Role of Innovation Orientation and the Effect on Market Performance." *Journal of Marketing Communications* Vol. 27, no. 7 (2021): 742-61. <https://doi.org/10.1080/13527266.2020.1759121>.
- Prasetyo, P. E., and N. R. Kistanti. "Human Capital, Institutional Economics and Entrepreneurship as a Driver for Quality & Sustainable Economic Growth." *Entrepreneurship and Sustainability Issues* Vol. 7, no. 4 (2020): 2575-89.
- Rahman, S., and P. Soesilo. "Akselerasi Digital UMKM Pasca Pandemi: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Inovasi Ekonomi* Vol. 8, no. 1 (2023): 78-93.
- REACH. *Household Economic Resilience Assessment (HERA)*, REACH Economic Resilience Report, 2021.
- Rosita, R. "Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia." *Jurnal Lentera Bisnis* 9, no. 2 (2020): 109-20.
- Sanudin, and E. Fauziyah. "The Effect of Extension on Community Knowledge in Peatland Management: Case Study in Rasau Jaya Village, Kubu Raya, West Kalimantan." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 648, no. 1 (2021): 1-12. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/648/1/012170>.
- Setyawan, A. A., and S. Lestari. "Analisis Dampak Covid-19 terhadap Keberlangsungan UMKM di Jawa Tengah." *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (2021): 46-55.
- Setyowati, R., and B. Kurniawan. "Digital Transformation of MSMEs in Jakarta: Challenges and Opportunities." *Journal of Economics and Business* 3, no. 2 (2020): 636-44.
- Siegel, Ron. "Licensing with Skill Acquisition." *Economics Letters* 195 (2020): 109456. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2020.109456>.
- Soegoto, E. S., and H. Septiawan. "Improving SME Marketing in Belitung District through Online Market." *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* 407, no. 1 (2018): 1-5. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/407/1/012043>.
- Stet, Denisa, Levente Czumbil, Andrei Ceclan, Stefan Cirstea, Alexandru Muresan, Dacian Jurj, Claudia Muresan, et al. "Educational and Training Program to Increase SMEs' Energy Efficiency Skills." In

- 2021 56th International Universities Power Engineering Conference: Powering Net Zero Emissions, UPEC 2021 - Proceedings. <https://doi.org/10.1109/UPEC50034.2021.9548263>.
- Suci, Afred, Sri Maryanti, Hardi Hardi, and Nining Sudiar. "Embedding Design Thinking Paradigm in a University's Business Assistance to Small Business." *Systemic Practice and Action Research* 35, no. 2 (2022): 177-201. <https://doi.org/10.1007/s11213-021-09565-w>.
- Sulistiyo, Dedi S. "Sales and Marketing Models of SMEs Products through Online Marketing." *Journal of Physics: Conference Series* 1179, no. 1 (2019): 1-7. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1179/1/012029>.
- Susilo, Y. S. "Strategi Meningkatkan Akses Pembiayaan UMKM di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 10, no. 1 (2019): 91-103.
- Tambunan, T. "Recent Evidence of the Development of Micro, Small, and Medium Enterprises in Indonesia." *Journal of Global Entrepreneurship Research* 9, no. 1 (2019): 1-15.
- Tambunan, T. T. H. "Development and Some Constraints of SME in Indonesia." *Indonesian Journal of Economics and Development* 1, no. 2 (2021): 36-57.
- Thaha, A. F. "Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia." *Jurnal Brand* 2, no. 1 (2020): 147-53.
- Tinits, Priit, and Carl F. Fey. *The Effects of Timing and Order of Government Support Mechanisms for SME Exports*. Vol. 62, 2022.
- Xia, Hui, Emil Milevoj, and Marcus Goncalves. "Local Response to Global Crisis - The Effect of COVID-19 Pandemic on SMEs and Government Export Assistance Programs in Central California." *Journal of Transnational Management* 26, no. 4 (2021): 204-32. <https://doi.org/10.1080/15475778.2021.1989566>.
- Wijaya, O., H. Santoso, and A. Putra. "Strategi Adaptasi UMKM dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 25, no. 1 (2023): 11-28.
- Winarno, B., and T. Wijjayanti. "The Influence of Entrepreneurial Orientation on SME Business Performance in Indonesia." *ASEAN Marketing Journal* 10, no. 2 (2018): 89-102.
- Zhang, Huaige, Xuejun Wang, Xianpei Hong, and Qiang Steven Lu. "Technology Licensing in a Network Product Market: Fixed-Fee versus Royalty Licensing." *Economic Record* 94, no. 305 (2018): 168-85. <https://doi.org/10.1111/1475-4932.12385>.

Pendekatan Kebudayaan dalam Membangun Ketahanan dan Keamanan Insani: Sebuah Kajian Strategis

Cultural Approaches in Building Resilience and Human Security: A Strategic Study

Sugeng¹, Diana Fitriana², Widya Romasindah Aidy³

^{1,2,3} Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: sugeng@dsn.ubharajaya.ac.id

Article Info

Received: September 24, 2024

Revised: November 12, 2024

Accepted: December 4, 2024

Abstract: *This article explores the critical role of cultural approaches in building resilience and human security as a foundation for social sustainability, using philosophical methodology as the primary analytical framework. By examining culture as a resilience strategy, this article emphasizes how local cultural values, norms, and identities can strengthen community resilience in the face of global challenges, such as economic crises, climate change, and social conflict. Through a philosophical approach, particularly by analyzing concepts of culture and resilience, this article delves into how culture's ethical and ontological foundations can foster solidarity, enhance social cohesion, and build collective awareness oriented towards human security and well-being. Supported by literature studies and reflective analysis, this article demonstrates that a philosophically grounded cultural approach can offer a deeper and more contextual resilience strategy, creating a resilient and adaptive social environment where human security and sustainability are achieved in tandem.*

Keywords: Culture, Human Security, Sustainable Strategy

Abstrak: *Artikel ini mengeksplorasi peran penting pendekatan kebudayaan dalam membangun ketahanan dan keamanan insani sebagai fondasi keberlanjutan sosial. Van Peursen menguraikan perkembangan kebudayaan melalui tiga tahap utama: mitos, ontologi, dan fungsi, yang masing-masing mencerminkan evolusi cara manusia memahami dan mengelola realitas. Melalui pendekatan filsafat, serta analisis konsep-konsep budaya dan ketahanan, artikel ini menggali bagaimana landasan etis dan ontologis*



kebudayaan mampu menciptakan solidaritas, meningkatkan kohesi sosial, dan membangun kesadaran kolektif yang berorientasi pada keamanan dan kesejahteraan insani. Dengan dukungan studi literatur dan analisis reflektif, artikel ini menunjukkan bahwa pendekatan kebudayaan yang berbasis filsafat dapat menawarkan strategi ketahanan yang lebih dalam dan kontekstual, menciptakan lingkungan sosial yang resilien dan adaptif, di mana keamanan insani dan keberlanjutan dapat dicapai secara beriringan. Perspektif Van Peursen memberikan kekuatan pada pemahaman budaya sebagai elemen dinamis yang mempengaruhi interpretasi realitas dan adaptasi sosial. Dengan pendekatan fenomenologis, Van Peursen mengaitkan kebudayaan dengan proses perubahan, di mana manusia terus beradaptasi dengan tantangan melalui simbol, makna, dan teknologi. Keterbatasan utama perspektif ini terletak pada kurangnya fokus spesifik pada aplikasi praktis di konteks kontemporer yang kompleks, terutama dalam menghadapi isu keberlanjutan dan keamanan insani yang memerlukan solusi multi-sektoral dan berbasis komunitas.

Kata kunci: *Kebudayaan, Keamanan Insani, Strategi Keberlanjutan*

Pendahuluan

Kebudayaan merupakan elemen esensial dalam kehidupan manusia. Ia bukan hanya sekadar hasil dari kreativitas dan ekspresi manusia, tetapi juga cerminan dari cara manusia beradaptasi dengan lingkungan serta mengelola realitas yang dihadapinya. Dalam sejarah peradaban, kebudayaan telah menjadi fondasi yang menopang berbagai aspek kehidupan, mulai dari sistem sosial, nilai-nilai moral, hingga teknologi¹. Kebudayaan memberikan manusia kerangka untuk memahami dunia di sekitarnya dan cara untuk bertahan hidup dalam berbagai kondisi. Dalam konteks ini, Cornelis Anthonie van Peursen, seorang filsuf asal Belanda, menawarkan perspektif yang mendalam mengenai kebudayaan. Peursen tidak melihat kebudayaan sebagai sesuatu yang *ajeg*, melainkan sebagai proses dinamis yang terus berkembang seiring dengan perkembangan manusia. Menurut Peursen, kebudayaan adalah strategi manusia untuk bertahan hidup, adaptasi, dan mencapai kesejahteraan dalam lingkungan yang selalu berubah².

¹ EM. Wilson, *Organizational Culture as a Framework for male and Female progression and preferred management style* (PhD Thesis, Liverpool John Moores University).

² Sandra Harding, *Rethinking Standpoint Epistemology: What is Strong Objectivity?* *Feminist Epistemologies*, Linda Alcoff and Elizabeth Potter (eds.), (New York: Routledge, 1993): 49–82.

Selanjutnya, Peursen membagi perkembangan kebudayaan manusia ke dalam tiga tahapan utama: mitos (*myth*), ontologi (*ontology*), dan fungsi (*function*). Setiap tahapan ini mewakili cara manusia memahami dan mengelola dunia di sekitarnya³. *Pertama*, pada tahap mitos manusia cenderung menjelaskan dunia dan segala fenomena yang terjadi di sekitarnya melalui cerita-cerita mitos. Mitos-mitos ini tidak hanya merupakan cerita belaka, tetapi juga kaya akan simbolisme dan sarat dengan makna yang mendalam, yang membantu manusia dalam memahami dan menginterpretasikan berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat alamiah maupun sosial. Pada tahap mitos, manusia belum memerlukan penjelasan yang rasional atau berbasis bukti empiris. Sebaliknya, pengetahuan disampaikan dan diterima secara intuitif dan emosional. Mitos-mitos berfungsi sebagai kerangka berpikir yang menyatukan pengalaman manusia dengan alam dan masyarakat, memberikan penjelasan yang dianggap sah tentang asal-usul alam semesta, fenomena alam, dan kehidupan manusia. Dalam masyarakat yang hidup pada tahap ini, mitos memainkan peran penting dalam membentuk norma, nilai, dan identitas budaya.

Kedua, tahap ontologi merupakan fase penting dalam evolusi kebudayaan manusia, di mana terjadi pergeseran mendasar dari cara berpikir yang mitologis menuju cara berpikir yang lebih rasional dan logis. Dalam konteks ini, ontologi merujuk pada studi tentang “ada” atau “eksistensi,” di mana manusia mulai mengeksplorasi dan memahami hakikat dari realitas secara lebih mendalam dan sistematis. Pada tahap ini, manusia tidak lagi puas dengan penjelasan mitologis yang sering kali bersifat simbolis dan penuh dengan misteri. Mereka mulai mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang mendorong munculnya pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang alam semesta, kehidupan, dan keberadaan mereka sendiri. Ini adalah masa di mana manusia mulai mencari jawaban yang tidak hanya didasarkan pada kepercayaan atau tradisi, tetapi juga pada logika, pengalaman, dan pengamatan.

Ilmu pengetahuan (*sains*) dan filsafat mulai muncul sebagai disiplin-disiplin yang memberikan kerangka untuk memahami dunia secara lebih terstruktur. Ilmu pengetahuan, dengan metode empirisnya, memungkinkan manusia untuk mengamati, bereksperimen, dan menarik kesimpulan berdasarkan data yang dapat diukur dan diulang⁴. Sementara itu, filsafat memberikan landasan teoritis untuk merenungkan

³ VAN Peursen, C.A, *Strategi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2018): 18.

⁴ John Losee, *A Historical Introduction to the Philosophy of Science*, Fourth Edition (New York: Oxford University Press, 2001): 26.

konsep-konsep abstrak seperti keberadaan, waktu, ruang, dan penyebab. Perkembangan ini menandai perubahan penting dalam kebudayaan, di mana manusia mulai melihat dunia bukan sebagai sesuatu yang sepenuhnya misterius dan tidak dapat dipahami, tetapi sebagai sesuatu yang dapat diuraikan dan dijelaskan melalui hukum-hukum alam dan prinsip-prinsip logika.

Pada tahap ontologi, kebudayaan manusia menjadi semakin terhubung dengan upaya untuk menjelaskan realitas dalam istilah-istilah yang dapat dipahami secara rasional dan ilmiah. Manusia mulai bergerak dari sekadar menerima mitos sebagai kebenaran mutlak menuju pemahaman yang lebih mendalam dan rasional mengenai realitas⁵. Kebudayaan pada tahap ini ditandai oleh kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan filsafat, di mana keduanya berfungsi untuk menjelaskan dunia secara lebih sistematis dan terstruktur. Di sinilah manusia mulai mempertanyakan dan menganalisis fenomena yang terjadi di sekitar mereka, mencari penjelasan yang logis dan berbasis pada pengetahuan yang terukur, daripada hanya mengandalkan cerita-cerita mitos yang diwariskan secara turun-temurun.

Ketiga, tahap fungsi merupakan puncak dari perkembangan kebudayaan di mana manusia mulai berfokus pada kegunaan praktis dari pengetahuan yang telah dikumpulkan. Di sini, pemahaman tentang realitas tidak hanya bertujuan untuk mengetahui, tetapi juga untuk mengendalikan dan memanipulasi dunia demi kepentingan manusia. Teknologi dan ilmu terapan menjadi dominan, dengan penekanan pada bagaimana pengetahuan dapat digunakan untuk menciptakan hasil yang konkret dan efisien dalam kehidupan sehari-hari. Pada fase ini, manusia tidak lagi sekadar mencari penjelasan tentang dunia atau hakikat keberadaan, melainkan berupaya untuk memanfaatkan pengetahuan yang ada untuk memberikan solusi praktis terhadap berbagai masalah kehidupan. Kemajuan dalam teknologi memungkinkan manusia untuk mengendalikan dan memodifikasi lingkungan mereka, meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari.

Kebudayaan pada tahap fungsi diukur berdasarkan kemampuannya untuk memberikan hasil yang konkret dan bermanfaat. Nilai suatu gagasan, alat, atau teknologi ditentukan oleh seberapa besar kontribusinya terhadap kesejahteraan manusia dan kemampuannya untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Dengan demikian, segala aspek kebudayaan—mulai dari pendidikan, ilmu pengetahuan, hingga seni dan etika—difokuskan

⁵ Wendy Brown, *Undoing the Demos Undoing the Demos: Neoliberalism's Stealth Revolution*, (Cambridge: MIT Press, 2011): 17.

pada bagaimana sesuatu dapat berfungsi secara efektif dan mendukung kehidupan manusia dalam konteks yang nyata dan operasional⁶.

Melalui pemahaman mendalam tentang konsep kebudayaan Van Peursen, kita dapat melihat bahwa kebudayaan adalah kunci untuk memahami bagaimana manusia bisa terus hidup dan berkembang di tengah dunia yang selalu berubah. Kebudayaan tidak hanya menjadi warisan dari generasi ke generasi, tetapi juga menjadi panduan bagi manusia untuk merespons dinamika sosial, teknologi, dan lingkungan yang dihadapinya. Dengan demikian, mempelajari kebudayaan dalam perspektif Van Peursen memberi kita wawasan tentang bagaimana manusia dapat terus mengembangkan strategi yang efektif untuk bertahan hidup dan mencapai keberlanjutan dalam segala aspek kehidupan⁷. Kebudayaan, dalam pandangan ini, bukan sekadar hasil karya manusia, tetapi juga strategi yang mendasar untuk keberlanjutan hidup manusia di bumi.

Kebudayaan sebagai strategi berkelanjutan menunjukkan bahwa adaptasi, inovasi, dan kemampuan untuk mengatasi tantangan adalah kunci untuk kelangsungan hidup manusia. Dalam konteks modern, pandangan ini menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang akar kebudayaan serta penerapan pengetahuan dan teknologi untuk menghadapi tantangan global. Van Peursen memberikan kerangka pemikiran yang berguna untuk memahami kebudayaan sebagai strategi berkelanjutan yang tidak hanya bertahan tetapi juga beradaptasi dan berkembang, sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh manusia dari masa ke masa⁸.

Pemikiran tersebut memiliki relevansi yang signifikan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs). SDGs merupakan serangkaian tujuan global yang dirancang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengatasi tantangan-tantangan terbesar yang dihadapi oleh umat manusia, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan. Van Peursen menawarkan kerangka konseptual yang kaya untuk

⁶ Hans Haferkamp, and Neil J. Smelser, editors *Social Change and Modernity*. (Berkeley: University of California Press, c1992 1991) <http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft6000078s/>.

⁷ Van Niekerk, Arno J. "Inclusive Economic Sustainability: SDGs and Global Inequality", *Sustainability* 12, (No. 13: 5427, 2020). <https://doi.org/10.3390/su12135427>.

⁸ N. P., K. B. Mekha Hariram, Vipinraj Suganthan, and K. Sudhakar. 2023. "Sustainalism: An Integrated Socio-Economic-Environmental Model to Address Sustainable Development and Sustainability" *Sustainability* 15, (No. 13: 10682). <https://doi.org/10.3390/su151310682>.

memahami bagaimana kebudayaan dapat mendukung tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan⁹. Dengan menekankan pentingnya kohesi sosial, pengetahuan, teknologi, adaptasi, dan nilai-nilai etis, Van Peursen memberikan wawasan yang relevan bagi upaya global untuk mencapai SDGs. Kebudayaan, dalam perspektifnya, bukan hanya warisan masa lalu tetapi juga alat strategis untuk memastikan bahwa manusia dapat terus berkembang dalam harmoni dengan diri mereka sendiri, satu sama lain, dan lingkungan mereka.

Melalui kebudayaan, manusia mampu memahami dirinya lebih dalam, membina hubungan yang lebih bermakna dengan orang lain, serta menjaga keselarasan dengan lingkungan. Dalam konteks ini, kebudayaan menjadi instrumen yang hidup dan dinamis dan memungkinkan kita menata cara hidup, membentuk nilai, dan menciptakan struktur sosial yang memperkuat ikatan antarindividu dan antargenerasi. Kebudayaan bukan hanya sebuah identitas, tetapi juga sebuah kompas yang mengarahkan langkah manusia ke masa depan, sambil tetap berakar pada nilai-nilai yang memupuk keberlanjutan dan keberagaman. Manusia tidak hanya berkembang sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem yang lebih besar, berupaya untuk mencapai kesejahteraan bersama dan melindungi bumi yang mereka huni.

Metode Penelitian

Untuk mengkaji relevansi pemikiran Van Peursen dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), artikel ini menggunakan pendekatan konseptual yang bertujuan untuk menganalisis konsep-konsep kunci dalam pemikiran Van Peursen, khususnya mengenai tahap-tahap kebudayaan, dan menilai relevansinya terhadap pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini berfokus pada penguraian dan klarifikasi konsep-konsep seperti "mitos," "ontologi," dan "fungsi," serta menghubungkannya dengan konsep-konsep inti dalam SDGs, seperti "keberlanjutan," "kesetaraan," dan "kesejahteraan". Melalui pendekatan filsafat, serta analisis konsep-konsep budaya dan ketahanan, artikel ini menggali bagaimana landasan etis dan ontologis kebudayaan mampu menciptakan solidaritas, meningkatkan kohesi sosial, dan membangun kesadaran kolektif yang berorientasi pada keamanan dan kesejahteraan insani.

⁹ S. Fukuda-Parr, "From the Millennium Development Goals to the Sustainable Development Goals: Shifts in purpose, concept, and politics of global goal setting for development", *Gender & Development*, Vol. 24, No. 1 (February, 2016): 43–52.

Artikel ini juga menggunakan pendekatan teori keamanan insani yang memperluas konsep keamanan tradisional untuk mencakup aspek kesejahteraan manusia yang lebih luas, termasuk stabilitas ekonomi, sosial, dan budaya. Isu keamanan insani meliputi ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan erosi budaya akibat globalisasi dan urbanisasi yang cepat. Mengimplementasikan pendekatan keamanan insani yang menekankan pelestarian budaya membantu membangun ketahanan di komunitas lokal, serta mengatasi akar masalah ketidakamanan, seperti kemiskinan dan ketimpangan, yang banyak terjadi di berbagai wilayah. Pendekatan keamanan insani yang melibatkan pelestarian lingkungan sangat relevan di Indonesia, mengingat kerusakan lingkungan menjadi salah satu isu utama yang mengancam keamanan dan ketahanan masyarakat. Degradasi lingkungan seperti deforestasi, polusi, dan bencana alam tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga menyebabkan dampak ekonomi dan sosial yang luas, seperti kehilangan mata pencaharian dan migrasi paksa. Melalui pendekatan yang berkelanjutan dan berpusat pada masyarakat.

Pendekatan kebudayaan dalam studi keamanan memperkaya pemahaman kita dengan melihat keamanan bukan hanya sebagai upaya perlindungan dari ancaman eksternal, tetapi sebagai kondisi yang dibangun dari dalam masyarakat itu sendiri, melalui hubungan sosial, nilai-nilai bersama, dan rasa keterikatan dengan lingkungan. Perspektif ini menawarkan wawasan baru karena memungkinkan kita untuk memahami keamanan dalam konteks yang lebih luas dan mendalam. Dalam pendekatan ini, keamanan dipandang sebagai hal yang dinamis dan kontekstual, di mana faktor sosial, budaya, dan lingkungan saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Tantangan-tantangan kompleks seperti perubahan iklim, konflik sosial, dan ancaman terhadap identitas budaya membutuhkan respons yang tidak hanya teknis tetapi juga memahami akar sosial dan budaya dari rasa aman dan ketahanan masyarakat.

Pembahasan

A. Cornelis Anthonie van Peursen: Kehidupan dan Sketsa Pemikiran

Cornelis Anthonie van Peursen, lahir di Zoeterwoude pada tahun 1920, adalah seorang filsuf dan teolog terkemuka di Belanda yang dikenal luas atas kontribusinya dalam berbagai bidang filsafat, termasuk

fenomenologi, hermeneutika, dan filsafat kebudayaan. Pendidikan awalnya dimulai di Universitas Leiden, di mana ia mendalami filsafat dan teologi. Van Peursen melanjutkan studinya hingga meraih gelar doktor dalam bidang filsafat pada tahun 1959 dengan disertasi yang berjudul "Theorie van de Objectiviteit". Setelah memperoleh gelar doktor, Van Peursen memasuki dunia akademik dan menjadi dosen filsafat. Ia mengajar di berbagai universitas terkemuka di Belanda, termasuk Universitas Groningen dan Universitas Nijmegen, di mana ia kemudian diangkat menjadi profesor filsafat¹⁰. Dalam peran ini, Van Peursen banyak menulis dan mengajar tentang berbagai topik, dari fenomenologi hingga filsafat kebudayaan.

Karya-karya Van Peursen menjadi rujukan penting dalam diskursus filsafat modern, terutama dalam memahami bagaimana manusia menginterpretasikan dunia melalui lensa kebudayaan, simbolisme, dan agama. Di antara karyanya yang paling dikenal adalah "Strategi Kebudayaan," "Manusia dan Kebudayaan," serta "Manusia dan Agama." Melalui karya-karya ini, Van Peursen mengeksplorasi cara-cara di mana kebudayaan membentuk persepsi manusia tentang realitas, serta peran penting simbol dan agama dalam struktur sosial dan intelektual.

Dengan pendekatan yang mendalam dan reflektif, Van Peursen berhasil menggabungkan berbagai disiplin ilmu dalam upayanya untuk memahami kompleksitas pengalaman manusia. Kontribusinya dalam fenomenologi dan hermeneutika, khususnya, telah memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana manusia tidak hanya hidup di dalam dunia, tetapi juga membentuk dan diubah oleh dunia melalui makna yang mereka ciptakan. Cornelis Anthonie van Peursen meninggal pada tahun 1996, tetapi pengaruhnya terus dirasakan dalam dunia filsafat dan teologi. Karyanya tetap menjadi landasan penting bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang hubungan antara kebudayaan, simbol, dan agama dalam konteks pengalaman manusia yang lebih luas¹¹.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kebudayaan menjadi landasan utama karena mencerminkan cara manusia berinteraksi dengan lingkungan dan satu sama lain. Kebudayaan tidak hanya mencakup nilai-nilai dan norma-norma sosial, tetapi juga teknologi, pengetahuan, dan praktik yang diterapkan untuk mengelola sumber daya alam. Rasionalitas pemikiran Van Peursen tentang strategi kebudayaan dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan dan keamanan insani

¹⁰ C.A. Van Peursen, *Susunan Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993): 30

¹¹ C.A. Van Peursen, *Filsafat Ilmu*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014): 16.

terletak pada pemahaman bahwa kebudayaan adalah fondasi dari segala bentuk interaksi manusia dengan dunia di sekitar mereka. Dengan mengakui kebudayaan sebagai elemen kunci dalam strategi keberlanjutan dan keamanan, Van Peursen menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan manusiawi terhadap pembangunan, yang berfokus pada keseimbangan antara pemahaman, adaptasi, dan penerapan nilai-nilai yang mendukung kehidupan manusia secara berkelanjutan dan aman.

B. Strategi Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Bidang Sosial

Cornelis Anthonie van Peursen menekankan bahwa kebudayaan memiliki peran krusial dalam menciptakan kohesi sosial dan identitas kolektif, yang merupakan elemen fundamental untuk mencapai pembangunan berkelanjutan sosial. Menurut Van Peursen, kebudayaan, terutama pada tahap mitos, berfungsi sebagai alat yang menyatukan komunitas melalui narasi kolektif yang sarat dengan makna simbolis. Narasi ini tidak hanya memberikan stabilitas sosial tetapi juga menjadi panduan moral bagi masyarakat. Dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), pemikiran Van Peursen sangat relevan, khususnya dengan SDG 16 yang bertujuan untuk mempromosikan masyarakat yang damai, inklusif, dan berkelanjutan¹². Kohesi sosial yang kuat, yang dibentuk oleh kebudayaan, memungkinkan masyarakat untuk bekerja sama dengan lebih efektif dalam menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan sosial, seperti kemiskinan (SDG 1) dan ketidaksetaraan (SDG 10).

Dengan narasi kolektif yang mengakar kuat dalam budaya, masyarakat dapat membangun identitas bersama yang inklusif, yang pada gilirannya menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas. Ini penting untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya damai dan stabil, tetapi juga inklusif, di mana semua anggota masyarakat, terlepas dari latar belakang mereka, merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Lebih jauh, narasi kebudayaan yang memperkuat kohesi sosial juga dapat berfungsi sebagai alat untuk menanggulangi ketidaksetaraan. Ketika masyarakat diikat oleh nilai-nilai bersama yang menekankan keadilan dan solidaritas, mereka lebih mungkin untuk mengembangkan

¹² D. Le Blanc, "Towards integration at last? The Sustainable Development Goals as a network of targets", *Sustainable Development*, 23, (No. 3, 2015): 176-87.

kebijakan dan tindakan yang mendukung pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi, sesuai dengan tujuan SDG 10¹³.

Dalam konteks global saat ini, di mana masyarakat semakin heterogen dan kompleks, peran kebudayaan sebagai alat dialog menjadi semakin penting. Dialog antarbudaya yang efektif dapat membantu mengurangi konflik dan memperkuat kerjasama, yang sejalan dengan SDG 16 yang berfokus pada menciptakan masyarakat yang damai dan inklusif. Ketika kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat dapat menemukan titik temu melalui nilai-nilai budaya yang dimiliki bersama, mereka lebih mampu mengatasi tantangan-tantangan sosial seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan¹⁴. Hal ini penting mengingat bahwa tantangan-tantangan ini seringkali memiliki akar yang dalam dalam ketidakadilan historis dan ketidakseimbangan kekuasaan, yang hanya dapat diatasi melalui dialog yang inklusif dan berkelanjutan.

Kebudayaan juga dapat berfungsi sebagai medium untuk pendidikan keberlanjutan. Dalam perspektif Van Peursen, kebudayaan tidak hanya melibatkan transmisi nilai-nilai dan norma-norma, tetapi juga pendidikan mengenai cara hidup yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Melalui pendidikan budaya, masyarakat dapat diajarkan untuk memahami pentingnya keberlanjutan dalam segala aspek kehidupan, dari cara mereka menggunakan sumber daya alam hingga bagaimana mereka berinteraksi dengan sesama. Hal ini sangat relevan dengan SDG 4, yang menekankan pentingnya pendidikan berkualitas untuk semua¹⁵. Pendidikan yang berakar pada kebudayaan dapat memperkuat kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dan mendorong tindakan yang mendukung pelestarian lingkungan, pengurangan kemiskinan, dan pengurangan ketidaksetaraan. Dengan demikian, kebudayaan dapat menjadi alat yang ampuh untuk menciptakan perubahan sosial yang positif dan berkelanjutan.

Selain itu, kebudayaan dapat menjadi sumber inovasi sosial, yang penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Inovasi sosial sering kali lahir dari interaksi antara nilai-nilai budaya tradisional dan tantangan-tantangan kontemporer. Dalam hal ini, kebudayaan menyediakan kerangka berpikir yang memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan solusi kreatif yang sesuai dengan konteks lokal mereka,

¹³ A. Persson, Weitz, N. and Nilsson, M. "Follow-up and review of the Sustainable Development Goals: Alignment vs. internalisation", *RECIEL* 25, (No. 1): 59-68.

¹⁴ A. Angelsen, and Rudel, T. K. 2013. "Designing and implementing effective REDD+ policies: A forest transition approach", *Review of Environmental Economics and Policy* 7, (No. 1): 91-113.

¹⁵ E.B. Barbier, "Poverty, development, and environment", *Environment and Development Economics* 15, (No. 4, 2010), 635-60.

sambil tetap berkontribusi pada tujuan global. Secara keseluruhan, pemikiran Van Peursen tentang kebudayaan menawarkan kerangka kerja yang kaya untuk memahami bagaimana kebudayaan dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan keamanan insani. Dengan melihat kebudayaan sebagai alat untuk menciptakan kohesi sosial, memfasilitasi dialog, mendukung pendidikan keberlanjutan, dan mendorong inovasi sosial, Van Peursen menunjukkan bahwa kebudayaan bukan hanya elemen tambahan, tetapi komponen inti dari setiap strategi yang bertujuan untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan¹⁶.

C. Strategi Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Ekonomi

Van Peursen melihat kebudayaan sebagai sebuah sistem nilai yang membentuk kerangka etika bagi tindakan manusia, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, etika dan nilai-nilai kebudayaan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kesejahteraan sosial dan lingkungan¹⁷. Misalnya, konsep keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial yang tertanam dalam kebudayaan dapat menjadi panduan bagi praktik ekonomi yang berkelanjutan. Nilai-nilai ini mendorong perusahaan dan individu untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan ekonomi mereka, baik terhadap masyarakat maupun lingkungan. Ini sangat relevan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan ekonomi yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan perlindungan lingkungan.

Pemikiran Van Peursen juga relevan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam. Kebudayaan memberikan kerangka kerja yang mengatur bagaimana sumber daya digunakan dan dikelola. Dalam banyak kebudayaan tradisional, terdapat nilai-nilai yang menekankan pentingnya keseimbangan antara penggunaan sumber daya dan pelestariannya untuk generasi mendatang¹⁸. Dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, prinsip-prinsip ini dapat diterapkan untuk mengembangkan model

¹⁶ Barrett, C. B. "Rural poverty dynamics: Development policy implications", *Agricultural Economics* 32, (No. 1, 2005): 45-60.

¹⁷ M. Call, T. Mayer, Sellers, S. *et al.*, "Socio-environmental drivers of forest change in rural Uganda", *Land Use Policy* 62, (2017): 49-58.

¹⁸ S.H. Cheng, S. Ahlroth, S. Onder, *et al.* "What is the evidence for the contribution of forests to poverty alleviation? A systematic map protocol", *Environmental Evidence* 6, (No. 1, 2017): 10.

ekonomi yang menghormati batasan ekologis dan berupaya untuk menjaga kelestarian lingkungan serta relevan dengan konsep ekonomi sirkular, di mana limbah diminimalkan dan sumber daya digunakan secara efisien.

Lebih lanjut van Peursen berpendapat bahwa kebudayaan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keterhubungan komunitas lokal dengan akar mereka, meskipun mereka berada di bawah tekanan dan pengaruh ekonomi global yang semakin kuat. Dalam pandangan Van Peursen, kebudayaan bukan hanya sekumpulan tradisi atau kebiasaan yang diwariskan, tetapi juga fondasi yang memberi identitas, makna, dan rasa memiliki bagi suatu komunitas¹⁹. Identitas budaya ini tidak hanya berfungsi sebagai penanda keberadaan, tetapi juga sebagai elemen esensial yang menyediakan kontinuitas dan stabilitas di tengah perubahan yang cepat dan sering kali tak terduga. Dalam konteks globalisasi, di mana komunitas-komunitas lokal sering kali terpapar pada arus perubahan ekonomi yang masif dan penetrasi nilai-nilai eksternal, kebudayaan berperan sebagai benteng yang melindungi identitas lokal dari erosi. Ketika komunitas mampu mempertahankan dan merayakan identitas budaya mereka, mereka tetap terhubung dengan akar sejarah dan tradisi yang membentuk mereka, memberikan mereka pijakan yang kuat untuk menghadapi tantangan modern.

Identitas budaya juga memberikan rasa kontinuitas, yaitu kesadaran bahwa meskipun ada perubahan, ada sesuatu yang stabil dan tak tergoyahkan dalam keberadaan komunitas. Ini sangat penting dalam menghadapi perubahan, baik itu perubahan sosial, ekonomi, atau teknologi, karena kontinuitas tersebut memberikan rasa aman dan kepastian di tengah ketidakpastian yang sering kali dibawa oleh perubahan. Pembangunan ekonomi yang mengabaikan atau bahkan mengorbankan aspek budaya dapat membawa dampak negatif yang serius. Jika kebudayaan lokal diabaikan dalam proses pembangunan, ada risiko besar bahwa identitas budaya tersebut akan terkikis. Erosi identitas budaya tidak hanya berarti hilangnya tradisi atau kebiasaan, tetapi juga dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial yang lebih luas²⁰. Ketika komunitas kehilangan identitas budayanya, mereka juga kehilangan rasa memiliki yang menyatukan mereka sebagai sebuah kelompok. Tanpa identitas yang jelas, kohesi sosial bisa melemah, yang pada gilirannya bisa menyebabkan fragmentasi sosial, ketegangan, dan bahkan konflik.

¹⁹ N. Doswald, R. Munroe, R. Roe, D., *et al.*, "Effectiveness of ecosystem-based approaches for adaptation: Review of the evidence-base", *Climate and Development* 6, (No. 2, 2014): 185-201.

²⁰ C. Sandbrook, M. Walpole (eds.) *Biodiversity conservation and poverty alleviation: Exploring the evidence for a link (1st ed.)*, (Hoboken: John Wiley & Sons): 43-59.

Ketidakstabilan sosial ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga bisa mengganggu proses pembangunan itu sendiri, menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan memicu masalah sosial yang lebih kompleks.

Bagi Van Peursen, pentingnya mempertahankan identitas budaya dalam konteks pembangunan ekonomi tidak bisa diabaikan. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan harus mencakup upaya untuk menjaga dan memberdayakan kebudayaan lokal sebagai bagian integral dari strategi pembangunan. Ini berarti bahwa kebijakan dan program pembangunan harus didesain dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal, tradisi, dan keunikan yang ada dalam komunitas²¹. Sebagai contoh, pengembangan sektor ekonomi seperti pariwisata, kerajinan tangan, dan kuliner tradisional harus dilakukan dengan cara yang tidak hanya mendatangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperkuat dan melestarikan warisan budaya lokal. Dengan demikian, kebudayaan tidak hanya dipertahankan, tetapi juga menjadi aset yang mendukung diversifikasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks ekonomi berkelanjutan, ilmu pengetahuan dan teknologi berperan sebagai penggerak utama yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing. Teknologi memungkinkan penerapan praktik-praktik yang lebih ramah lingkungan, mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem, serta membuka peluang baru dalam industri yang sebelumnya tidak terjangkau. Dengan demikian, inovasi teknologi menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa harus mengorbankan sumber daya alam atau kesejahteraan sosial. Van Peursen juga menekankan pentingnya pendidikan dalam perkembangan kebudayaan dan masyarakat. Dalam tahap ontologi, pendidikan berperan penting dalam menyebarkan pengetahuan ilmiah dan meningkatkan kapasitas individu untuk berpartisipasi dalam proses inovasi. Sasaran ini sejalan dengan tujuan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), yang menekankan bahwa pendidikan harus mendukung pengembangan keterampilan yang relevan untuk pekerjaan, kewirausahaan, dan inovasi²².

²¹ S.K. Pattanayak and E.O. Sills, "Do tropical forests provide natural insurance? The microeconomics of non-timber forest product collection in the Brazilian Amazon", *Land Economics*, 77, No. 4, 2001): 595–612.

²² Kanowski P, Yao D, Wyatt S. SDG 4: Pendidikan Berkualitas dan Hutan - 'Benang Emas.' Dalam: Katila P, Pierce Colfer CJ, de Jong W, Galloway G, Pacheco P, Winkel G, eds. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Dampaknya terhadap Hutan dan Masyarakat*, (Cambridge University Press; 2019): 108-145.

Tahap ontologi juga mencerminkan pentingnya infrastruktur yang mendukung dan inovasi berkelanjutan, sesuai dengan SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur)²³. Van Peursen memahami bahwa perkembangan kebudayaan harus didukung oleh struktur-struktur yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Infrastruktur yang berkelanjutan mencakup segala hal, mulai dari energi bersih, transportasi yang efisien, hingga teknologi informasi yang memungkinkan konektivitas dan kolaborasi global. Inovasi di bidang ini tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, mengurangi ketidakesetaraan, dan memperkuat daya tahan ekonomi terhadap krisis.

Lebih jauh, pendidikan berkualitas dan infrastruktur yang inovatif menjadi dua pilar yang tidak dapat dipisahkan dalam proses ini. Pendidikan memastikan bahwa individu siap untuk berkontribusi dalam ekonomi yang semakin kompleks dan berorientasi pada keberlanjutan, sementara infrastruktur menyediakan dasar yang kokoh bagi pertumbuhan tersebut. Secara keseluruhan, tahap ontologi dalam pemikiran Van Peursen bukan hanya relevan untuk pemahaman filosofis tentang kebudayaan, tetapi juga memberikan wawasan penting bagi strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan²⁴. Dengan mengintegrasikan pengetahuan, inovasi, pendidikan, dan infrastruktur yang berkelanjutan, kita dapat menciptakan ekonomi yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga berkembang dengan cara yang adil dan berkelanjutan untuk semua.

D. Strategi Kebudayaan dan Pembangunan Berkelanjutan Lingkungan

Tahap fungsi dalam pemikiran Cornelis Anthonie van Peursen adalah fase di mana manusia mulai fokus pada penerapan pengetahuan dan teknologi secara praktis untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari²⁵. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, terutama dalam aspek lingkungan,

²³ Amr Adel, and Noor HS Alani, "Human-Centric Collaboration and Industry 5.0 Framework in Smart Cities and Communities: Fostering Sustainable Development Goals 3, 4, 9, and 11 in Society 5.0", *Smart Cities*, 7, (No. 4): 1723-1775. <https://doi.org/10.3390/smartcities7040068>.

²⁴ N. Rulandari, "Study of Sustainable Development Goals (SDGs) Quality Education in Indonesia in the First Three Years", *Budapest International Research and Critics Institute Journal*, 4, (No. 2, 2021): 2702-2708.

²⁵ C.A. Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*, (Jakarta: Kanisius, dan BPK Gunung Mulia, 1976): 31.

pendekatan ini memiliki relevansi yang sangat penting. Van Peursen menekankan bahwa pengetahuan dan teknologi harus diterapkan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia saat ini, tetapi juga untuk melindungi dan melestarikan lingkungan yang menjadi fondasi kehidupan manusia. Sasaran ini sejalan dengan beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya yang berkaitan dengan lingkungan, seperti SDG 13 (Tindakan terhadap Perubahan Iklim), SDG 14 (Kehidupan Bawah Laut), dan SDG 15 (Kehidupan di Darat)²⁶.

Dalam menghadapi perubahan iklim, teknologi berperan penting dalam mengembangkan energi bersih, mengurangi emisi karbon, dan meningkatkan efisiensi energi. Van Peursen akan berpendapat bahwa aplikasi praktis dari teknologi ini harus difokuskan pada mitigasi dampak perubahan iklim dan adaptasi terhadap kondisi iklim yang berubah. Ini mencakup segala hal dari teknologi energi terbarukan hingga sistem pertanian yang lebih adaptif terhadap cuaca ekstrem. Ekosistem laut menghadapi ancaman serius dari polusi, penangkapan ikan berlebihan, dan perubahan iklim. Pendekatan fungsional Van Peursen akan menekankan penggunaan teknologi untuk mengurangi dampak aktivitas manusia terhadap laut, seperti melalui pengembangan teknologi pemantauan laut yang lebih baik, pengurangan polusi plastik, dan praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan²⁷. Aplikasi teknologi ini harus dirancang untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut sambil mendukung kesejahteraan komunitas pesisir yang bergantung pada sumber daya laut.

Ekosistem darat, termasuk hutan, padang rumput, dan lahan basah, sangat penting untuk kehidupan di bumi. Pendekatan Van Peursen dalam tahap fungsi akan mencakup penerapan teknologi untuk pengelolaan lahan yang berkelanjutan, restorasi habitat yang rusak, dan perlindungan spesies yang terancam punah. Ini juga mencakup penggunaan teknologi seperti pemetaan satelit dan drone untuk memantau perubahan dalam ekosistem darat dan mendukung upaya konservasi yang lebih efektif. Pendekatan fungsional Van Peursen menekankan bahwa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, manusia harus mengelola sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab. Ide ini memanfaatkan pengetahuan dan teknologi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya sambil meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan²⁸.

²⁶ H.C.J. Godfray, J.R. Beddington, I.R. Crute, et al. 2010. "Food security: The challenge of feeding 9 billion people", *Science*, (Vol. 327): 812-18.

²⁷ I. J. Gordon, H. H. Prins, and G. R. Squire, (eds.), *Food production and nature conservation: Conflicts and solutions*, (London: Routledge, 2017): 42.

²⁸ A. Ickowitz, A. Jones, D. Rowland, F. Powell, and T. Sunderland, "Agricultural intensification, dietary diversity, and markets in the global food security narrative", *Global*

Tahap fungsi dalam pemikiran Van Peursen mengajak kita untuk melihat pengetahuan dan teknologi sebagai alat-alat praktis yang harus diterapkan untuk memberikan solusi nyata terhadap tantangan lingkungan. Ini sangat relevan dalam konteks pembangunan berkelanjutan, di mana pengelolaan sumber daya alam yang efisien dan berkelanjutan menjadi semakin penting. Dengan memfokuskan pada aplikasi praktis dari teknologi, Van Peursen memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana kita dapat mencapai pembangunan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga melestarikan lingkungan untuk generasi mendatang.

E. Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Keamanan Insani

Pembangunan berkelanjutan dan keamanan insani adalah dua konsep yang saling terkait dan saling memperkuat. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sementara itu, keamanan insani adalah pendekatan holistik yang berfokus pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar manusia, seperti keamanan ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan politik. Ketika digabungkan, kedua konsep ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan dan aman bagi seluruh umat manusia. Keamanan insani, dalam konteks ini, berperan sebagai elemen inti yang memastikan bahwa upaya pembangunan berkelanjutan tidak hanya menguntungkan lingkungan dan ekonomi, tetapi juga memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi setiap individu²⁹.

Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan dalam perspektif keamanan insani adalah upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, di mana semua orang dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan berkembang tanpa menghadapi risiko yang mengancam kehidupan mereka. Ini mencakup perlindungan terhadap ancaman-ancaman fisik, seperti bencana alam dan perubahan iklim, serta ancaman-ancaman sosial, seperti ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Keamanan insani dalam pembangunan berkelanjutan mencakup beberapa dimensi kunci, yang semuanya harus dipertimbangkan untuk mencapai

Food Security, 20, (2019): 9-16.

²⁹ UNDP, *Human Development Report 1994*, (New York: Oxford University Press, 1994): 24-25.

kesejahteraan yang berkelanjutan, meliputi³⁰: Keamanan Ekonomi (*Economic Security*), Keamanan Pangan (*Food Security*), Keamanan Kesehatan (*Health Security*), dan Keamanan Politik (*Political Security*).

1. Keamanan Ekonomi (*Economy Security*)

Keamanan ekonomi adalah konsep yang merujuk pada kemampuan individu, komunitas, dan negara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dasar mereka secara berkelanjutan, tanpa menghadapi ancaman signifikan yang dapat menggoyahkan stabilitas keuangan dan kesejahteraan mereka. Ini mencakup aspek-aspek penting seperti akses terhadap pekerjaan yang layak, pendapatan yang stabil, serta jaminan terhadap risiko-risiko ekonomi seperti pengangguran, inflasi, dan ketidakstabilan pasar. Salah satu pilar utama keamanan ekonomi adalah akses terhadap pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang layak tidak hanya berarti memiliki pekerjaan, tetapi juga pekerjaan yang memberikan upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Pekerjaan yang layak juga mencakup kondisi kerja yang aman, jam kerja yang wajar, dan hak-hak pekerja yang dihormati. Ketika individu memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak, mereka memiliki dasar yang kuat untuk mencapai keamanan ekonomi³¹.

Pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan sosial dapat membawa risiko jangka panjang yang mengancam keamanan ekonomi generasi mendatang. Oleh karena itu, keamanan ekonomi harus mencakup strategi untuk mengembangkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi tanpa merusak lingkungan atau menciptakan ketidaksetaraan sosial yang ekstrem. Keamanan ekonomi merupakan kondisi di mana individu, komunitas, dan negara merasa yakin bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka secara berkelanjutan, tanpa harus menghadapi ancaman yang serius terhadap stabilitas keuangan mereka³². Dalam skala global, keamanan ekonomi juga bergantung pada kerja sama internasional yang mendukung stabilitas dan keadilan ekonomi global. Dengan memastikan keamanan ekonomi, kita

³⁰ I. Robeyns, "The Capability Approach: A Theoretical Survey", *Journal of Human Development* 6, (No. 1, 2005): 93-117.

³¹ V. Singh, "An Impact and Challenges of Sustainable Development in Global Era", *Journal of Economics and Development Studies* 2, (No. 2, 2014): 327-337.

³² Stewart Frances, *Development and Security, Centre for Research on Inequality, Human Security, and Ethnicity (CRISE), Working Paper 3*, (London: University of Oxford, 2004): 41.

dapat membangun fondasi yang kuat untuk kesejahteraan manusia yang berkelanjutan dan inklusif.

2. Keamanan Pangan (*Food Security*)

Keamanan pangan adalah konsep mendasar yang mencerminkan kondisi di mana setiap orang, di setiap waktu, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan diet mereka dan preferensi makanan yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang aktif dan sehat. Keamanan pangan tidak hanya terbatas pada ketersediaan makanan, tetapi juga mencakup akses yang adil, distribusi yang efisien, serta stabilitas dalam pasokan dan konsumsi pangan. Akses fisik terhadap makanan tergantung pada ketersediaan makanan di pasar atau melalui produksi lokal. Ketersediaan ini dipengaruhi oleh infrastruktur yang baik, sistem transportasi yang efisien, dan rantai pasokan yang kuat³³. Di sisi lain, akses ekonomi terhadap pangan berkaitan dengan daya beli masyarakat. Harga pangan yang terjangkau dan pendapatan yang memadai adalah kunci untuk memastikan bahwa semua orang dapat memenuhi kebutuhan makanan mereka.

Ketersediaan pangan yang cukup dan beragam adalah elemen kunci dalam mencapai keamanan pangan. Pangan yang tersedia harus mencakup berbagai jenis makanan yang menyediakan nutrisi yang diperlukan untuk diet yang sehat dan seimbang. Ini meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang esensial bagi kesehatan manusia. Produksi pangan lokal memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan makanan, terutama di wilayah pedesaan³⁴. Pertanian yang berkelanjutan dan diversifikasi tanaman dapat membantu menjaga stabilitas dan variasi pangan sepanjang tahun. Selain itu, perdagangan internasional juga berkontribusi pada keamanan pangan dengan memungkinkan negara-negara untuk mengimpor makanan yang tidak dapat diproduksi secara lokal. Namun, ketergantungan yang berlebihan pada impor bisa meningkatkan kerentanan terhadap fluktuasi harga global dan gangguan pasokan.

Stabilitas pangan berarti bahwa akses terhadap makanan yang cukup dan bergizi harus dipertahankan sepanjang waktu, tanpa gangguan yang signifikan. Stabilitas ini bisa terancam oleh berbagai faktor seperti

³³ Shahrbanou Tadjbakhsh dan Anuradha M. Chenoy, *Human Security Concept and Implications*, (Routledge, New York, 2007): 40.

³⁴ Angga Nurdin Rahmat, *Keamanan Global: Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin*, (Alfabeta, Bandung, 2015): 258.

bencana alam, perubahan iklim, konflik, dan fluktuasi ekonomi. Sistem pangan harus dirancang untuk tahan terhadap guncangan, baik itu akibat bencana alam, konflik, atau perubahan harga pasar. Selain itu, adaptasi terhadap perubahan iklim juga merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas pangan. Perubahan iklim adalah ancaman besar bagi stabilitas pangan global, dan adaptasi pertanian terhadap kondisi cuaca yang berubah adalah kunci untuk memastikan bahwa produksi pangan tetap stabil di masa depan.

Keamanan pangan adalah tantangan global yang memerlukan kerja sama internasional. Ketika populasi dunia terus bertambah, kebutuhan akan makanan yang cukup dan bergizi juga meningkat. Di saat yang sama, perubahan iklim, degradasi lahan, dan masalah sosial seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan semakin memperumit upaya untuk mencapai keamanan pangan. Kerja sama internasional sangat penting untuk mengembangkan sistem pangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Salah satu cara untuk meningkatkan keamanan pangan global adalah dengan mengurangi pemborosan makanan. Setiap tahun, jumlah yang signifikan dari makanan yang diproduksi hilang atau terbuang sebelum mencapai konsumen. Mengurangi pemborosan makanan dapat meningkatkan ketersediaan pangan dan mengurangi tekanan pada sistem pangan global. Untuk mencapai keamanan pangan yang berkelanjutan, dibutuhkan pendekatan yang holistik yang melibatkan kerja sama internasional, inovasi dalam produksi pangan, perlindungan terhadap risiko lingkungan dan ekonomi, serta kebijakan dan pendidikan yang mendukung³⁵.

Keamanan pangan adalah aspek krusial dari kesejahteraan manusia dan stabilitas global. Ini tidak hanya mencakup ketersediaan makanan, tetapi juga akses yang adil, keamanan, kualitas nutrisi, dan stabilitas dalam pasokan pangan. Untuk mencapai keamanan pangan yang berkelanjutan, dibutuhkan pendekatan yang holistik yang melibatkan kerja sama internasional, inovasi dalam produksi pangan, perlindungan terhadap risiko lingkungan dan ekonomi, serta kebijakan dan pendidikan yang mendukung³⁶. Dengan mengamankan pangan bagi semua, kita tidak hanya menjaga kesehatan dan kesejahteraan individu, tetapi juga mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan stabilitas sosial di seluruh dunia.

³⁵ S Neil Mac Farlane and Yuen Foong Khong, *Human Security and The UN*, (Bloomington: Indiana University Press, 2006): 11.

³⁶ David Roberts, *Human Insecurity Global Structures of Violence*, (New York: Zed Book, 2008): 16.

3 Keamanan Kesehatan (*Health Security*)

Keamanan kesehatan adalah konsep penting yang mencakup perlindungan terhadap berbagai ancaman kesehatan yang dapat mempengaruhi individu, masyarakat, dan negara secara keseluruhan. Keamanan kesehatan tidak hanya berfokus pada pencegahan penyakit, tetapi juga pada pembangunan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif, yang dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan manusia dalam jangka panjang. Pilar utama keamanan kesehatan adalah memastikan bahwa semua orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau lokasi geografis, memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas³⁷.

Keamanan kesehatan menuntut bahwa pelayanan kesehatan harus terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Ini berarti mengurangi beban biaya yang ditanggung oleh individu dan keluarga, terutama di negara-negara dengan sistem kesehatan yang belum optimal. Sistem asuransi kesehatan universal atau skema subsidi adalah contoh upaya untuk memastikan bahwa tidak ada yang harus menanggung beban keuangan yang berat untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang mereka butuhkan. Selain itu, layanan kesehatan juga harus berkualitas, menyediakan perawatan yang aman, efektif, dan berbasis bukti, dengan memastikan bahwa tenaga kesehatan dilatih dengan baik dan memiliki akses ke sumber daya yang memadai untuk melakukan pekerjaan mereka. Kesiapsiagaan terhadap ancaman kesehatan adalah komponen penting dari keamanan kesehatan³⁸. Upaya ini melibatkan kemampuan sistem kesehatan untuk mendeteksi, merespons, dan mengatasi ancaman kesehatan secara cepat dan efektif, seperti wabah penyakit menular, bencana alam, atau krisis kemanusiaan lainnya.

Keamanan kesehatan memerlukan sistem pengawasan yang kuat untuk memantau dan mendeteksi ancaman kesehatan sejak dini. Sistem ini mencakup infrastruktur teknologi, laboratorium, dan jaringan komunikasi yang memungkinkan deteksi dini dan respons cepat terhadap wabah penyakit atau ancaman lainnya. Selain itu, kesiapan untuk merespons krisis kesehatan juga merupakan kunci dalam keamanan kesehatan. Ini berarti memiliki rencana darurat yang jelas, tim medis yang terlatih, dan sumber daya yang cukup untuk menghadapi keadaan darurat

³⁷ C. K. Khoury, A. D. Bjorkman, H. Dempewolf, *et al.* "Increasing homogeneity in global food supplies and the implications for food security", *Proceedings of the National Academy of Sciences* 111, (No. 11): 4001-6.

³⁸ J.D. Nkurunziza, K. Tsowou, and S. Cazzaniga. "Commodity dependence and human development", *African Development Review*, 29, (No. 1, 2017): 27-41.

kesehatan. Pengalaman dari pandemi COVID-19 menyoroti pentingnya tanggap darurat yang cepat dan terkoordinasi untuk mengurangi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi dari krisis kesehatan global. Keamanan kesehatan juga melibatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, baik yang menular maupun yang tidak menular³⁹. Pencegahan ini mencakup vaksinasi, program kesehatan masyarakat, promosi gaya hidup sehat, dan pengendalian faktor risiko seperti polusi udara, air yang terkontaminasi, dan konsumsi makanan tidak sehat.

Keamanan kesehatan sangat bergantung pada lingkungan yang sehat. Ancaman lingkungan seperti polusi udara, pencemaran air, perubahan iklim, dan degradasi lahan dapat secara signifikan mempengaruhi kesehatan manusia. Oleh karena itu, keamanan kesehatan mencakup upaya untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan sebagai bagian dari strategi kesehatan publik yang lebih luas. Upaya untuk mengurangi polusi udara dan air sangat penting untuk keamanan kesehatan, karena polusi adalah salah satu penyebab utama penyakit pernapasan, kardiovaskular, dan berbagai penyakit lainnya⁴⁰. Regulasi industri yang ketat, penggunaan teknologi bersih, dan promosi energi terbarukan adalah langkah-langkah penting dalam mengurangi polusi dan melindungi kesehatan masyarakat. Selain itu, adaptasi terhadap perubahan iklim juga merupakan ancaman besar bagi keamanan kesehatan global.

Keamanan kesehatan tidak dapat dicapai tanpa kebijakan kesehatan yang efektif dan adil. Kebijakan kesehatan harus inklusif dan dirancang untuk mengatasi ketidakadilan dalam akses terhadap pelayanan kesehatan. Ini berarti menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua kelompok masyarakat, termasuk yang paling rentan, untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang mereka butuhkan. Selain itu, keamanan kesehatan juga memerlukan pendanaan yang stabil dan cukup untuk mendukung sistem kesehatan yang efektif. Pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya yang memadai dialokasikan untuk layanan kesehatan, penelitian medis, dan pengembangan kapasitas tenaga kesehatan. Keamanan kesehatan global juga membutuhkan kesiapsiagaan

³⁹ W.N. Adger, *et al.*, *Human security*. In: *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (Eds.), (Cambridge: Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 2014): 755-791.

⁴⁰ M. Miner, *et al.* "Water sharing between India and Pakistan: a critical evaluation of the Indus Water Treaty", *Water International* 34, (No. 2, 2009): 204-216.

yang lebih baik terhadap ancaman kesehatan yang muncul. Organisasi internasional seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan respons global terhadap krisis kesehatan, serta dalam memberikan panduan dan bantuan kepada negara-negara yang membutuhkan⁴¹.

4. Keamanan Politik (*Political Security*)

Keamanan politik merupakan konsep fundamental yang merujuk pada perlindungan hak-hak asasi manusia, pemeliharaan stabilitas politik, dan pencegahan terhadap ancaman yang dapat mengganggu tatanan politik suatu negara. Keamanan politik memastikan bahwa individu dan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang bebas dari ancaman kekerasan, penindasan, dan ketidakadilan politik. Ini mencakup aspek-aspek seperti stabilitas pemerintahan, supremasi hukum, perlindungan hak-hak sipil dan politik, serta penguatan institusi demokrasi⁴². Keamanan politik sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang damai, adil, dan inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik tanpa rasa takut atau diskriminasi. Pemerintahan yang stabil memiliki legitimasi di mata rakyat, mampu merespons kebutuhan masyarakat, dan menjaga ketertiban serta mencegah kekacauan. Stabilitas ini juga mencakup transisi kekuasaan yang damai dan teratur, di mana pergantian kepemimpinan terjadi melalui proses demokratis seperti pemilihan umum yang bebas dan adil. Supremasi hukum memastikan bahwa hukum adalah aturan tertinggi yang harus diikuti oleh semua orang, termasuk mereka yang berkuasa, sehingga melindungi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Keamanan politik juga mencakup perlindungan hak-hak asasi manusia yang fundamental, termasuk hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Perlindungan hak-hak ini adalah inti dari keamanan politik karena tanpa perlindungan terhadap hak-hak dasar, individu dan kelompok dapat menjadi sasaran penindasan dan kekerasan politik. Kebebasan berpendapat dan berkumpul adalah hak esensial dalam masyarakat demokratis. Kebebasan ini memungkinkan individu untuk mengekspresikan pandangan mereka, mengkritik pemerintah, dan

⁴¹ B.D. Ratner, *et al.*, "Addressing conflict through collective action in natural resource management", *International Journal of the Commons* 11, No. 2 (September 2017): 877-906.

⁴² F. W. Munger, & C. Seron, "Race, law, and inequality, 50 years after the civil rights era", *Annual Review of Law and Social Science* 13, (2017): 331-350.

berorganisasi untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Keamanan politik mengharuskan bahwa hak-hak ini dilindungi dari ancaman seperti sensor, intimidasi, atau kekerasan dari pihak yang berwenang atau kelompok lain⁴³. Selain itu, hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, serta hak untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan publik, juga merupakan elemen penting dari keamanan politik.

Keamanan politik sangat bergantung pada kekuatan dan integritas institusi demokrasi. Institusi-institusi ini, seperti parlemen, pengadilan, dan media, memainkan peran penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah dan melindungi hak-hak warga negara. Penguatan institusi demokrasi mencakup pencegahan korupsi, peningkatan transparansi, dan memastikan bahwa semua tindakan pemerintah dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan⁴⁴. Parlemen yang kuat dan mandiri adalah salah satu pilar keamanan politik. Parlemen yang efektif dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif, membuat undang-undang yang melindungi hak-hak warga negara, dan memastikan bahwa kebijakan pemerintah mencerminkan kehendak rakyat. Peradilan yang independen juga merupakan penjaga supremasi hukum dan pelindung hak-hak asasi manusia. Pengadilan yang bebas dari campur tangan eksekutif atau kelompok kepentingan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan bahwa setiap individu mendapatkan keadilan yang layak. Selain itu, media yang bebas memainkan peran penting dalam keamanan politik dengan menyediakan informasi yang akurat dan memfasilitasi debat publik.

Keamanan politik tidak dapat dicapai tanpa kebijakan publik yang mendukung stabilitas politik dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Selain itu, pendidikan politik yang berkualitas sangat penting untuk membangun masyarakat yang sadar akan hak-hak dan tanggung jawab politik mereka⁴⁵. Kebijakan publik harus dirancang untuk memastikan inklusi politik, di mana semua kelompok masyarakat, termasuk yang terpinggirkan, memiliki akses yang sama terhadap proses politik. Ini bisa melibatkan reformasi pemilu, pengurangan hambatan administratif, dan promosi partisipasi perempuan dan minoritas dalam politik. Pendidikan

⁴³ G. Shani, G. "Human Security as Ontological Security: A Post-Colonial Approach", *Postcolonial Studies* 20, (No. 3, 2017): 275-293.

⁴⁴ J. Gerring, and S. Thacker, "Political Institutions and Governance: Pluralism versus Centralism", *British Journal of Political Science* 34, No. 2 (2004): 295-3.

⁴⁵ S. Eckardt, "Political Accountability, Fiscal Conditions and Local Government Performance - Cross-sectional evidence from Indonesia", *Public Administration and Development* 28, (2008): 1-17.

politik juga merupakan alat penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik. Dengan mendidik warga negara tentang hak-hak mereka, proses politik, dan pentingnya demokrasi, keamanan politik dapat diperkuat karena warga negara yang terinformasi lebih mungkin untuk terlibat secara konstruktif dalam politik dan mempertahankan hak-hak mereka.

Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran penting dalam memediasi konflik, mempromosikan hak asasi manusia, dan mendukung pembangunan institusi demokrasi di negara-negara yang sedang bertransisi. Upaya pencegahan konflik dan pemeliharaan perdamaian juga merupakan bagian integral dari keamanan politik global. Ini melibatkan tidak hanya intervensi militer, tetapi juga pembangunan institusi, dukungan ekonomi, dan promosi dialog antar kelompok yang berseteru. Untuk mencapai keamanan politik, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan kebijakan yang mendukung, pendidikan politik yang berkualitas, serta kerjasama internasional untuk mencegah dan menyelesaikan konflik⁴⁶. Dengan memastikan keamanan politik, kita dapat menciptakan lingkungan di mana setiap individu merasa dilindungi, dihormati, dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan politik dan sosial.

F. Analisis dan Kritik Terhadap Konsep Cornelis Anthonie van Peursen

Pendekatan Cornelis Anthonie van Peursen dalam memahami kebudayaan sebagai sesuatu yang dinamis dan adaptif menawarkan berbagai keunggulan yang signifikan dalam analisis budaya dan interaksi sosial. Van Peursen menolak pandangan kebudayaan sebagai entitas yang statis dan tidak berubah. Sebaliknya, ia menekankan bahwa kebudayaan adalah fenomena yang terus berkembang dan beradaptasi sesuai dengan perubahan waktu, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Pendekatan ini membawa beberapa keunggulan yang penting dalam memahami kebudayaan secara lebih komprehensif. Salah satu keunggulan utama dari pendekatan Van Peursen adalah kemampuannya untuk menjelaskan bagaimana kebudayaan beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi⁴⁷. Seiring dengan perkembangan teknologi

⁴⁶ Alan Doig, and David Norris, "Improving anti corruption agencies as organisations", *Journal of Financial Crime* 19, No. 3 (2012): 255-273. <https://doi.org/10.1108/13590791211243101>.

⁴⁷ Mogens K. Justesen and Christian Bjørnskov, "Exploiting the Poor: Bureaucratic

dan perubahan dalam struktur sosial, kebudayaan juga berkembang dan menyesuaikan diri. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk melihat bagaimana inovasi teknologi dan perubahan sosial berinteraksi dengan norma-norma budaya, menciptakan bentuk-bentuk baru dari praktik dan keyakinan yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Pendekatan dinamis dan adaptif Van Peursen juga mendorong inovasi dalam praktik sosial dan budaya. Dengan melihat kebudayaan sebagai sesuatu yang selalu siap beradaptasi dan berubah, pendekatan ini membuka peluang bagi masyarakat untuk bereksperimen dengan ide-ide baru, praktik baru, dan bentuk-bentuk ekspresi budaya yang inovatif. Ini memungkinkan kebudayaan untuk terus relevan dan vital, tidak hanya dalam mempertahankan identitas, tetapi juga dalam menghadapi tantangan-tantangan masa depan. Melalui pemahaman bahwa setiap kebudayaan memiliki kapasitas untuk beradaptasi dan berkembang, pendekatan ini menekankan pentingnya melestarikan nilai-nilai lokal sambil tetap terbuka terhadap pengaruh global⁴⁸. Dengan menekankan fleksibilitas, adaptabilitas, dan evolusi, pendekatan ini tidak hanya memberikan wawasan yang mendalam tentang cara kebudayaan berkembang, tetapi juga memberikan alat yang berguna untuk mengelola perubahan budaya dalam dunia yang semakin terhubung dan kompleks.

Sejauh ini telah banyak diuraikan, bahwa Van Peursen dikenal karena pandangannya yang dinamis dan adaptif terhadap kebudayaan. Meski pandangan ini menawarkan berbagai keunggulan dalam memahami perubahan budaya, konsep Van Peursen juga tidak lepas dari kritik. Salah satu kritik terhadap pendekatan Van Peursen adalah kecenderungan untuk beroperasi pada tingkat abstraksi yang sangat tinggi. Pandangan Van Peursen tentang kebudayaan sebagai sesuatu yang dinamis dan terus berkembang seringkali diungkapkan dalam istilah yang sangat umum dan konseptual. Akibatnya, pendekatan ini mungkin kurang memberikan pedoman konkret bagi peneliti atau praktisi dalam menganalisis situasi budaya yang spesifik. Dengan kata lain, pendekatan ini bisa jadi terlalu teoritis dan kurang memberikan solusi praktis untuk masalah-masalah budaya yang spesifik.

Kritik lain terhadap konsep Van Peursen adalah bahwa pendekatannya dapat dianggap kurang memperhatikan aspek-aspek struktural dalam kebudayaan, seperti kekuasaan, ekonomi, dan institusi

Corruption and Poverty in Africa", *World Development* Vol 58, (June 2014): 106-115.

⁴⁸ Anna Persson, Bo Rothstein, and Jan Teorell, "Why Anticorruption Reforms Fail—Systemic Corruption as a Collective Action Problem", *Governance* 26, No. 3, (July 2013): 449-471.

politik. Meskipun Van Peursen menekankan fleksibilitas dan adaptabilitas kebudayaan, kritik menyebut bahwa pendekatan ini mungkin kurang menekankan bagaimana struktur-struktur sosial tertentu dapat membatasi atau menghambat perubahan budaya. Misalnya, dalam masyarakat di mana kekuasaan politik atau ekonomi sangat terkonsentrasi, kebudayaan mungkin tidak mudah berubah meskipun ada potensi atau kebutuhan untuk perubahan. Van Peursen cenderung melihat kebudayaan sebagai sesuatu yang berkembang melalui adaptasi dan perubahan yang relatif harmonis⁴⁹. Kritik terhadap pandangan ini menunjukkan bahwa pendekatan tersebut mungkin mengabaikan atau meremehkan peran konflik, ketegangan, dan resistensi dalam proses perubahan budaya. Dalam kenyataannya, perubahan budaya sering kali melibatkan benturan antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda atau pandangan dunia yang bertentangan.

Meskipun Van Peursen menekankan bahwa kebudayaan harus dinamis dan adaptif, ada kritik yang menunjukkan bahwa pendekatan ini bisa saja meremehkan pentingnya kebudayaan tradisional yang stabil dan berkelanjutan. Beberapa kritikus mungkin berpendapat bahwa dengan terlalu menekankan adaptasi dan perubahan, pendekatan Van Peursen dapat mengabaikan nilai dari kebudayaan yang telah teruji oleh waktu dan memberikan stabilitas serta identitas yang kuat bagi masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan tekanan yang tidak perlu pada masyarakat untuk berubah, bahkan ketika perubahan itu mungkin tidak diinginkan atau diperlukan⁵⁰. Pendekatan Van Peursen mungkin lebih relevan untuk kebudayaan yang berada dalam interaksi terus-menerus dengan kebudayaan lain, seperti dalam konteks globalisasi. Namun, bagi kebudayaan yang lebih terisolasi atau yang memiliki sedikit interaksi dengan dunia luar, konsep kebudayaan sebagai sesuatu yang dinamis dan terus berubah mungkin kurang sesuai.

Beberapa kritikus juga berpendapat bahwa definisi kebudayaan dalam pendekatan Van Peursen bisa dianggap terlalu luas atau tidak spesifik. Karena Van Peursen menekankan bahwa kebudayaan mencakup segala sesuatu yang berubah dan beradaptasi, definisi ini dapat menjadi terlalu inklusif. Akibatnya, menjadi sulit untuk membedakan antara perubahan budaya yang benar-benar signifikan dan perubahan yang bersifat lebih superfisial atau permukaan. Ambiguitas ini dapat

⁴⁹ Heather Marquette, and Caryn Peiffer, "Grappling With The 'Real Politics' of Systemic Corruption: Theoretical Debates Versus 'Real-World' Functions", *Governance* 31, No. 3, (July 2018): 499-514.

⁵⁰ C. Ward, "Probing Identity, Integration and Adaptation: Big Questions, Little Answers", *International Journal of Intercultural Relations* 37, No. 4 (July 2013): 391-404.

menghambat analisis yang lebih mendalam dan spesifik mengenai kebudayaan, karena konsep yang terlalu luas dapat menyulitkan dalam menilai mana aspek dari perubahan budaya yang benar-benar penting dan mana yang hanya bersifat sementara atau minor⁵¹. Dengan kata lain, pendekatan yang terlalu inklusif dapat mengaburkan pemahaman kita tentang dinamika kebudayaan, membuatnya lebih sulit untuk mengidentifikasi dan menganalisis elemen-elemen kunci yang sebenarnya mendorong atau menahan perubahan budaya yang lebih substansial.

Penutup

Kebudayaan berperan krusial sebagai fondasi dinamis yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang dan bertahan dalam jangka panjang. Van Peursen memandang kebudayaan bukan hanya sebagai warisan statis, tetapi sebagai entitas yang terus berkembang dan beradaptasi seiring dengan perubahan sosial, teknologi, dan lingkungan. Dalam konteks keberlanjutan, kebudayaan menyediakan kerangka nilai, norma, dan praktik yang mendukung pengelolaan sumber daya yang bijaksana, serta inovasi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa depan. Dalam hal keamanan insani, kebudayaan berfungsi sebagai penjaga identitas kolektif dan kohesi sosial, yang keduanya penting untuk stabilitas dan harmoni masyarakat. Kebudayaan yang dinamis dan adaptif, sebagaimana dipahami oleh Van Peursen, memungkinkan komunitas untuk menghadapi perubahan dan krisis tanpa kehilangan inti dari identitas mereka.

Hal ini mendukung pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemeliharaan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dalam perspektif Van Peursen, kebudayaan sebagai strategi keberlanjutan dan keamanan insani menawarkan pendekatan yang holistik dan berorientasi jangka panjang. Kebudayaan tidak hanya berfungsi sebagai perekat sosial, tetapi juga sebagai alat untuk inovasi, adaptasi, dan kelangsungan hidup dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Dengan demikian, kebudayaan menjadi pilar utama dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan kondisi keamanan yang melindungi dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk memperdalam pemahaman tentang kebudayaan sebagai strategi berkelanjutan, arah

⁵¹ M. Saleh, S. Kholil, & A.T. Sikumbang, "Chinese Ethnic Communication Pattern in The Environment of Indigenous People in Lhokseumawe, Indonesia", *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (Birci-Journal)* 1, (No. 4): 114-123.

penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada beberapa area kunci yang akan memberikan wawasan lebih mendalam mengenai peran kebudayaan dalam mendukung keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Pendekatan kebudayaan dalam membangun ketahanan dan keamanan insani dapat diwujudkan melalui beberapa strategi praktis yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam berbagai aspek keamanan. Pemerintah dan lembaga keamanan dapat merancang strategi yang memperkuat nilai budaya masyarakat setempat, dengan melibatkan tokoh adat dan komunitas lokal untuk membangun kepercayaan serta relevansi kebijakan. Pendidikan kebudayaan di sekolah-sekolah dan komunitas juga penting, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kolaborasi dan harmoni sebagai bagian dari keamanan. Selain itu, pemerintah perlu menjalin kemitraan berkelanjutan dengan komunitas melalui dialog yang konsisten untuk membangun ketahanan sosial. Pembangunan infrastruktur sosial seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan ruang publik juga menjadi prioritas, demi mendukung kesejahteraan dan keamanan fisik serta emosional masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Angga Nurdin Rahmat, *Keamanan Global: Transformasi Isu Keamanan Pasca Perang Dingin*. (Bandung: Alfabeta, 2015).
- EM. Wilson, *Organizational Culture as a Framework for male and Female progression and preferred management style*. (PhD Thesis, Liverpool John Moores University).
- Gordon, I. J., Prins, H. H. and Squire, G. R. (eds.), *Food Production and Nature Conservation: Conflicts and solutions*. (London: Routledge, 2017).
- Frances, Stewart, *Development and Security, Centre for Research on Inequality, Human Security, and Ethnicity (CRISE), Working Paper 3*. (London: University of Oxford, 2004).
- Harding, Sandra, *Rethinking Standpoint Epistemology: What is Strong Objectivity?. Feminist Epistemologies*, Linda Alcoff and Elizabeth Potter (eds.). (New York: Routledge, 1993)
- Kanowski P, Yao D, Wyatt S. SDG 4: Pendidikan Berkualitas dan Hutan - 'Benang Emas.' Dalam: Katila P, Pierce Colfer CJ, de Jong W, Galloway G, Pacheco P, Winkel G, eds. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Dampaknya terhadap Hutan dan Masyarakat*. (Cambridge University Press; 2019)

- Roberts, David, *Human Insecurity Global Structures of Violence*. (New York: Zed Book, 2008)
- Sandbrook, C., Walpole, M. (eds.) *Biodiversity conservation and poverty alleviation: Exploring the evidence for a link (1st ed.)*, (Hoboken: John Wiley & Sons).
- Shahrbanou Tadjbakhsh dan Anuradha M. Chenoy, *Human Security Concept and Implications*, (Routledge, New York, 2007).
- UNDP, *Human Development Report 1994*. (New York: Oxford University Press, 1994).
- S Neil Mac Farlane and Yuen Foong Khong, *Human Security and The UN*, (Bloomington: Indiana University Press, 2006).
- Van Peursen, C. A, *Filsafat Ilmu*. (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014)
- _____, *Strategi Kebudayaan*. (Jakarta: Kanisius, dan BPK Gunung Mulia, 1976).
- _____, *Susunan Ilmu Pengetahuan*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993).
- _____, *Strategi Kebudayaan*. (Yogyakarta: Kanisius, 2018)

Jurnal

- Adel, Amr, and Noor HS Alani, "Human-Centric Collaboration and Industry 5.0 Framework in Smart Cities and Communities: Fostering Sustainable Development Goals 3, 4, 9, and 11 in Society 5.0", *Smart Cities* 7, No. 4. <https://doi.org/10.3390/smartcities7040068>.
- Adger, W.N. et al., *Human security. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (Eds.)). Cambridge: Cambridge University Press, United Kingdom and New York, NY, USA, 2014.
- Angelsen, A. and Rudel, T. K. "Designing and implementing effective REDD+ policies: A forest transition approach", *Review of Environmental Economics and Policy* 7, No. 1, 2013.
- Anna Persson, Bo Rothstein, and Jan Teorell, "Why Anticorruption Reforms Fail – Systemic Corruption as a Collective Action Problem", *Governance* 26, (No. 3, July 2013).
- Barbier, E. B, "Poverty, Development, and Environment", *Environment and Development Economics* 15, No. 4, (2010).

- Barrett, C. B. "Rural poverty dynamics: Development policy implications", *Agricultural Economics* 32, No. 1, (2005).
- Call, M., Mayer, T., Sellers, S. *et al.*, "Socio-environmental drivers of forest change in rural Uganda", *Land Use Policy* 62, (2017).
- Cheng, S. H., Ahlroth, S., Onder, S. *et al.* "What is the evidence for the contribution of forests to poverty alleviation? A systematic map protocol", *Environmental Evidence* 6, No. 1, (2017).
- Doig, A., & Norris, D. "Improving anti-corruption agencies as organisations", *Journal of Financial Crime* 19, No. 3. (July 2012) <https://doi.org/10.1108/13590791211243101>.
- Doswald, N., Munroe, R., Roe, D., *et al.*, "Effectiveness of ecosystem-based approaches for adaptation: Review of the evidence-base", *Climate and Development* 6, No. 2, (2014).
- Eckardt, S. "Political Accountability, Fiscal Conditions and Local Government Performance - Cross-sectional evidence from Indonesia", *Public Administration and Development* 28, (2008).
- Fukuda-Parr, S. "From the Millennium Development Goals to the Sustainable Development Goals: Shifts in purpose, concept, and politics of global goal setting for development", *Gender & Development* 24, No. 1. (February, 2016)
- Gerring, J.; Thacker, S., Political Institutions and Governance: Pluralism versus Centralism. *British Journal of Political Science* 34, No. 2, (2014).
- Godfray, H. C. J., Beddington, J. R., Crute, I. R. *et al.* "Food security: The challenge of feeding 9 billion people", *Science* 327. (2010)
- Haferkamp, Hans, and Neil J. Smelser, editors *Social Change and Modernity*. (Berkeley: University of California Press, c1992 1991) <http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft6000078s/>.
- Hariram, N. P., K. B. Mekha, Vipinraj Suganthan, and K. Sudhakar. "Sustainalism: An Integrated Socio-Economic-Environmental Model to Address Sustainable Development and Sustainability", *Sustainability* 15, No. 13, (2023). <https://doi.org/10.3390/su151310682>.
- Heather Marquette and Caryn Peiffer, "Grappling With The 'Real Politics' of Systemic Corruption: Theoretical Debates Versus 'Real-World' Functions", *Governance* 31, No. 3, (July 2018).
- Ickowitz, A., Jones, A., Rowland, D., Powell, F. and Sunderland, T. "Agricultural intensification, dietary diversity, and markets in the global food security narrative", *Global Food Security* 20, (2019).
- J.D. Nkurunziza, K. Tsowou and S. Cazzaniga. "Commodity dependence and human development", *African Development Review* 29, No. 1, (2017).

- Khoury, C. K., Bjorkman, A. D., Dempewolf, H. *et al.* "Increasing homogeneity in global food supplies and the implications for food security)", *Proceedings of the National Academy of Sciences* 111, No. 11. (July 17, 2013)
- Le Blanc, D. "Towards integration at last? The Sustainable Development Goals as a network of targets", *Sustainable Development* 23, No. 3, (2015).
- Losee, John, *A Historical Introduction to the Philosophy of Science*, Fourth Edition New York: Oxford University Press, (2017).
- Miner, M. *et al.* "Water sharing between India and Pakistan: a critical evaluation of the Indus Water Treaty", *Water International* 34, No. 2, (2009).
- Mogens K. Justesen and Christian Bjørnskov, "Exploiting the Poor: Bureaucratic Corruption and Poverty in Africa", *World Development* 58, (June 2014).
- Munger, F. W., & Seron, C. (2017), "Race, law, and inequality, 50 years after the civil rights era", *Annual Review of Law and Social Science* 13, (2017).
- Pattanayak, S. K. and Sills, E. O, "Do tropical forests provide natural insurance? The microeconomics of non-timber forest product collection in the Brazilian Amazon", *Land Economics* 7, No. 4, (2001)
- Persson, A., Weitz, N. and Nilsson, M. "Follow-up and review of the Sustainable Development Goals: Alignment vs. internalisation", *RECIEL* 25, No. 1, (2016).
- Ratner, B.D. *et al.*, "Addressing conflict through collective action in natural resource management", *International Journal of the Commons* 11, No. 2, (2017).
- Robeyns, I. "The Capability Approach: A Theoretical Survey", *Journal of Human Development* 6, No. 1, (2005).
- Rulandari, N. "Study of Sustainable Development Goals (SDGS) Quality Education in Indonesia in the First Three Years", *Budapest International Research and Critics Institute Journal* 4, No. 2, (2021).
- Saleh, M., Kholil, S., & Sikumbang, A. T. "Chinese Ethnic Communication Pattern in The Environment of Indigenous People in Lhokseumawe, Indonesia", *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (Birci-Journal)*, 1, No. 4 (2018).
- Shani, G. "Human Security as ontological security: a post-colonial approach", *Postcolonial Studies* 20, No. 3, (2017).
- Singh, V, "An Impact and Challenges of Sustainable Development in Global Era", *Journal of Economics and Development Studies* 2, No. 2, (2014).

- Van Niekerk, Arno J. "Inclusive Economic Sustainability: SDGs and Global Inequality", *Sustainability* 12, No. 13, (2020). <https://doi.org/10.3390/su12135427>.
- Ward, C. "Probing Identity, Integration and Adaptation: Big Questions, Little Answers", *International Journal of Intercultural Relations* 37, No. 4. (July, 2013)
- Wendy Brown, *Undoing the Demos Undoing the Demos: Neoliberalism's Stealth Revolution* Cambridge: MIT Press, (2011).

Indeks

A

adaptasi sosial 264
akses pembiayaan 237, 261
aliansi 41, 45, 49, 51, 61, 72, 210
Al Qaeda 10
Asean Counter Terrorism And
Peacekeeping Task Force 76

B

balance of power 41, 57
Bandwagoning 41
Bibliometrik 79, 80, 101, 135, 136, 140,
148
Analisis 79, 101, 135, 140, 148
big data 187, 202
bom bunuh diri 12, 20, 204
Bom Gereja Surabaya 1, 2
BRICS 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211,
212, 213, 214, 219, 220, 221, 222,
223, 224, 225, 226, 227, 228, 229,
230, 231, 232, 233, 234

C

Child Protection 2, 7
Child Suicide Bombers 3, 20
cybersecurity 135, 136, 185, 187, 203

D

data Scopus 80, 141, 142
Defence Cooperation Agreement 56

Defence Cooperation Agreement 47
digitalisasi 236, 241, 247, 249, 255
digitalisasi UMKM 241, 249
diplomasi ekonomi 227
diskriminasi 35, 112, 154, 157, 178, 284
diversifikasi pasar 228
dominasi ekonomi 206

E

ekologis 274
eksil 1965 26, 27, 30, 32, 35
energi terbarukan 213, 214, 224, 225,
226, 228, 242, 277, 283

F

filsafat kebudayaan 270
Flexible Work Arrangements 103, 104,
109, 110, 132, 133

G

G30S/PKI 25, 28, 29
geopolitik 53, 73, 75, 206, 207, 208,
211, 212, 213, 214, 220, 224, 225,
226, 227
go international 237

H

hak asasi manusia 26, 31, 33, 81, 83,
150, 151, 152, 155, 157, 159, 162,
163, 164, 167, 168, 170, 173, 191,

196, 284, 285, 286
 HAM 23, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36,
 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155,
 156, 158, 160, 161, 163, 164, 166,
 167, 169, 170, 171, 172, 173, 175,
 178, 179, 197, 198
 pelanggaran 23, 28, 32, 34, 35, 151,
 156, 163, 166, 167, 169, 170, 171,
 173

I

ideologi radikal 184, 186, 188, 189, 192
 indoktrinasi 160
 informasi publik 97, 99, 136, 147
 inklusi keuangan 237
 integrasi ekonomi 206
 ISIS 1, 2, 4, 5, 6, 12, 14, 18, 19, 21, 182,
 186, 188, 190, 192, 201, 202, 203
 Islamic State of Iraq and Syria 1, 2, 4

J

JAD 4, 5, 12, 192, 193
 Jakarta Entrepreneur 235, 236, 237,
 238, 249, 254
 Jamaah Ansharut Daulah 4, 12

K

keamanan 25, 27, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
 69, 70, 71, 72, 74, 75, 79, 80, 81,
 82, 83, 97, 99, 112, 124, 149, 150,
 151, 152, 153, 157, 170, 171, 172,
 173, 177, 178, 179, 180, 181, 182,
 184, 186, 187, 192, 193, 195, 196,
 197, 198, 205, 206, 208, 209, 214,
 215, 216, 219, 227, 228, 246, 263,
 264, 268, 269, 270, 271, 273, 278,
 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285,
 286, 289, 290
 ekonomi 205, 206, 208, 215, 216, 219,
 228, 278, 279
 insani 278
 nasional 1, 23, 39, 79, 103, 135, 149,

177, 205, 235, 263
 negara 80, 97, 151, 152, 177, 180, 181,
 193
 regional 44, 45, 46, 48, 53, 70, 74
 siber 184, 187, 197
 kebijakan ekonomi 206, 208, 211, 212,
 217, 224, 225
 kebijakan pemerintah 197
 kebudayaan 263, 264, 265, 266, 267,
 268, 270, 271, 272, 273, 276, 289,
 291
 keluarga 11, 21, 204, 239, 255
 kemitraan strategis 43, 47, 49, 57, 77
 kepentingan nasional 39, 40, 41, 42,
 43, 44, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 60,
 61, 62, 69, 71, 72, 80
 kepolisian 54, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87,
 95, 96, 97, 98, 99, 141, 159, 179,
 182, 191, 192, 193, 194, 195, 196,
 197
 kerja fleksibel 103, 108, 122, 123, 124,
 125, 130
 kerja sama internasional 42, 55, 197,
 281
 kesehatan mental 104
 keseimbangan hidup 111
 kesejahteraan 61, 69, 72, 103, 104, 105,
 106, 111, 112, 113, 130, 138, 178,
 194, 214, 215, 217, 218, 219, 228,
 238, 243, 264, 266, 268, 269, 273,
 275, 277, 278, 279, 280, 281, 282,
 289, 290
 ekonomi 243
 kesiapsiagaan 283
 ketahanan
 mental 103, 104, 105, 107
 ketahanan
 ekonomi 235, 236, 238, 239, 247, 255
 ketahanan keuangan 227
 kewarganegaraan 34, 56, 76
 kohesi sosial 264, 268, 271, 273, 274,
 289
 kolaborasi 198, 206, 210, 227, 235, 238,
 239, 240, 254, 276, 290
 Komite Kebijakan Industri Pertahanan

- 55
 komunikasi publik 147
 Kota Depok 103, 104, 113, 130
- L**
- latihan berskala besar 72
 latihan gabungan 44, 60, 72
 latihan militer 39, 44, 46, 47, 48, 49, 51,
 52, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69,
 71, 73, 74
 lingkungan kerja 104, 105, 215, 216
- M**
- media Sosial 79, 80, 82, 85, 87, 95, 97,
 135, 136, 138, 139, 140, 148, 187,
 203
 mitra strategis 61, 64, 73
 modernisasi alutsista 64, 70
- N**
- NATO 69, 70, 77, 210
 negara
 isolasi 156
 keamanan 80, 97, 151, 152, 177, 180,
 181, 193
 otoritas 151
 pengelompokan 90
 perangkat 138
 stabilitas 153
 New Development Bank 205, 206,
 207, 208, 209, 221, 223, 228, 229,
 230, 231, 234
 nilai lokal 287, 290
- O**
- operasi gabungan 44, 48, 67, 69
 Orde Baru 23, 25, 26, 28, 31, 48, 180,
 181
 Orde Lama 25, 30
 Osama bin Laden 10
- P**
- pandemi COVID-19 209, 217, 241, 249,
 283
 pelestarian lingkungan 269, 272
 pembangunan berkelanjutan 267, 268,
 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277,
 278, 289, 290
 pengawasan 187, 203
 pengelolaan sumber daya alam 273,
 278
 perangkat teknologi 83, 179
 perubahan global 222
 perubahan sosial 218, 272, 274, 286,
 287, 289
 Perubahan teknologi 98
 PKI 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35
 Polri 6, 84, 101, 184, 187, 188, 199, 203
 potensi ancaman 53, 55, 80, 193
 produktivitas 106, 110, 113, 216, 228,
 239, 240, 246, 254, 275
- R**
- radikalisasi 150, 153, 197
 radikalisme 84, 101, 189, 201
 reformasi 26, 33, 65, 156, 162, 163, 165,
 170, 173, 181, 196, 209, 285
 rehabilitasi 156, 197
 rekrutmen 190, 196
 resiliensi 105
- S**
- SDGs 267, 268, 271, 277, 294
 sejarah 25, 35
 stabilitas ekonomi 206, 217, 220, 221,
 222, 224, 225, 227, 228, 269
 stabilitas kawasan 45, 61, 62, 64
 stabilitas keuangan global 207
 strategi digital 243
 strategi keberlanjutan 271, 289
 strategi komunikasi 136, 137, 138, 146,
 147
 strategi pertahanan 72
 Super Garuda Shield 39, 40, 45, 46, 47,
 48, 49, 50, 51, 52, 53, 60, 62, 63,
 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
 73, 74, 77

Surabaya Bomb 2, 6

T

teknologi digital 224, 236, 240, 241
teknologi informasi 108, 243, 276
Tentara Nasional Indonesia 44, 55
terorisme 1, 4, 9, 20, 21, 54, 76, 84, 101,
177, 178, 181, 196
Tiongkok 26, 31, 48, 49, 57, 58, 59, 60,
206, 208, 209, 210, 211
TNI 22, 24, 28, 44, 45, 46, 47, 48, 55, 56,
60, 61, 62, 63, 64, 69, 70, 71, 75,
76, 138, 199
TNI-AD 24, 28, 47, 75
transfer pengetahuan 45, 69, 70, 226,
236
transformasi digital 224, 226, 248

U

UMKM 217, 235, 236, 237, 238, 239,
240, 241, 242, 243, 244, 245, 246,
247, 248, 249, 250, 254, 255, 257,
258, 259, 260, 261
UNICEF 2
UNODC 18, 21, 196, 204

V

viktimologi 27, 29